



UNIVERSITAS INDONESIA

**TERJEMAHAN BERANOTASI BUKU
*TANA TORAJA: A SOCIAL HISTORY OF
AN INDONESIAN PEOPLE*
KE BAHASA INDONESIA**

TESIS

**ESRIATY SEGA' KENDENAN
0906586985**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER LINGUISTIK**

**DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TERJEMAHAN BERANOTASI BUKU
*TANA TORAJA: A SOCIAL HISTORY OF
AN INDONESIAN PEOPLE*
KE BAHASA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Humaniora**

**ESRIATY SEGA' KENDENAN
0906586985**

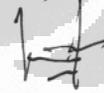
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER LINGUISTIK
DEPOK
JUNI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan Universitas Indonesia kepada saya.

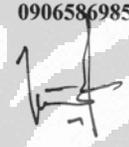
Jakarta, 22 Juni 2012



Esriaty Segar Kendenan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.**

Nama : Esriaty Segal Kendenan
NPM : 0906586985
Tanda Tangan : 
Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Esriaty Sega' Kendenan
NPM : 0906586985
Program Studi : Magister Linguistik
Judul Tesis : Terjemahan Beranotasi Buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* ke Bahasa Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat (*Rahayu Hidayat*)

Pembimbing II: Dr. Grace Josephine Tiwon (*Grace Josephine Tiwon*)

Penguji : Dr. Susilastuti Sunarya (*Susilastuti Sunarya*)

Penguji : Dr. F.X. Rahyono (*F.X. Rahyono*)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Juli 2012

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Bambang Wipawarta
Dr. Bambang Wipawarta
NIP.196510231990031002

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan sumber hikmat, pengetahuan, dan kekuatan dalam menjalani setiap proses dalam kehidupan saya termasuk dalam penyelesaian studi ini.

Saya sangat menyadari bahwa tidak ada satu pun keberhasilan yang dapat diraih tanpa partisipasi pihak lain. Demikian pula dalam studi dan proses penulisan tugas akhir ini, begitu banyak pihak yang telah mendukung bahkan secara langsung membantu saya dalam menyelesaikan studi ini. Oleh karena itu tanpa bermaksud mengecilkkan peran mereka yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu di sini, saya merasa patut menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat selaku pembimbing I dan yang sekaligus telah bersedia menjadi narasumber dalam pengerjaan tugas akhir ini. Saya sangat menghargai pengorbanan waktu dan tenaga Ibu dalam membimbing saya. Kiranya Ibu Yayu selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas yang diemban saat ini.
2. Dr. Grace Josephine Tiwon selaku pembimbing II dan yang sekaligus juga berperan sebagai narasumber dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala keramahan dan kebaikan Ibu.
3. Para pengajar di Program Studi Magister Linguistik FIB UI yang telah sangat membantu terutama dalam menjalani proses perkuliahan. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Nur dan Mbak Rita atas keramahan dan bantuannya baik selama masa perkuliahan maupun selama penulisan tugas akhir ini. Semoga Mbak berdua selalu sehat dan kompak.
4. Dinas Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan dana beasiswa sehingga saya dapat melanjutkan studi di FIB UI. Selain itu juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengelola BPPS di UI yang telah sangat kooperatif membantu pencairan dana BPPS itu.
5. STiBA-SW dan YPTKSW yang telah mengizinkan dan menugaskan saya melanjutkan studi ke FIB UI. Saya minta maaf karena telah menghabiskan

- cukup banyak waktu untuk itu bahkan tidak dapat kembali tepat waktu, harap dimaklumi.
6. Rekan-rekan pengajar di STiBA-SW yang telah mendukung dan bersedia memaklumi keterlambatan saya kembali ke kampus. Banyak hal mungkin sudah berubah, tetapi persahabatan di antara kita semoga tidak ikut berubah. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ervin Suryaningsih, rekan kerja, teman kost, dan sahabat seperjuangan di Depok atas segala bantuan dan dukungannya.
 7. Para narasumber yang telah menghabiskan waktu berdiskusi serta memberi komentar atas terjemahan saya. Bapak Julius Saludung, terima kasih atas waktu dan perhatiannya sehingga saya dapat mendapatkan informasi yang penting untuk tugas akhir ini setiap saat. Terima kasih juga atas kesediaan Mbak Sri Kusuma Winahyu mengoreksi bahasa Indonesia saya serta meluangkan waktu untuk mendiskusikannya sehingga saya mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru mengenai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kepada Bapak Oktovianus, saya berterima kasih karena masih bisa menyediakan waktu membaca dan meluruskan bahasa saya dalam kesibukan mengajarnya. Saya juga sangat berterima kasih atas komentar Sdr. Rama pada naskah terjemahan ini, yang semakin meyakinkan saya akan bagian yang memang masih kaku atau sulit dipahami.
 8. Rekan seperjuangan di Program Linguistik bidang Penerjemahan: Angela Wahyuni Krisnaretha, S.S., Era Bawarti, S.Sos., M.Hum., Indah Sulistyowati, S.Pd., Mai Ria Suzanna, S.Pd., M.Hum., Nurhasanah, S.S., dan Swasti Nareswari, S.S., M.Hum. Tak lupa juga terima kasih kepada rekan seangkatan di Program Magister Linguistik FIB UI yang tak dapat saya sebutkan satu per satu di sini.
 9. Orang tua, kakak, adik, semua keponakan, serta sanak saudara dan kerabat yang sudah memberi dukungan penuh sehingga dapat menempuh studi ini dengan baik. Tuhan memberkati karya dan pelayanan kita.

Depok 22 Juni, 2012


Esriaty Segar Kendenan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esriaty Segar Kendenan
NPM : 0906586985
Program Studi : Magister Linguistik
Departemen : Linguistik
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Terjemahan Beranotasi Buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* ke Bahasa Indonesia

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan



(Esriaty Segar Kendenan)

ABSTRAK

Nama : Esriaty Sega' Kendenan
Program Studi : Magister Linguistik
Judul : Terjemahan Beranotasi Buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* ke Bahasa Indonesia.

Tugas akhir ini merupakan terjemahan beranotasi buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*. Buku ini merupakan sebuah disertasi bidang sejarah sosial yang mengulas perkembangan sejarah dan budaya masyarakat Toraja dari tahun 1860 sampai dengan 1998 dalam tiga kurun waktu. Meskipun mengenai sejarah dan budaya masyarakat Indonesia khususnya Toraja, buku ini merupakan hasil karya orang asing yang menulis TSu dalam bahasa Inggris dengan menggunakan banyak kata budaya. Hal itu tentu saja menimbulkan masalah dalam penerjemahannya. Oleh karena itu, anotasi diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pilihan padanan yang diberikan dalam penerjemahan, khususnya menyangkut penerjemahan nama diri dan nama jenis, kata budaya, idiom, dan metafora. Untuk menyelesaikan masalah penerjemahan itu digunakan prosedur penerjemahan dengan transferensi, pemberian catatan kaki, penerjemahan resmi, penghilangan, penerjemahan idiom dan metafora, serta kuplet. Metode penerjemahan yang digunakan adalah metode penerjemahan komunikatif.

Kata kunci:

Anotasi, nama diri, nama jenis, kata budaya, idiom, metafora, transferensi, catatan kaki, penerjemahan resmi, penghilangan, parafrasa, dan kuplet.

ABSTRACT

Name : Esriaty Sega' Kendenan
Study Program: Magister of Linguistics
Title : Annotated Translation of Book *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* into Bahasa Indonesia

This paper is about an annotated translation on *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*. The book is a published dissertation in social history that presenting the development of Torajan history and culture from 1860 to 1998 in three periods of time. Although the book is about Indonesian, especially Toraja, social history and culture, it was written by a foreign author in English by using many cultural words. It is definitely arising many problems in translating. Therefore, annotation is given as the responsibility for some equivalence chosen to solve the problem in translation, particularly in translating proper and common names, cultural words, idiomatic expression, and metaphors. To solve problems facing in translating, the translation procedures used are: transference, notes, recognized translation, omission, paraphrasing, the translation of idiom and metaphors, and couplet. This also applies the communicative method of translation.

Key words:

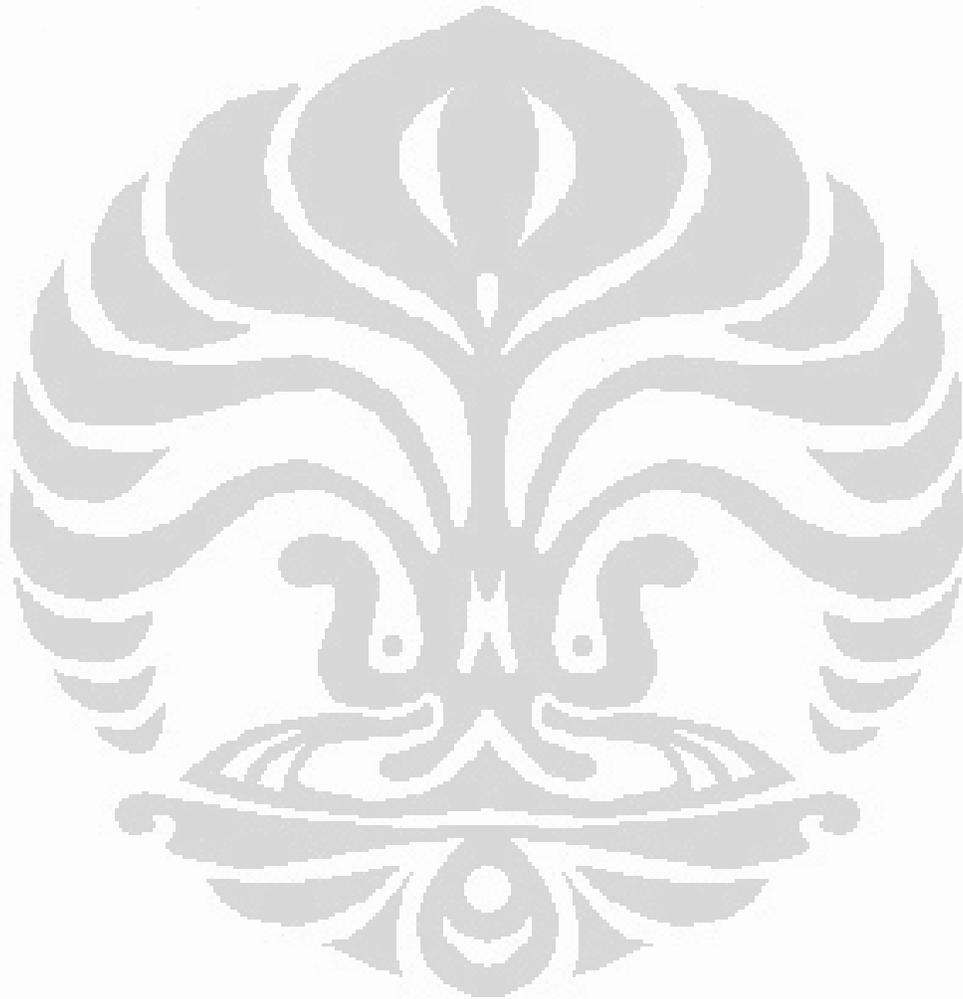
Annotation, proper name, common name, cultural words, idiom, metaphors, transference, notes, recognized translation, omission, paraphrasing, and couplet.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Teks Sumber	3
1.2.1 Deskripsi Penulis	4
1.2.2 Ringkasan Buku	4
1.3 Pembaca Teks	10
BAB 2 KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI	11
2.1 Jenis Teks	11
2.2 Teori Skopos	14
2.3 Penerjemahan	16
2.3.1 Pengertian Penerjemahan	16
2.3.2 Metode Penerjemahan	16
2.3.3 Prosedur Penerjemahan	18
2.4 Penerjemahan Teknis	20
2.4.1 Istilah	20
2.4.2 Teks Teknis	20
2.5 Penerjemahan Kata Budaya	22

2.6 Penerjemahan Ungkapan Idiomatis	24
2.7 Penerjemahan Metafora dan Simile	25
2.8 Metodologi Terjemahan Beranotasi	27
2.8.1 Metodologi Penerjemahan	27
2.8.2 Metodologi Anotasi	31
BAB 3 TERJEMAHAN	33
BAB 4 TEKS SUMBER	73
BAB 5 ANOTASI	110
5.1 Istilah	110
5.1.1 Istilah yang Tidak Diberi Padanan	111
5.1.2 Istilah Asing yang Diberi Padanan	123
5.1.3 Istilah dengan Catatan Kaki	125
5.1.4 Istilah Asing dengan Penghilangan	126
5.2 Nama Diri dan Nama Jenis	128
5.2.1 Nama yang Tidak Diberi Padanan	128
5.2.1.1 Nama Diri	128
5.2.1.2 Nama Jenis	136
5.2.2 Nama yang Diberi Padanan	138
5.2.3 Nama Diri yang Dilengkapi Penjelasan Tambahan	142
5.2.4 Nama Diri yang Dilengkapi Catatan Kaki	145
5.2.5 Nama Diri dengan Penghilangan	147
5.2.6 Nama Diri dengan Kuplet	151
5.3 Ungkapan Idiomatis	155
5.3.1 Idiom yang Diberi Padanan	155
5.3.2 Idiom yang Dipadankan dengan Parafrasa	158
5.4 Metafora	160
5.4.1 Metafora yang Dipadankan dengan Simile	160
5.4.2 Penerjemahan Metaforis	162
5.4.3 Penerjemahan Nonmetaforis	164
BAB 6 PENUTUP	167
6.1 Kesimpulan	167
6.2 Saran	168

DAFTAR ACUAN	170
GLOSARIUM	174



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Fungsional Jenis Teks dan Kaitannya dengan Metode Penerjemahan	12
Tabel 3.1	Pertumbuhan Pendidikan di Ma'kale-Rantepao, 1913-1939 ..	37
Tabel 4.1	Growth of Education in Ma'kale-Rantepao, 1913 to 1939	76
Tabel 5.1	Istilah Toraja yang Tidak Diberi Padanan	111
Tabel 5.2	Istilah Asing yang Tidak Diberi Padanan	117
Tabel 5.3	Istilah Asing yang Diberi Padanan	123
Tabel 5.4	Istilah dengan Catatan Kaki	125
Tabel 5.5	Istilah Asing dengan Penghilangan	126
Tabel 5.6	Nama Diri dalam Bahasa Toraja	128
Tabel 5.7	Nama Diri dalam Bahasa Belanda	131
Tabel 5.8	Nama Jenis yang Tidak Diberi Padanan	136
Tabel 5.9	Nama Diri yang Diberi Padanan	138
Tabel 5.10	Nama Diri dengan Penjelasan Tambahan	142
Tabel 5.11	Nama Diri dengan Catatan Kaki	145
Tabel 5.12	Nama Diri dengan Penghilangan	147
Tabel 5.13	Pengindonesiaan dengan Penjelasan Tambahan	151
Tabel 5.14	Penghilangan dan Naturalisasi	153
Tabel 5.15	Penghilangan dan Transferensi	154
Tabel 5.16	Idiom yang Diberi Padanan (pil pahit)	155
Tabel 5.17	Idiom yang Diberi Padanan (lintah darat)	157
Tabel 5.18	Idiom yang Dipadankan dengan Parafrasa	158
Tabel 5.19	Metafora yang Dipadankan dengan Simile	161
Tabel 5.20	Penerjemahan Metaforis "a sea of Bugis"	162
Tabel 5.21	Penerjemahan Metaforis "non-Islamic buffer"	163
Tabel 5.22	Penerjemahan Nonmetaforis	164

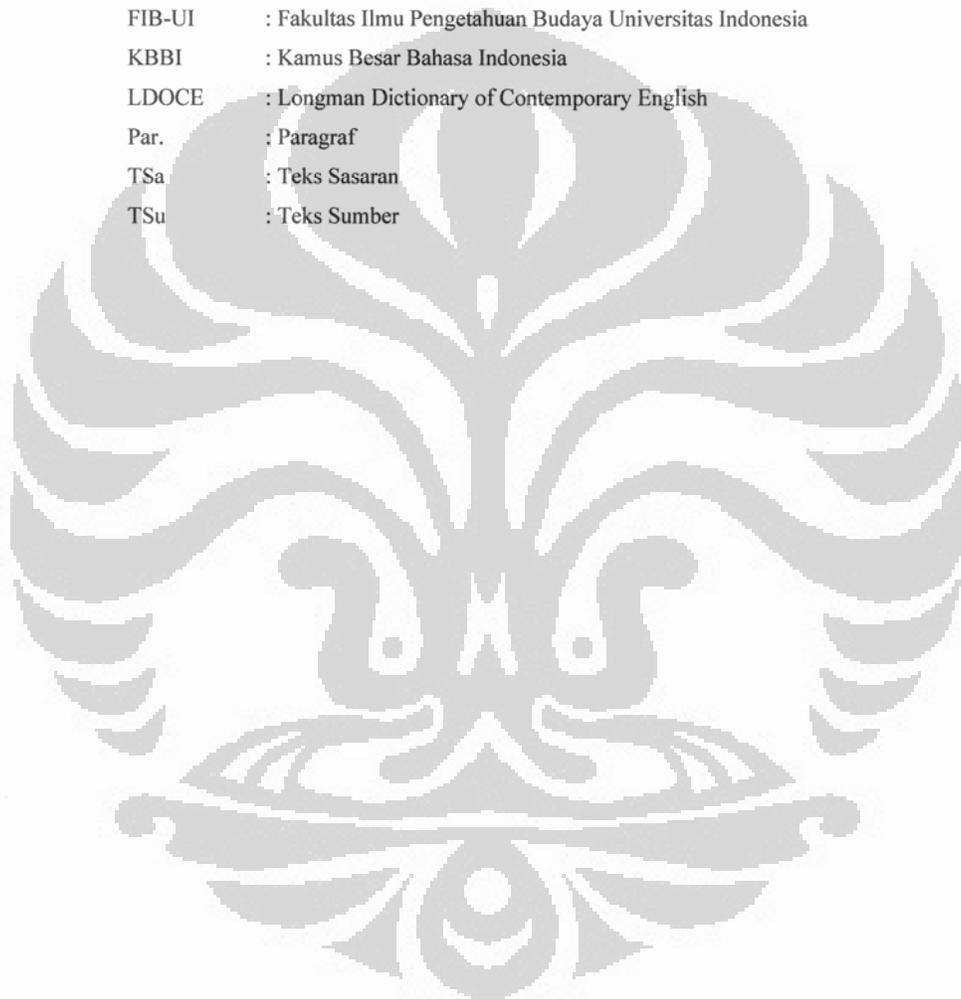
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram V	17
Gambar 5.1	Hierarki struktur pemerintahan pada tahun 1938 di Tana Toraja	120



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

BSa	: Bahasa Sasaran
BSu	: Bahasa Sumber
FIB-UI	: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
LDOCE	: Longman Dictionary of Contemporary English
Par.	: Paragraf
TSa	: Teks Sasaran
TSu	: Teks Sumber



ABSTRAK

Nama : Esriaty Sega' Kendenan
Program Studi : Magister Linguistik
Judul : Terjemahan Beranotasi Buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* ke Bahasa Indonesia.

Terjemahan beranotasi adalah penerjemahan dengan pemberian komentar atas pilihan padanan tertentu dalam menerjemahkan sebuah teks. Dalam menerjemahkan disertasi yang telah diterbitkan mengenai sejarah sosial orang Toraja ini, saya menggunakan metode penerjemahan komunikatif. Sebagian besar masalah yang muncul dalam penerjemahan teks itu terkait dengan kata budaya yang banyak digunakan oleh penulis TSu selain penggunaan nama diri dan nama jenis, idiom, dan metafora. Untuk menyelesaikan masalah penerjemahan itu saya menggunakan prosedur penerjemahan: transferensi, pemberian catatan kaki, penerjemahan resmi, penghilangan, dan kuplet. Dalam terjemahan beranotasi ini, anotasi diberikan untuk menjelaskan pilihan padanan yang saya gunakan dalam menerjemahkan istilah dan ungkapan untuk menyelesaikan masalah dalam penerjemahan. Dengan demikian, penerjemahan buku sejarah selain membutuhkan penguasaan BSu dan BSa yang baik juga memerlukan penelitian dokumen sejarah terkait untuk lebih memahami konsep dan konteks agar dapat mengalihkan pesan penulis TSu dengan benar.

Kata kunci:

Anotasi, nama diri, nama jenis, kata budaya, idiom, metafora, transferensi, catatan kaki, penerjemahan resmi, penghilangan, parafrasa, dan kuplet.

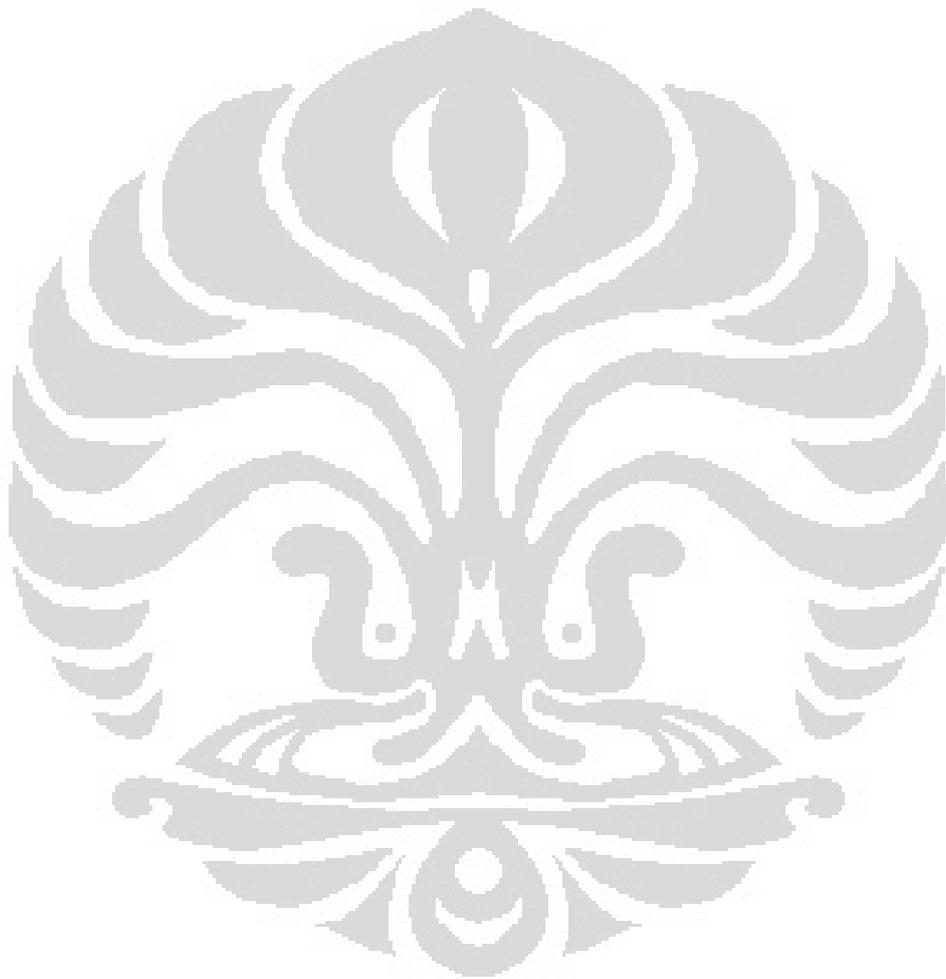
ABSTRACT

Name : Esriaty Sega' Kendenan
Study Program: Magister of Linguistics
Title : Annotated Translation of Book *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* into Bahasa Indonesia

An annotated translation is a translation with commentary on certain equivalences chosen while translating of a text. In translating this published dissertation the social history of the Toraja people, I applied the communicative method of translation. Most translation problems arising were related to the translation of cultural words used by the author of the book, in addition to proper and common names, idiomatic expressions, and metaphors. To solve the problems, I used following translation procedures: transference, notes, recognized translation, omission, paraphrasing, and couplet. In this annotated translation, annotations were given to explain the choice of terms and expressions equivalences used to overcome the problems in translation. Thus, the translation of history books does not only need mastery of the source as well as target language but also requires thorough historical document research to have a better understanding of the context and concepts, in order to be able to transfer the message well.

Key words:

Annotation, proper name, common name, cultural words, idiom, metaphors, transference, notes, recognized translation, omission, paraphrasing, and couplet.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Topik penelitian ini adalah terjemahan beranotasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, khususnya kasus penerjemahan *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*, karya Terance W. Bigalke. Buku ini merupakan laporan penelitian untuk disertasi sehingga disajikan oleh penulisnya dengan bahasa akademik.

Perbedaan bahasa dan budaya yang melatari TSu dan TSa merupakan sumber utama masalah yang tidak dapat dihindari dalam penerjemahan teks apa pun. Penerjemahan teks akademik dalam bentuk disertasi sebagai sebuah teks teknis juga tidak akan lepas dari berbagai masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan penerjemah yang dapat memahami dengan baik tidak hanya bahasa Inggris akademik dan budaya Toraja yang terungkap dalam TSu, tetapi juga bahasa Indonesia akademik dan budaya Indonesia untuk menulis TSa. Dengan kata lain, penerjemah tidak cukup hanya memahami teks, namun juga konteks yang melatarinya untuk menghasilkan terjemahan yang baik.

Secara garis besar teks dapat dibedakan atas teks susastra dan teks teknis. Kedua jenis teks itu memiliki ciri khusus yang membedakannya. Sebagai sebuah teks ekspresif, teks susastra diungkapkan dengan fokus pada keindahan bentuknya. Sementara itu, teks teknis yang berciri informatif lebih menekankan pada penyampaian isi pesan yang logis. Dengan kekhasan itu, karakteristik masing-masing tetap harus dipertahankan dalam penerjemahannya.

Penerjemahan buku mengenai budaya dan sejarah Nusantara telah banyak dilakukan. Meskipun buku sejarah itu memberikan informasi tentang kehidupan masyarakat Nusantara, banyak yang ditulis dalam bahasa asing dan oleh penulis asing. Posisi mereka sebagai pengamat dari luar tidak menjadi penghalang untuk menghasilkan karya penelitian yang sangat komprehensif. Oleh karena itu, dengan menerjemahkan buku itu, kita akan mengenal secara lebih baik budaya kita sendiri dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan mampu melihat budaya kita dari

sudut pandang para peneliti luar. Hal ini juga berhasil dilakukan oleh Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul *Nusa Jawa: Silang Budaya* (2000). Dengan penerjemahan buku itu dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia, para pembaca Indonesia mudah memahami perkembangan sejarah Indonesia.

Terjemahan beranotasi adalah hasil penerjemahan yang diberi catatan atau anotasi untuk menjelaskan latar belakang pemilihan padanan, termasuk di dalamnya metode, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam penerjemahan. Anotasi ini tentu saja dapat dilakukan setelah melalui kegiatan penelusuran dokumen terkait baik untuk memperoleh data maupun untuk mendukung pengalihan makna.

Sejauh pengamatan saya, tugas akhir berupa terjemahan beranotasi, khususnya di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, sampai saat ini belum ada yang terkait langsung dengan bidang sejarah atau budaya. Tiga contoh di antaranya yang menerjemahkan teks teknis adalah Lukman (2007), Kustiantie (2007), dan Pudjiati (2009). Dalam tugas akhirnya, Lukman (2007) memberikan anotasi mengenai pemecahan masalah penerjemahan peristilahan dalam buku *Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers* yang diterjemahkannya. Sementara itu, untuk keperluan tugas akhirnya, Kustiantie (2007), dalam menerjemahkan buku *High-Tech Heretic: Reflection of a Computer Contrarian*, memberikan anotasi pada terjemahan istilah komputer, nama diri, ungkapan, dan idiom. Pudjiati (2009) yang menerjemahkan buku *7e Accounting* untuk tugas akhirnya, memberikan anotasi pada terjemahannya itu dengan fokus pada padanan yang dipilih untuk menerjemahkan istilah akuntansi, tata nama ukuran, lambang mata uang asing, nama perusahaan, ungkapan umum, tanda baca, dan laras bahasa. Anotasi di dalam ketiga tugas akhir itu pada umumnya berfokus pada penggunaan istilah khusus sesuai dengan bidang ilmu terkait yang menunjukkan kekhasan teks teknis.

Pemilihan buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* untuk diterjemahkan dilandasi oleh tiga alasan berikut.

- Pustaka tentang Toraja, khususnya yang berkaitan dengan sejarah sosial masyarakat Toraja, masih langka. Penerjemahan buku ini diharapkan akan menambah referensi menyangkut sejarah dan budaya Toraja yang tidak

hanya berguna bagi para akademisi khususnya sejarawan, namun juga masyarakat umum baik untuk sekedar menambah wawasan mereka maupun untuk mendapatkan informasi tertentu yang mungkin dapat diperoleh melalui buku ini.

- Buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People* menarik untuk diterjemahkan karena menyajikan secara lengkap dan sistematis sejarah Tana Toraja dari tahun 1860 hingga 1998 berdasarkan hasil penelitian penulisnya, Terance W. Bigalke. Karena merupakan hasil penelitian penulis TSu, buku ini sangat berbeda dari buku-buku tentang Toraja yang sudah ada sebelumnya yang lebih banyak menguraikan sisi budaya atau ritual yang biasanya ditujukan untuk keperluan pengembangan usaha pariwisata.
- Buku ini belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sementara terjemahannya potensial untuk diterbitkan menurut informasi dari penerbit buku aslinya (KITLV) dan penerbit Inninnawa Makassar yang sudah pernah berencana untuk menerjemahkan dan menerbitkannya.

1.2 Teks Sumber

Teks Sumber adalah sebuah disertasi yang telah diterbitkan sebagai buku teks bidang Sejarah. Buku yang berjudul “Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People” itu diterbitkan oleh KITLV Press (Leiden) pada tahun 2005 dengan 395 jumlah halaman.

Buku yang diterjemahkan itu terdiri dari tiga bagian utama, yakni:

- Part I: Toraja in the South Sulawesi World: 1860-1904.
- Part II: The Dutch in the Torajan World: 1905-41.
- Part III: Tana Toraja in the Indonesian World: Since 1942.

Untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal kata dalam teks yang diterjemahkan, yakni 10.000, saya memilih Bab VII atau bab terakhir dari Part II yang berjudul *Education, Organization, and Ethnic Consciousness*.

Selain informasi mengenai buku itu, bagian ini juga mencakup deskripsi penulis dan ringkasan buku.

1.2.1 Deskripsi Penulis

Penulis buku adalah Terance W. Bigalke. Penulis adalah spesialis dalam bidang sejarah modern Asia Tenggara dan Pendidikan Tinggi Internasional serta peneliti yang antara lain menghasilkan disertasi ini berkat dukungan dana dari program Fullbright. Selain sebagai peneliti dan sejarawan, Bigalke juga menjabat sebagai Direktur bidang Pendidikan pada the East-West Center di Honolulu.

Selain buku *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*, Bigalke juga menulis karya berikut ini.

- (Okt. 1984). Government and mission in the Torajan world of Ma'kale-Rantepao. *Indonesia* 38: 85–112.
- (1983). Dynamics of the Torajan slave trade in South Sulawesi dalam *Slavery, bondage and dependency in Southeast Asia*, ed. A.J. Reid. St. Lucia: University of Queensland Press. 341–63.

1.2.2 Ringkasan Buku

Seperti yang telah dikemukakan di atas, buku ini terdiri dari tiga bagian besar yang dibagi dalam Part I, II, dan III yang mencakupi sebelas bab. Berikut ini adalah ringkasan dari setiap bab.

Part I: Toraja in the Sulawesi World (1860 – 1904)

Chapter 1: Land and People

Bab ini menguraikan kondisi daerah, masyarakat, mata pencaharian, organisasi sosial, dan ritus agama di dataran tinggi Sa'dan yang dikenal sebagai habitat suku Toraja di wilayah Sulawesi Selatan.

Chapter 2: Coffee, Slaves, Arms, and Power

Bab ini menguraikan asal usul, pusat produksi, ekspansi, dan perdagangan kopi di Sulawesi Selatan; pembangunan jaringan perdagangan; Toraja dalam perdagangan budak regional; pasar; para pedagang kecil; bentuk perdagangan yang dikelola istana; peran senjata; upaya Luwu untuk menguasai perdagangan; kerja sama elite dataran rendah dan dataran tinggi; rute ke Pare-Pare: Sidenreng menentang Luwu; perebutan tanah; Pong Tiku dari Pangala'; Pong Maramba dari Rantepao; dan Puang dari selatan.

Universitas Indonesia

Part II: The Dutch in the Torajan World (1905-1941)

Chapter 3: Resisting and Receiving the Dutch

Bab ini pertama-tama menggambarkan upaya konsolidasi yang dilakukan *tondok-tondok* di Toraja untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dalam empat domain, yaitu utara, tengah, selatan, dan barat. Namun, karena persaingan antarpimpinan *tondok*, Belanda dengan mudah masuk ke Toraja dan menyita senjata yang mereka miliki untuk melumpuhkan perlawanan mereka. Perlawanan terbuka tidak begitu terasa di Ma'kale-Rantepao, kecuali di Pangala' dan Alla dengan Pong Tiku sebagai tokohnya yang akhirnya ditaklukkan Belanda pada Juni 1907.

Chapter 4: Administrative Engineering

Bab ini berisi berbagai tindakan yang dilakukan Belanda dalam pengaturan administratif di Toraja, di antaranya membagi dua *onderafdeeling* menjadi Ma'kale dan Rantepao berdasarkan pertimbangan strategis dan komersial di bawah *afdeeling* Luwu dan menetapkan batas administratifnya; memperkenalkan bentuk administratif baru secara teritorial bukan genealogis; menetapkan kebijakan yang menyangkut pembagian sawah, pembentukan kampung, dan pembangunan jalan terutama di luar Ma'kale-Rantepao; membuka kesempatan bagi kasta "kaunan" untuk menjadi *to parenge'* yang dibedakan dari *to parenge'* berkuasa; menerapkan kombinasi sistem tradisional dan modern dalam penggajian dan penetapan hari kerja; memberlakukan registrasi penduduk; memberlakukan pajak atau *sima*; serta menolak pemberlakuan pajak potong kerbau dan pemberian izin judi sabung ayam.

Chapter 5: Government and Mission in Ma'kale-Rantepao

Bab ini menguraikan upaya pemerintah Hindia Belanda dan misi Protestan dalam mengkristenkan Toraja sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang belum banyak mendapat pengaruh Islam. Upaya itu dimulai dari pengiriman misionaris A.A. van de Loosdrecht (AAVL) ke Toraja pada tahun 1913 oleh GZB untuk meletakkan dasar kekristenan. Tindakan yang dilakukan AAVL adalah menerapkan pendekatan budaya untuk transformasi agama; belajar bahasa Tae'; mendirikan sekolah; dan melakukan pendekatan pribadi kepada elite setempat.

Universitas Indonesia

Namun, karena resistensi kaum elite, AAVL bersikap kritis terhadap mereka terutama dalam hal kepemilikan tanah, pelaksanaan pesta kematian, serta praktik judi dan sabung ayam. Secara politis, misi GZB aman setelah penunjukan Brouwer sebagai *controleur* Rantepao dan Nobele sebagai Asisten Residen di Palopo. Akan tetapi, karena ada kebocoran informasi tentang hasil pertemuan Gubernur dengan para pejabat Belanda dan misionaris di Toraja, rencana pemberontakan yang telah berhembus sejak tahun 1916 berujung pada pembunuhan AAVL setelah gagal upayanya, yang melibatkan elite setempat, untuk membunuh *controleur* Brouwer.

Chapter 6: Patterns of Religious Changes

Bab ini menguraikan proses awal pengenalan agama Islam dan Kristen di Toraja pada tahun 1920, setelah beratus-ratus tahun suku Toraja bertahan dengan sejumlah kecil variasi kepercayaan dari *tondok* ke *tondok*. Kepercayaan setempat, yang diduga baru diberi nama pada akhir tahun 1950-an sebagai Aluk (kepercayaan tradisional), mengenal tiga dewa, yaitu *Puang Matua*, *deata* (roh-roh), dan para leluhur. Islam masuk ke dataran tinggi melalui peperangan, perdagangan, dan perkawinan. Sementara itu, kekristenan pertama kali masuk Toraja melalui tentara Hindia Belanda pada tahun 1906 yang kemudian beralih dari tentara ke pemerintah sipil. Perpindahan agama di Toraja lebih cepat terjadi di daerah perbatasan dan distrik “miskin”.

Chapter 7: Education, Organization, and Ethnic Consciousness

Pada tahun 1925 dan 1930-an pendidikan berperan penting dalam transformasi dataran tinggi Sa’dan yang oleh para elite modern mulai disebut sebagai Tanah Toraja. Sekolah kampung mulai memperkenalkan Tae’, bahasa Toraja baku, hasil karya seorang linguist misi. Selama dua dekade itu, suku Toraja mengganti guru berbahasa Melayu dari luar Toraja dengan kader pertama guru setempat yang disponsori oleh misi. Meskipun demikian, bahasa Melayu tetap menjadi basis pendidikan “pribumi” di Ma’kale-Rantepao. Setelah tahun 1925, elite Toraja tetap mensyaratkan pendidikan berbahasa Belanda di sekolah sambungan (*link school*), yang secara resmi hanya diperuntukkan bagi anak-anak

dari kelas atas, sehingga menghasilkan sebuah generasi berbahasa Belanda (kurang dari 300 lulusan) yang menjadi inti elite modern.

Para lulusan dari sekolah sambungan bersama-sama dengan mereka yang lulus dari sekolah lanjutan (dan kursus pelatihan guru), yang semuanya berjumlah sekitar 600 orang, membentuk sebuah kelompok dengan satu visi meninggalkan kampung masing-masing. Dengan menempuh pendidikan di kota, mereka hidup bergaul dengan lingkungan yang tidak lagi terbatas pada rumpun keluarga tertentu ataupun kampung tertentu saja. Dalam percampuran sosial itu, mereka belajar bahasa Belanda dan/atau Melayu, mulai kawin campur, mengajar, bekerja di luar kampung sendiri, serta mengenal bentuk asosiasi baru yang multietnis.

Ketika sebuah kelompok berpengaruh itu muncul di berbagai kota pada tahun 1930-an, identitas etnis Toraja mendapatkan suatu semangat baru. Semangat itu mengandung sentimen anti-Bugis yang kuat, di samping menekankan perlunya solidaritas orang Toraja. Pendirian Koperasi Persaudaraan Pribumi yang bertujuan untuk mengawasi perdagangan yang dilakukan pedagang Bugis adalah contoh paling nyata dari semangat ini. Berbagai organisasi pengembangan masyarakat juga dibentuk terutama untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada orang Toraja yang pandai untuk bersekolah. Itu merupakan langkah penting untuk menjauh dari orbit budaya Bugis yang telah diambil bersamaan dengan kedatangan Belanda pada tahun 1906.

Kaum elite modern yang muncul sebagian besar menganut Kristen; merekalah perintis asosiasi modern di Toraja. Satu-satunya organisasi yang tidak termasuk dalam kategori itu adalah Muhammadiyah yang anggotanya bukanlah orang yang berpendidikan, melainkan pedagang, orang Bugis, dan orang Toraja peranakan. Penganut Aluk tetap bertahan dengan bentuk organisasi sosial tradisional mereka dan tidak bergabung dalam asosiasi modern.

Kaum elite modern pada umumnya merupakan keturunan elite lama. Meskipun demikian, banyak yang keturunan orang dari lapisan menengah atau bawah dalam elite lama yang sudah mengenyam pendidikan. Itu artinya, pendidikan modern menjadi sarana untuk menaikkan status dalam struktur elite, dan elite menengah dan rendahlah terutama yang memanfaatkan kesempatan ini.

Di Ma'kale-Rantepao, timbul penolakan terhadap gerakan nasionalis di kalangan etnis Toraja. Pembentukan identitas etnis yang masih sangat baru ini berutang besar kepada aktivitas misi Belanda. Sebabnya, misi tidak menghalangi kesadaran identitas mereka, namun justru mendukungnya, bahkan mengangkat kesadaran akan ancaman Bugis. Karena alasan itulah kaum elite Toraja modern, seperti halnya orang Manado dan Ambon (yang berbeda dari orang Jawa dan Minangkabau), tidak menganggap Belanda sebagai musuh mereka.

Part III: Tana Toraja in the Indonesian World (Since 1942)

Chapter 8: The Japanese Occupation

Bab ini diawali dengan uraian mengenai kevakuman politis di dataran tinggi karena Belanda tiba-tiba meninggalkan Toraja setelah 36 tahun berkuasa sehingga terjadi perpecahan lokal. Bagi para pemeluk Aluk, berakhirnya pemerintahan Belanda berarti kembalinya otoritas tradisional dan perlawanan terhadap mereka yang menentang praktik agama tradisional. Sementara itu, bagi para kepala distrik, kepergian Belanda merupakan kesempatan untuk menyatakan otoritasnya melebihi apa yang ditetapkan pada masa pemerintahan Belanda. Setelah pendudukan Jepang, kondisi Toraja semakin buruk, terutama karena pemberlakuan kebijakan yang memberatkan rakyat. Pasang surut kehidupan Muslim dan Kristen saat itu ditentukan oleh siapa yang berperan dalam pemerintahan. Untuk mendukung pemerintahannya, Jepang membentuk organisasi yang sok politis baik yang bernuansa agama maupun sosial dan militer, seperti Jamiyah Islamiyah, Federasi Kristen Sulawesi, Seinendan, Heiho, dan PETA.

Chapter 9: Tana Toraja in the Indonesian Revolution

Bab ini menggambarkan kondisi Toraja tahun 1945—1949. Setelah Jepang menyerah, pamong praja di Rantepao segera mengisi kekosongan dalam pemerintahan dengan membentuk Badan Keamanan Umum (BKO) untuk mencegah kekacauan seperti yang terjadi pada saat Belanda meninggalkan Toraja. Keretakan serta upaya untuk menjembatani hubungan pemuda Muslim (Ma'kale) dengan pemuda Kristen (Rantepao) mewarnai masa awal kemerdekaan di Toraja. Perpecahan yang terjadi di Toraja memudahkan NICA kembali menduduki Toraja

Universitas Indonesia

pada Januari 1946. Dengan bantuan NICA, Toraja mendapatkan otonominya dari Luwu dan membentuk pemerintahan Tongkonan Ada' untuk mewakili Toraja dalam Hadat Luwu serta Hadat Tinggi Makassar. Rencana Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur menjadi isu sentral di Dewan Sulawesi Selatan. Di dalamnya, kedua delegasi dari Toraja secara konsisten mendukung negara kesatuan, bukan negara federal, dengan pertimbangan Toraja akan lebih aman dalam negara kesatuan. Sebaliknya, dalam negara federal, Toraja akan dengan mudah didominasi oleh orang dataran rendah di sekitarnya.

Chapter 10: Social Revolution, Regional Rebellion, and Religious Change

Bab ini menggambarkan kondisi Toraja dalam periode 1950—1965. Keadaan itu berawal dengan keluarnya Sulawesi Selatan dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan bergabung ke Republik Indonesia sebagai sebuah provinsi. Dengan berakhirnya pemerintahan Tongkonan Ada' di Toraja pada Maret 1950, dibentuklah pemerintahan darurat serta pemilihan kepala daerah. Calvijn Rongre, kepala daerah yang pertama dan berasal dari kelas sosial rendah itu melakukan banyak perubahan radikal dalam masyarakat terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah. Banyaknya kasus sengketa kepemilikan tanah pada masa itu mendorong pembentukan Panitia Urusan Tanah Sengketa (PTUS). Selama tahun 1950-an ada tiga pihak militer yang berperan di Toraja dalam berbagai pemberontakan, yakni batalion Diponegoro 422, batalion 720, dan batalion Pong Tiku. Perpindahan agama yang cukup cepat dari tahun 1950 sampai tahun 1965 tidak lepas dari peran Parkindo (Partai Kristen Indonesia), penyebaran sekolah yang dikelola YPKT, dan masuknya pengaruh Gereja Toraja sampai ke tingkat kampung.

Chapter 11: Toraja After 1965

Bab ini menggambarkan situasi politik, ekonomi, dan masyarakat di Toraja selama Orde Baru, yaitu sejak akhir tahun 1965 sampai 1999. Lahirnya Orde Baru yang memunculkan Golongan Karya dan mengurangi partai politik merupakan salah satu penyebab turunnya popularitas Parkindo di Toraja. Perubahan ekonomi mulai terjadi dengan terbukanya kesempatan kerja di luar Toraja sejak tahun 1967 dan situasi keamanan serta penerapan kebijakan baru di

bidang pertanian untuk meningkatkan produksi beras. Transfer surplus pendapatan dari para migran yang keluar dari Toraja juga berperan dalam perbaikan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi pariwisata Toraja juga mulai terlihat sejak tahun 1970-an. Perubahan sosial yang terjadi di Toraja sejak kelahiran Orde Baru adalah bangkitnya kembali aristokrasi dan Aluk serta pemikiran untuk memperjelas hubungan antara adat dan agama, khususnya oleh Gereja Toraja.

1.3 Pembaca Teks

Pembaca teks dibedakan atas pembaca sasaran TSu dan pembaca sasaran TSa. Pembaca sasaran TSu adalah para sejarawan berbahasa Inggris (khususnya ahli Asia Tenggara) dan misionaris Belanda. Sementara itu pembaca sasaran TSa adalah sejarawan dalam bidang sejarah sosial di Indonesia, khususnya mengenai Sulawesi Selatan dan Toraja. Karena cukup banyak membahas budaya Toraja dalam kaitannya dengan sejarah sosial, budayawan juga dapat menjadi salah satu pembaca potensial TSa.

Demikianlah gambaran latar belakang penulisan tugas akhir ini. Sementara itu, teori penerjemahan yang akan menjelaskan kerangka pikir serta metodologi penerjemahan dan anotasi yang akan membantu saya memahami dan sekaligus menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses penerjemahan teks ini saya uraikan pada Bab 2 terjemahan beranotasi ini.

BAB 2

KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

Peran penerjemahan sudah lama disadari oleh berbagai kalangan di berbagai bidang kehidupan. Bagaimanapun, penerjemahan telah menjadi media komunikasi lintas budaya di antara masyarakat yang berbeda bahasa dan budayanya. Dengan demikian, penerjemahan tidak hanya mampu menumbuhkan pemahaman lintas budaya antarsuku bangsa namun juga telah menjadi sarana untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Agar dapat menjalankan dengan baik fungsinya sebagai jembatan atau media komunikasi, ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebelum dan selama proses penerjemahan, yaitu pertanyaan apa, untuk apa, dan untuk siapa penerjemahan itu dilakukan.

Oleh karena itu, dalam bab ini saya akan menguraikan jenis teks; teori skopos; pengertian, metode, serta prosedur penerjemahan; penerjemahan nama diri dan nama jenis, penerjemahan ungkapan idiomatis; penerjemahan metafora dan simile; dan metodologi terjemahan beranotasi.

2.1 Jenis Teks

Pada bagian ini saya akan menguraikan secara singkat jenis teks dan secara khusus teks informatif.

Menurut Munday (2001, hlm. 73), Katharina Reiss mengembangkan konsep kesepadanan dalam tahun 1970-an dengan penekanan pada teks, bukan kata atau kalimat. Dengan meminjam tiga kategori fungsi bahasa dari Karl Bühler, secara ringkas Reiss membedakan jenis teks atas teks informatif, ekspresif, operatif, dan audiomedial. Teks Audiomedial, seperti film dan iklan visual serta bersuara, merupakan pelengkap ketiga fungsi lain dengan efek visual, musik, dll. Dalam pembahasan ini teks audiomedial itu tidak akan dibahas lebih lanjut. Tabel 2.1 berikut ini menggambarkan perbedaan di antara jenis teks yang lain.

Tabel 2.1. Karakteristik Fungsional Jenis Teks dan Kaitannya dengan Metode Penerjemahan

Tipe Teks	Informatif	Ekspresif	Operatif
Fungsi Bahasa	Informatif (merepresentasikan objek dan fakta)	Ekspresif (mengekspresikan perilaku pengirim)	Apelatif (mengimbau penerima teks)
Dimensi Bahasa	logis	estetis	dialogis
Fokus Teks	isi	bentuk	imbau
TSa seharusnya	menyampaikan isi referensial	menyampaikan bentuk estetis	memperoleh respon yang diharapkan
Metode Penerjemahan	" <i>Plain prose</i> ", memerlukan pemaparan	" <i>identifying</i> ", menggunakan perspektif pengarang TSu	" <i>Adaptive</i> ", efek padanan

Sumber: Reiss 2000, hlm. 26 (dengan adaptasi).

Dengan pembagian seperti itu, tidaklah berarti bahwa terdapat pemisahan yang sangat kaku dalam penerjemahan setiap jenis teks. Dengan kata lain, setiap teks tidak selalu hanya diklasifikasikan sebagai wujud dari salah satu jenis teks itu. Hal itu terjadi karena ada teks yang diproduksi untuk lebih dari satu fungsi, misalnya informatif sekaligus ekspresif seperti biografi, atau informatif dan operatif seperti khotbah (Munday, 2001, hlm. 74). Menurut Reiss (2000, hlm. 48-87), untuk menilai memadai tidaknya sebuah TSa, komponen intralinguistik dan determinan ekstralinguistik berikut harus diperhatikan:

- Kriteria intralinguistik yang mencakup: ciri-ciri semantis, leksikal, gramatikal, dan stilistik
- Kriteria ekstralinguistik yang mencakup: situasi, bidang topik, waktu, tempat, penerima, pengirim, dan 'implikasi afektif' (humor, ironi, emosi, dll.)

Hampir sama dengan dengan Reiss (2000), Nord (1991, hlm. 35-129) juga menguraikan faktor-faktor intratekstual dan ekstratekstual TSu yang perlu diperhatikan dalam analisis teks untuk penerjemahan, sebagai berikut:

- Faktor intratekstual, mencakup: pengirim, intensi, penerima, medium, tempat, waktu, motif, dan fungsi teks;
- Faktor ekstratekstual, mencakup: bidang kajian (subject matter), konten, praanggapan, komposisi, elemen nonverbal, leksis, struktur kalimat, dan fitur suprasegmental.

Baik Reiss (2000) maupun Nord (1991) menekankan perlunya analisis terhadap unsur-unsur di luar bahasa dalam penerjemahan. Dalam hal ini keduanya telah menggeser teori penerjemahan dari tataran kebahasaan yang lebih rendah (hanya mengenai kata-kata) ke arah penggunaan tujuan komunikatif penerjemahan. Dengan demikian kelayakan TSA dapat dilihat dari tersampainya pesan kepada pembaca TSA sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis TSu. Cukup banyak jenis tulisan yang dapat dikategorikan sebagai tulisan informatif sebagaimana yang terdapat dalam daftar Ken Goddard (1995, hlm. xi): berbagai tulisan singkat, seperti memo, *curriculum vitae*, surat resmi, faksimile, surel, leaflet, brosur, dan selebaran. Tulisan informatif juga dapat berupa dokumen: surat perjanjian, laporan (laboratorium, medis, teknis, bisnis, pemerintahan, dll.), proposal, dokumen kontrak dan perjanjian, asuransi, naskah untuk video atau multimedia untuk pendidikan, esai akademis, disertasi, tesis, dan paper penelitian, serta berbagai bentuk karya tulis siswa. Selain itu, teks informatif juga dapat berupa buku teks atau buku pelajaran, manual, buku panduan, ensiklopedia, kamus, dan semua bahan yang dikategorikan nonfiksi oleh toko buku atau perpustakaan.

Disertasi, seperti yang disebutkan di atas, merupakan salah satu bentuk tulisan informatif yang memiliki kekhasan baik dari segi bentuk, isi, pembaca sasaran, laras, serta ragam bahasa yang digunakan. Teks pilihan untuk tugas akhir ini merupakan sebuah disertasi sejarah yang, oleh Brotowidjoyo (1993, hlm. 15), diistilahkan dengan karya ilmiah spesifik historis. Karya ilmiah demikian, menurut Brotowidjoyo, memiliki ciri: “seluruhnya informatif, berdasar sumber sejarah, tanpa ajakan emosional, tidak mengejar keuntungan pribadi, tulus, tidak memuat penilaian, konkret dan spesifik, semiteknis, bahasa dan susunannya diatur secara formal.” Terdapat empat jenis teks informatif dilihat dari segi gaya bahasanya (Newmark, 1988, hlm. 40), yakni

- (1) makalah akademik, yang menggunakan gaya resmi dan tak beremosi, sering menggunakan kalimat pasif dengan kala kini dalam bahasa Inggris, dan tanpa metafora;
- (2) buku teks, yang menggunakan gaya netral dan/atau informal dengan menggunakan kata ganti saya/kita untuk menunjukkan keterlibatan penulis dalam teks;
- (3) tulisan ilmiah populer, yang menggunakan gaya informal dan ramah dengan struktur gramatikal sederhana, kosa kata yang luas tetapi sederhana untuk menunjang definisi dan ilustrasi, serta penggunaan metafora tertentu; dan
- (4) tulisan jurnalistik populer, dengan menggunakan gaya akrab, nonteknis, populer, kalimat pendek, dan tanda baca yang tidak konvensional.

TSu pada tugas akhir ini merupakan karya akademik dengan ciri-ciri seperti di atas. Walaupun demikian, teks ini sebenarnya tidak lagi murni tampil sebagai disertasi atau karya ilmiah karena sudah diterbitkan dalam bentuk buku sejarah. Oleh karena itu bentuk dan isinya sudah lebih disesuaikan dengan format buku teks pada umumnya.

2.2 Teori Skopos

Istilah *skopos* berasal dari bahasa Yunani yang berarti tujuan atau sasaran yang. *Skopos* diperkenalkan dalam teori penerjemahan pada tahun 1970-an oleh Hans J. Vermeer sebagai sebuah istilah teknis untuk penerjemahan dan tindakan penerjemahan (Munday, 2001 dan Venuti, 2004). Penerjemahan sebagaimana semua tindakan yang dilakukan pastilah memiliki tujuan, demikian pula dengan tindakan penerjemahan. Menurut Vermeer (Venuti, 2004, hlm. 227), semua tindakan mengarah pada sebuah hasil, sebuah situasi atau peristiwa baru, dan mungkin pada sebuah objek yang “baru” pula. Jika tindakan penerjemahan menghasilkan sebuah “teks sasaran”, maka penerjemahan menghasilkan sebuah *translatum*, teks sasaran dengan variasi tertentu.

Teori skopos menurut Munday (2001, hlm. 79) berfokus pada tujuan penerjemahan, yang menentukan metode dan strategi penerjemahan yang akan digunakan untuk menghasilkan terjemahan yang layak secara fungsional. Oleh karena itu, dalam teori skopos, mengetahui mengapa sebuah TSu diterjemahkan

dan apa fungsi dari TSa penting bagi penerjemah. Penentuan tujuan penerjemahan itu dirumuskan dalam *commission*, atau *brief* (Hatim & Mason, 1997, hlm. 11), sesuai permintaan *commissioner*. Menentukan tujuan (*skopos*) TSa adalah langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis TSu untuk selanjutnya mentransfer dan akhirnya melakukan sintesis untuk menghasilkan sebuah TSa (Nord, 1991). Dengan skopos yang jelas, dapat ditentukan metode dan strategi penerjemahan yang akan digunakan untuk menghasilkan terjemahan yang layak secara fungsional.

Vermeer (Venuti, 2004) menekankan bahwa TSu sebagaimana tersirat dari namanya berorientasi pada budaya BSu sedangkan TSa berorientasi pada budaya BSa. Dengan latar belakang tersebut, skopos dari TSu bisa saja sama dengan TSa (*translatum*), tetapi juga bisa berbeda. Karena alasan itulah, Vermeer (dalam Venuti, 2004) menyatakan bahwa meskipun *skopos* dari TSa (*translatum*) sama dengan TSu-nya, proses penerjemahan tidak mungkin semata-mata merupakan tindakan *alih-sandi*. Agar *skopos* dari TSa terpenuhi, Nord (dalam Munday, 2001, hlm. 82) menyarankan beberapa hal berikut untuk dicantumkan dalam *commission* 'pesanan', yaitu fungsi teks dimaksud; *addressers* (pengirim dan penerima); waktu dan tempat resepsi teks; medium (tuturan dan tulisan); serta motif (alasan TSu ditulis dan diterjemahkan).

Secara ringkas, Munday (2001, hlm. 80) mengungkapkan bahwa manfaat penting dari teori skopos adalah bahwa teori ini membuka kemungkinan bagi teks yang sama untuk diterjemahkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuan TSa dan pesanan yang diberikan kepada penerjemah.

TSu merupakan hasil penelitian untuk disertasi yang walaupun menyangkut sejarah dan budaya Toraja, ditujukan kepada sejarawan berbahasa Inggris di Amerika Serikat, tempat penulis TSu mengambil gelar doktornya. Pada sisi lain, TSa ditujukan kepada pembaca sasaran, sejarawan, penutur bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia, Sulawesi Selatan, dan terutama di Toraja. Walaupun pembaca TSu dan Tsa memiliki kesamaan profesi dan minat, mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda serta di tempat dan waktu yang berbeda pula. Perbedaan itu secara otomatis menyebabkan perbedaan *skopos* dari TSu dan TSa.

2.3 Penerjemahan

Pada bagian ini akan diuraikan pengertian, metode, dan prosedur penerjemahan.

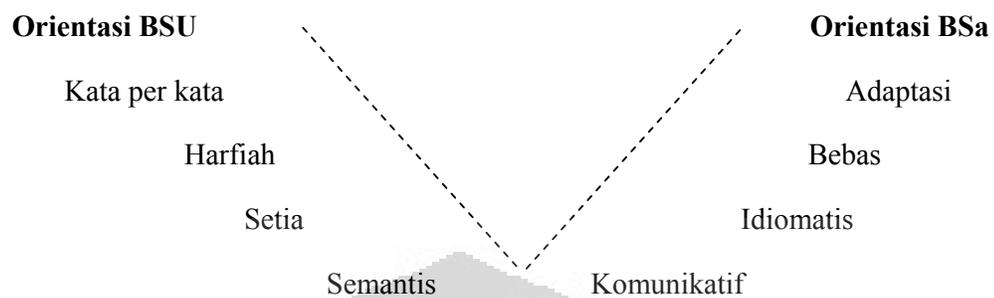
2.3.1 Pengertian Penerjemahan

Newmark (1988, hlm. 5) mendefinisikan penerjemahan sebagai pengalihan makna, dari sebuah teks yang ditulis dalam bahasa tertentu ke dalam bahasa yang lain, sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis TSu. Sementara itu, Hoed (2006, hlm. 28) melihat penerjemahan sebagai upaya untuk mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam teks suatu bahasa atau teks sumber (TSu) ke dalam bentuk teks dalam bahasa lain atau teks sasaran (TSa). Nida & Taber (1974, hlm. 12) tidak secara jelas memberikan definisi mengenai penerjemahan, tetapi mereka menganggap tujuan penerjemahan adalah “reproducing the message”.

Pada dasarnya ketiga definisi di atas mengemukakan adanya kegiatan pengalihan makna atau pesan sebuah teks dari satu bahasa ke bahasa lain sesuai dengan maksud penulis TSu. Meskipun Newmark menggunakan kata *meaning* ‘makna’ bukan *message* ‘pesan’, tetapi penjelasan ‘sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis TSu’ itu memperjelas bahwa yang dimaksudkan bukanlah sekadar makna tetapi pesan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu bentuk bisa saja diubah sesuai dengan keberterimaan di lingkungan pembaca TSa.

2.3.2 Metode Penerjemahan

Metode Penerjemahan, menurut Newmark (1988, hlm. 81), berkaitan dengan penerjemahan teks secara keseluruhan. Newmark memperkenalkan delapan metode penerjemahan yang ditata dalam bentuk diagram V dengan dua orientasi yakni Bahasa Sumber (BSu) dan Bahasa Sasaran (BSa) sebagai berikut:



Gambar 2.1: Diagram V
Gambar: Newmark, 1988, hlm 45

Dari diagram tersebut terlihat bahwa metode penerjemahan kata per kata, harfiah, setia, dan semantis lebih berorientasi pada BSu sedangkan metode penerjemahan dengan adaptasi, bebas, idiomatis, dan komunikatif lebih berorientasi pada BSA. Posisi metode penerjemahan semantis dan komunikatif yang sangat dekat menunjukkan adanya kemiripan di antara keduanya. Newmark (1988, hlm. 47) menganggap hanya kedua metode itulah yang paling sesuai dengan tujuan penerjemahan yaitu tepat dan hemat. Walaupun memiliki unsur kesamaan, penerjemahan semantis dan komunikatif tetaplah memiliki sejumlah perbedaan. Penerjemahan semantis menurut Newmark (1988) bersifat personal dan individual, mengikuti alur berpikir penulis TSu, cenderung diterjemahkan secara berlebihan, mengutamakan nuansa makna, sekalipun demikian bertujuan untuk menghasilkan efek pragmatis. Pada sisi lain, penerjemahan komunikatif dianggap bersifat sosial, fokus pada pesan dan kekuatan utama teks, cenderung menyederhanakan terjemahan, singkat dan jelas, serta selalu ditulis dengan alami. Oleh karena itulah, bagi Newmark metode penerjemahan semantis lebih sesuai diterapkan pada jenis teks ekspresif, sedangkan metode penerjemahan komunikatif dianggap lebih sesuai untuk jenis teks informatif dan vokatif.

Metode komunikatif pada hakekatnya lebih menekankan pada pengalihan pesan dari TSu ke dalam Tsa yang konten dan bahasanya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca Tsa. Dalam hal ini penerjemah harus memahami kebudayaan BSu yang melatari TSu dan kebudayaan BSA yang melatari Tsa sebagaimana yang ditekankan oleh Hoed (2006, hlm. 79). Oleh

karena itu, penerjemah harus memperhatikan norma, budaya, latar dan tradisi berbahasa baik pada sisi TSu maupun pada TSa (Newmark, 1991, hlm. 31). Asumsi dasar model Organon dari Karl Bühler (Renkema 2004, hlm. 11) adalah bahwa bahasa sebagai alat untuk penyampaian maksud tidak dapat dipisahkan dari pembicara dan pendengar, atau penulis dan pembaca. Lebih dalam dari itu Otto Jespersen (dalam Renkema, 2004, hlm. 12) bahkan menegaskan bahwa esensi bahasa adalah aktivitas manusia untuk dapat saling memahami posisi dan pikiran masing-masing pihak. Peran penerjemah sebagai mediator atau komunikator antara TSu dan TSa atau antara penulis TSu dan pembaca atau penerima TSa dengan demikian harus memahami dengan baik posisi kedua belah pihak. Dengan orientasi pada pembaca TSa, penerjemahan teks teknis dapat dilakukan dengan menggunakan metode komunikatif (Newmark, 1988 dan Hoed, 2006) yang sedapat mungkin memenuhi kewajiban dalam BSA sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca TSa. Metode komunikatif itulah yang digunakan dalam penerjemahan TSu.

2.3.3 Prosedur Penerjemahan

Prosedur penerjemahan oleh Newmark (1988, hlm. 81) didefinisikan sebagai “kegiatan penerjemahan pada tataran kalimat atau satuan bahasa yang lebih kecil”. Sementara itu, Benny H. Hoed (2006, hlm. 72) menyebut cara penanggulangan kesulitan dalam menerjemahkan pada tataran kata, kalimat, atau paragraf sebagai teknik penerjemahan. Dalam hal ini tampak perbedaan istilah untuk dua hal yang sama paling tidak pada tataran penerjemahannya yaitu pada satuan bahasa yang lebih kecil. Sementara itu, Vinay & Darbelnet (dalam Hatim & Munday, 2004, hlm. 148-151) juga menggunakan istilah prosedur untuk maksud yang sama walaupun berbeda dalam hal istilah dan jumlah atau jenis prosedur yang ditawarkan.

Peter Newmark (1988, hlm. 81-93) memaparkan sejumlah prosedur berikut yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam penerjemahan, yakni: prosedur penerjemahan harfiah, transferensi, pergeseran atau transposisi, naturalisasi, pemadanan, padanan budaya, padanan fungsional, padanan deskriptif, adaptasi, penerjemahan langsung ‘through-translation’, modulasi, penerjemahan

resmi, parafrasa, pemberian catatan, sinonimi, penerjemahan label, pemberian kompensasi, analisis komponen, reduksi dan ekspansi, serta kuplet. Selain prosedur tersebut, Newmark (1988) juga menyajikan dua prosedur lain yaitu prosedur penerjemahan metafora dan metabahasa. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa prosedur penerjemahan yang digunakan dalam mengatasi kendala penerjemahan TSu.

(1) Transferensi, yaitu penggunaan kata BSu dalam TSa sebagai kata pinjaman karena tidak menemukan padanan yang tepat dari unsur BSu dalam BSa. Prosedur penerjemahan dengan cara itu oleh Vinay & Darbelnet (Hatim & Munday, 2004) disebut *borrowing*, sedangkan Hoed (2006) menyebutnya *tidak diberikan padanan*.

(2) Naturalisasi, yaitu mengadaptasi kata BSu ke BSa melalui penyesuaian bunyi dan ejaan sehingga tampak wajar secara fonologis dan morfologis di BSa.

(3) Penerjemahan Resmi/Baku, digunakan untuk menerjemahkan sejumlah istilah, nama, dan ungkapan yang sudah baku atau resmi dalam BSa.

(4) Parafrasa, penjelasan makna dari sebuah segmen teks.

(5) Informasi tambahan atau yang sejenis dengan penjelasan Tambahan (*contextual conditioning*) dari Vinay & Darblenet, yakni prosedur penerjemahan dengan pemberian penjelasan (atau kata) tambahan pada istilah tertentu yang masih dianggap asing oleh pembaca TSa agar lebih mudah dipahami. Informasi tambahan itu berupa catatan kaki, keterangan, atau glosarium yang dapat diletakkan di dalam teks; atau sebagai catatan di pinggir bawah halaman; atau catatan di akhir bab; atau sebagai catatan pada daftar istilah di bagian akhir buku.

(6) Penghilangan (Baker, 2011, hlm. 42), yakni peniadaan kata atau ungkapan yang dianggap tidak berpengaruh besar dalam sebuah teks atau bagian kalimat yang diterjemahkan karena pertimbangan tertentu, misalnya agar pembaca tidak merasa terganggu dengan penjelasan yang cukup panjang.

(7) Kuplet, menggabungkan dua, tiga, atau empat prosedur untuk menyelesaikan satu masalah. Hal itu biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata-kata budaya yang menggabungkan prosedur transferensi dengan padanan fungsional atau budaya.

Karena terdapat beberapa ungkapan idiomatis, metafora dan simile dalam teks pilihan, saya pun menggunakan prosedur penerjemahan ungkapan idiomatis, metafora, dan simile dalam menerjemahkan TSu.

2.4 Penerjemahan Teknis

Uraian mengenai penerjemahan teknis tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai istilah. Oleh karena itu, bagian ini akan diawali dengan ulasan singkat mengenai konsep istilah itu.

2.4.1 Istilah

Dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah (2005, hlm.1), istilah didefinisikan sebagai “kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu”. Berdasarkan definisi itu, istilah dibedakan atas istilah khusus dan umum. Istilah khusus diartikan sebagai istilah yang pemakaiannya, dan/atau maknanya terbatas pada bidang tertentu, sedangkan istilah umum dianggap sebagai istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum”. Istilah dalam bahasa Indonesia menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah (2005) dapat bersumber dari: 1) kosakata bahasa Indonesia; 2) kosakata bahasa serumpun; dan 3) kosakata bahasa asing. Kosakata bahasa serumpun dapat digunakan apabila tidak ditemukan istilah dalam bahasa Indonesia yang dengan tepat dapat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan. Sementara itu kosakata bahasa asing dapat digunakan baik dengan jalan menerjemahkan, menyerap, atau menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing apabila tidak ditemukan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia dan bahasa serumpun untuk mengacu pada istilah dimaksud.

2.4.2 Teks Teknis

Newmark (1988, hlm 153-154) membedakan istilah teknis dengan istilah deskriptif. Istilah teknis pada dasarnya dianggap sebagai bahasa yang distandardisasi dengan cakupan makna yang lebih sempit sedangkan istilah deskriptif dianggap sebagai bahasa yang tidak distandardisasi sehingga sifatnya lebih umum dan luas pemakaiannya.

Akan tetapi, di antara kedua kutub ini Newmark juga menyebutkan adanya *semi-technical term* ‘istilah semiteknis’ untuk menjelaskan istilah deskriptif secara lebih teknis. Newmark (1988) juga menyebutkan bahwa para penerjemah profesional pada dasarnya berusaha menggunakan istilah teknis dan menghindari pemakaian istilah deskriptif. Akan tetapi, istilah deskriptif terpaksa digunakan untuk sesuatu yang bersifat teknis karena alasan: (1) objek yang diterjemahkan baru sehingga belum memiliki sebutan; (2) untuk menghindari pengulangan; (3) untuk membedakan satu istilah dengan istilah lain.

Walaupun bersifat khas dan teknis, tulisan atau karya ilmiah mengenai sejarah, bagaimanapun, juga tetap menggunakan banyak istilah umum atau deskriptif. Mungkin karena alasan itulah Brotowidjoyo, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mengategorikan karya ilmiah spesifik historis itu sebagai semiteknis. Meskipun demikian, untuk terjemahan beranotasi ini, saya tetap menempatkan TSu sebagai teks teknis sebagaimana karya ilmiah pada umumnya.

Bagaimana makna dari sebuah teks dialihkan dengan baik sangat dipengaruhi oleh jenis teks itu. Teks informatif pada umumnya menggunakan istilah teknis (terminologi khusus) yang merupakan salah satu ciri utama dari teks teknis, selain penggunaan daftar acuan, kutipan, dan struktur kalimat yang akademis (Newmark, 1988; Nord, 1991). Oleh karena itu, menurut Williams & Chesterman (2002) seorang penerjemah teks teknis perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai subjek bidang yang diterjemahkannya serta penguasaan terminologi yang relevan untuk dapat menghasilkan terjemahan yang baik. Walaupun demikian menurut Durieux (1990), penerjemahan teknis bukan sekedar pengalihsandian istilah-istilah teknik, melainkan merupakan kegiatan yang didominasi oleh masalah yang berhubungan dengan konsep atau terminologi sehingga diperlukan pemahaman konteks dan penelitian dokumentasi yang cukup untuk dapat memahami wacana itu.

Technical writing ‘teks teknis’ menurut Miles, Bush, & Kaplan (1982, hlm. 3-4) berisi informasi mengenai subjek teknis yang dapat berupa tulisan dalam bidang bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan artikel. Ciri-ciri tulisan teknis adalah sebagai berikut:

- (1) Bertujuan untuk menginformasikan, bukan untuk menghibur atau mempengaruhi;
- (2) Akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya;
- (3) Sangat detil, spesifik dan konkret. Mengungkapkan fakta bukan pendapat, penilaian, atau perasaan;
- (4) Sangat jelas, masuk akal, dan mudah diikuti. Seharusnya memiliki interpretasi tunggal;
- (5) Beberapa sering menggunakan kalimat yang panjang untuk menjelaskan;
- (6) Lugas, tanpa basa-basi;
- (7) Biasanya menggunakan ilustrasi, seperti gambar, grafik, dan diagram;

Oleh karena itu Miles, Bush, & Kaplan (1982, hlm. 4) menganggap teks teknis sebagai teks informatif yang paling objektif bila dibandingkan dengan bentuk teks informatif lainnya.

Dengan demikian, dalam menerjemahkan teks teknis sebagai salah satu jenis teks informatif yang menggunakan terminologi dan format khusus, penerjemah harus dapat memahami konteks dan konsep yang tepat agar dapat mengalihkan pesan dari TSu ke TSa dengan baik.

2.5 Penerjemahan Kata budaya

Newmark (1988, hlm. 94) membedakan istilah bahasa budaya, universal, dan personal. Tidak seperti bahasa universal, bahasa budaya dan bahasa personal (idiolek), pada umumnya menimbulkan masalah dalam penerjemahan. Bahasa atau kata budaya khususnya, biasanya terkait dengan fenomena alam dalam suatu budaya tertentu, sehingga meskipun relatif mudah dikenali kata itu tidak dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang berbeda latar belakang budayanya. Newmark mengategorikan kata budaya atas kata budaya yang terkait dengan ekologi; artefak, yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal dan kota, alat transportasi; budaya masyarakat; organisasi, kebiasaan, akitivitas, prosedur, dan konsep dalam bidang politik dan administrasi, religi, serta seni; dan bahasa tubuh. Karena merupakan buku yang mengulas sejarah masyarakat Toraja, TSu cukup banyak mencantumkan kata budaya baik yang berupa nama diri maupun nama jenis yang khas baik dalam bahasa Toraja maupun bahasa Belanda. Dalam kamus Linguistik, Kridalaksana (2008) mendefinisikan nama diri sebagai nama orang, tempat, atau benda tertentu yang biasanya dipertentangkan dengan nama jenis (lihat juga Diana Hacker, 1995). Hal senada juga diungkapkan

Newmark (1988, hlm. 214-216) yang membedakan tiga kategori nama diri yakni, nama orang, nama objek, dan istilah geografis. Sementara itu, dalam buku Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing yang disunting oleh Sugono (2003, hlm. 5), nama diri diartikan sebagai nama khas orang, tempat, negeri, bulan, hari, hari raya, majalah, dan sebagainya.

Nama diri yang menurut Hacker (1995) biasanya ditulis dengan huruf kapital mencakup: sebutan untuk Tuhan, agama, penganut agama, kitab suci; istilah kekerabatan yang dipakai sebagai nama; tempat tertentu; kebangsaan dan bahasanya, ras, suku; lembaga pendidikan, departemen, gelar, mata pelajaran khusus; departemen dalam pemerintahan, organisasi, partai politik; gerakan, periode, peristiwa, dan dokumen historis.

Menurut Newmark, nama yang mengacu pada orang pada umumnya tidak diterjemahkan dengan pengecualian dalam beberapa hal, misalnya nama santo/santa, nama raja yang sudah dikenal, dan nama yang memiliki konotasi dalam karya fiksi biasanya diterjemahkan, sedangkan nama tokoh klasik terkemuka biasanya dinaturalisasi di bahasa-bahasa Eropa. Sementara itu, nama diri yang terkait dengan objek seperti merek dagang biasanya tidak diberi padanan. Istilah geografis pada umumnya juga tidak diberi padanan dan disebut sesuai dengan nama yang dipakai oleh negara yang bersangkutan. Hal yang sama juga berlaku untuk toponimi sebagai nama diri bukan jenis.

Dalam penulisan nama diri, sering kali terdapat kesulitan terkait dengan tiga hal menurut Guth (1969), yakni: (1) pada beberapa kata, nama diri seringkali tidak diperhatikan sehingga ditulis dengan huruf kecil; (2) kata yang sama selain dapat dikategorikan sebagai istilah umum, namun juga dapat merupakan nama diri untuk orang, lembaga, atau tempat; (3) istilah umum untuk gelar, hubungan kekerabatan, lembaga, atau ciri geografis ditulis dengan huruf besar apabila dikombinasikan dengan nama diri.

Terdapat cukup banyak nama diri dalam TSu diantaranya yang menyangkut nama orang, nama tempat, atau wilayah geografis, nama bahasa, nama suku bangsa, nama lembaga pendidikan, departemen, organisasi, partai politik, peristiwa sejarah, nama penerbitan, dokumen historis, agama, penganut agama, dan lain sebagainya. Sebagian besar nama diri dalam TSu itu bukan

merupakan kata BSu ataupun BSa yang oleh Newmark (1988) dikategorikan sebagai “unfindable words” yakni kata atau istilah dari bahasa lain yang digunakan penulis dalam TSu.

2.6 Penerjemahan Ungkapan Idiomatis

Ungkapan menurut Abdul Chaer (1997) adalah “kata atau gabungan kata yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk menyatakan suatu hal, maksud, kejadian, atau sifat secara tidak langsung.” Secara lebih spesifik, Hurford, Heasley, & Smith (2007) mendefinisikan ungkapan idiomatis sebagai: “multi-word phrases whose overall meanings are idiosyncratic and largely unpredictable, reflecting speaker meanings that are not derivable by combining the literal senses of the individual words in each phrase according to the regular semantic rules of the language....” Oleh karena itu, menurut Abdul Chaer (1997) makna dari ungkapan tidak dapat secara langsung ditarik dari makna leksikal atau gramatikal kata atau gabungan kata itu melainkan menurut makna lain yang masih memiliki hubungan asosiasi dengan makna leksikal kata itu.

Dalam penerjemahan, ungkapan idiomatis dapat ditemukan baik dalam TSu maupun TSa sebagai sebuah bentuk penyesuaian (Nida dan Taber, 1974, hlm. 106), yakni: (1) dari idiom BSu menjadi nonidiom BSa; (2) dari idiom BSu menjadi idiom BSa; atau (3) dari nonidiom BSu menjadi idiom BSa. Dalam kondisi normal, ungkapan idiomatis memiliki pola yang sudah paten (beku) atau tidak variatif serta tidak dapat diartikan secara terpisah lepas dari komponen lainnya, namun bukan hal yang mudah untuk menerjemahkannya. Hal itu menurut Baker (2011, hlm. 68) disebabkan oleh dua hal, yakni kesulitan dalam mengidentifikasi dan menginterpretasi idiom dan ungkapan dalam sebuah teks dan kesulitan untuk menerjemahkan berbagai aspek makna yang ingin disampaikan melalui idiom atau ungkapan itu ke dalam BSa. Dengan kondisi itu, Baker (2011) menawarkan enam strategi untuk menerjemahkan idiom, yakni: (1) dengan menggunakan idiom di BSa yang memiliki kemiripan makna dan bentuk; (2) dengan menggunakan idiom di BSa yang memiliki kemiripan makna walaupun berbeda bentuknya; (3) dengan meminjam idiom dari BSu; (4) menerjemahkan dengan parafrasa; (5) menerjemahkan dengan penghilangan kesan idiomatisnya

atau hanya menggunakan makna harafiah idiom; dan (6) menerjemahkan dengan meniadakan seluruh idiom dalam TSa.

Untuk menerjemahkan ungkapan idiomatis dalam TSu, saya menggunakan strategi penerjemahan dengan menggunakan idiom yang sepadan dalam BSa serta strategi penerjemahan dengan parafrasa.

2.7 Penerjemahan Metafora dan Simile

Longman Dictionary of Contemporary English (2001) mendefinisikan metafora sebagai “a way of describing something by comparing it to something else that has similar qualities, without using the words ‘like’ or ‘as’” dan simile sebagai “an expression that describes something by comparing it with something else, using the words ‘as’ or ‘like’.

Dari definisi tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya metafora dan simile itu sama, yaitu merupakan majas perbandingan yang berbeda hanya dalam bentuk atau penggunaan kata tertentu seperti: *seperti*, *bagaikan*, *ibarat*, *bak*, *sebagai*, *umpama*, *laksana*, dan *serupa* penanda simile (lihat Larson, 1989). Walaupun metafora tidak menggunakan kata-kata seperti *bagaikan*, *seperti*, dll., namun metafora dapat ditulis kembali sebagai simile dengan menggunakan kata-kata penanda simile itu karena baik metafora maupun simile biasanya memperbandingkan kesamaan dua hal.

Sementara itu, Hurford, Heasley, & Smith (2007) mendefinisikan metafora sebagai “Conceptual (mental) operations reflected in human language that enables speakers to structure and construe abstract areas of knowledge and experience in more concrete experiential terms....” Dengan demikian penggunaan metafora tidak semata-mata merupakan perbandingan dua hal yang memiliki persamaan ciri atau kualitas melainkan lebih dari itu metafora dapat membantu pengguna bahasa untuk mengkonkretkan konsep dan pengalaman yang ada di dalam pikirannya melalui bahasa yang metaforis.

Menurut Lakoff & Johnson (1980, hlm. 3), “metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature.” Dengan sifatnya yang mudah menyebar dalam pikiran

dan tindakan itulah maka sistem konseptual kita sebenarnya pada hakekatnya metaforis. Karena alasan itu, Newmark (1988, hlm. 307) akhirnya menerima sifat universal metafora walaupun menurutnya secara teoretis metafora sebenarnya dianggap tepat digunakan hanya pada teks informatif yang berupa karya jurnalistik dan populer.

Newmark (1988, hlm. 106-113) membedakan enam jenis metafora, yakni metafora beku, klise, baku, teradaptasi, mutakhir, dan asli dengan pengertian sebagai berikut:

- Metafora beku (*dead metaphors*) merupakan metafora yang citranya hampir tidak dikenali dan sering kali berhubungan dengan istilah universal ruang dan waktu, bagian tubuh, ciri ekologis umum, dan aktivitas utama manusia.
- Metafora klise digunakan untuk meniru suatu ide sering secara emotif, walaupun keadaannya berbeda.
- Metafora standar merupakan metafora yang sudah menetap yang dalam konteks informal tepat digunakan pada situasi fisik dan/atau mental baik secara referensial maupun praktis. Metafora standar kadang-kadang dapat diterjemahkan dengan metafora (atau mengubahnya menjadi simile), dan memberikan maknanya.
- Metafora standar teradaptasi sedapat mungkin diterjemahkan dengan metafora teradaptasi yang sepadan bila memungkinkan supaya maknanya dapat dipahami dengan baik.
- Metafora mutakhir merupakan metafora baru yang sering kali tidak diketahui penciptanya namun cepat menyebar dalam BSu.
- Metafora asli adalah metafora yang dibuat sendiri oleh penulis TSu. Pada teks informatif, metafora dapat diterjemahkan dengan berbagai prosedur penerjemahan tergantung pada makna atau citra yang ingin ditekankan oleh penerjemah.

Ada sejumlah alasan menurut Larson (1989), mengapa metafora sulit diartikan dan tidak dapat diterjemahkan secara harfiah, diantaranya: (1) citra yang digunakan dalam metafora atau simile mungkin tidak dikenal dalam bahasa sasaran; (2) topik metafora tidak jelas; (3) titik kemiripannya implisit dan sulit dikenal; (4) titik kemiripan dapat ditafsirkan berbeda dalam budaya yang berbeda;

(5) citra yang sama bisa memiliki makna yang berbeda; (6) BSa tidak memiliki perbandingan yang sama dengan metafora yang digunakan TSu; (7) Tiap bahasa berbeda dalam frekuensi pemakaian metafora dan cara menciptakannya.

Oleh karena itu, Larson (1989, hlm. 267) secara singkat menawarkan lima cara untuk menerjemahkan metafora (simile dapat diterjemahkan dengan cara 3, 4, dan 5).

1. Metafora dapat dipertahankan, jika kedengarannya wajar dan jelas bagi pembacanya;
2. Metafora dapat diterjemahkan sebagai simile, yaitu dengan menambahkan kata *seperti, bagai, bagaikan*, dll.;
3. Metafora bahasa sumber dapat digantikan dengan metafora bahasa sasaran yang mempunyai makna yang sama;
4. Metafora dapat dipertahankan dengan menerangkan maknanya atau menambahkan topik dan/atau titik kemiripannya; dan
5. Makna metafora dapat dijelaskan tanpa menggunakan citra metaforisnya.

Sementara itu Machali (2009, hlm. 122) mengajukan dua teknik yang dapat digunakan untuk menerjemahkan metafora, yakni dengan menggunakan penggambaran metaforik yang sepadan dalam bahasa Indonesia atau dengan menggunakan teknik pemadanan fungsional dengan metode semantis atau komunikatif. Dalam menerjemahkan metafora pada TSu, saya berusaha menerjemahkannya ke BSa menjadi metafora dalam TSa. Selain itu ada juga metafora BSu yang saya ubah menjadi simile pada TSa untuk mempertahankan makna perbandingan yang ingin disampaikan penulis TSu.

2.8 Metodologi Terjemahan Beranotasi

Bagian ini menguraikan langkah penerjemahan dan anotasi yang saya tempuh dalam penyusunan tugas akhir ini.

2.8.1 Metodologi Penerjemahan

Dengan merujuk pada Larson (1984), saya melakukan penerjemahan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1) Persiapan, yaitu dengan membaca teks secara keseluruhan untuk memahami TSu secara utuh dan menangkap gaya bahasa penulis serta mempelajari latar belakang teks dan penulisnya.

2) Analisis, yaitu dengan mencermati kata kunci untuk mendapatkan padanan leksikal yang baik dalam BSa serta dengan merujuk pada alat kerja berikut ini.

- a) Chaer, Abdul. (1997). *Kamus ungkapan bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- b) Dagun, Save. M. (2000). *Kamus besar ilmu pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- c) Echols, John M. & Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- d) Hornby, A.S. (1987). *Oxford advanced learner's dictionary of current English*. Oxford: Oxford University Press.
- e) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- f) Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- g) *Longman dictionary of contemporary English*. Third Edition with New Words supplement. (2001). Harlow Essex: Pearson Educated Limited.
- h) Pusposaputro, Sarwono. (Penyunting). (1994). *Kamus Peribahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- i) Salim, Peter. (2000). *Salim's ninth collegiate English-Indonesian dictionary*. (Edisi Pertama). Jakarta: Modern English Press.
- j) Salim, Peter & Salim, Yenny. (2002). *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*. (Edisi Ketiga). Jakarta: Modern English Press.
- k) *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. (2009). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- l) *The new shorter Oxford English dictionary*. Thumb Index Edition. The New Authority on the English Language. (1993). New York: Oxford University Press.

Selain merujuk pada sumber tersebut, saya juga mengunjungi laman daring berikut.

- a) Dictionary. (t.t). 8 November 2010. <http://dictionary.com>.
- b) Wikipedia. (t.t). “Landscape”. 7 Januari 2011. <http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape>.
- c) Wikipedia. (t.t). “Sejarah Tanah Luwu”. 3 Januari 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tanah_Luwu
- d) Wikipedia. (t.t). “Afdeling”. 30 Desember 2011. <http://id.wikipedia.org/wiki/Afdeling>.
- e) Wikipedia. (t.t) “Onderafdeling”. 17 Nov 2011. <http://id.wikipedia.org/wiki/Onderafdeling>.
- f) Wikipedia. (t.t). “Landscape”. 7 Januari 2011. <http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape>.
- g) Hrsolidarity. (t.t). 23 Mei 2011. <http://www.hrsolidarity.net/mainfile.php/1999vol09no06/1018/>.
- h) Wikipedia. (t.t). “Misionaris”. 28 Desember 2011. <http://id.wikipedia.org/wiki/Misionaris>.
- i) Coinmil. (t.t). “NLG Calculator”. 4 November 2011. <http://coinmill.com/NLG-calculator.html#NLG=1>.
- j) Wikipedia. (t.t). “Volksraad”. 30 Desember 2011. <http://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad>.
- k) Serbasejarah. Wordpress. (t.t). “Volksraad” 30 Desember 2011. <http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/03/volksraad-dpr-versi-nederland/>.
- l) Wikipedia. (t.t). “NICA”. 7 Mei 2012. <http://id.wikipedia.org/wiki/NICA>.
- m) Slideshare. (t.t). “Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan”. 23 Desember 2011. <http://www.slideshare.net/anannur/pendidikan-di-indonesia-pada-masa-penjajahan>.
- n) Wikipedia. (t.t). “Hindia Belanda”. 17 November 2011. http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda.
- o) Wikipedia. (t.t). “Partai Indonesia Raya”. 7 Mei 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Indonesia_Raya.
- p) Wikipedia. (t.t). “Partai Nasional Indonesia”. 7 Mei 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia.

- q) Indonesiaindonesia. (t.t). “Sejarah krisis ekonomi dunia”. 13 Januari 2012. <http://indonesiaindonesia.com/f/36953-sejarah-krisis-ekonomi-dunia>.
- r) Icrp-online. (t.t). 13 Januari 2012. <http://icrp-online.org/082009/post-14.html>.
- s) Bisnis. Deskripsi. (t.t). “lintah darat”. 15 Mei 2012. <http://bisnis.deskripsi.com/lintah-darat-0>.
- t) Phrases. (t.t). 12 Januari 2012. <http://www.phrases.org.uk/meanings/328950.html>.
- u) Idiomsite. (t.t). “Spare the rod”. 12 Januari 2012. <http://www.idiomsite.com/sparetherod.htm>.
- v) Religiousolerance. (t.t). 12 Januari 2012. <http://www.religioustolerance.org/spankin13.htm>.
- w) Wikipedia. (t.t). “Kuldesak”. 17 November 2011. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kuldesak>.
- x) Webster dictionary. (t.t). “Litmus test”. 18 Juni 2012. <http://www.webster-dictionary.org/definition/litmus%20test>.
- y) Collins dictionary. (t.t). “Litmus test”. 18 Juni 2012. <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/litmus-test>.

Untuk memahami TSu dan konteks sejarah dan budaya Toraja terkait topik dari teks pilihan, saya juga berdiskusi dengan narasumber berikut.

- Dr. Grace Josephine Tiwon, M.Ed., dosen FIB-UI yang berperan sebagai pembimbing sekaligus narasumber saya dalam memahami TSu. Beliau tidak hanya sangat membantu saya dalam memahami makna teks yang ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi juga dalam memahami sejumlah istilah Belanda yang terdapat dalam teks.
- Julius Saludung, SH (73 thn), penulis buku *Randanbatu dalam Pusaran Sejarah Toraja*. Saya mengadakan percakapan yang cukup intens dengan beliau untuk memahami konteks budaya dan masyarakat Toraja sebagaimana yang pernah dialami dan/atau pernah diceritakan oleh orang tua atau generasi sebelum beliau.
- Prof Dr. Rahayu Surtiati Hidayat, guru besar FIB-UI yang menjadi pembimbing dan sekaligus narasumber saya dalam memahami TSu.

- 3) Pengalihan, yaitu dengan melakukan analisis semantis terhadap TSu dan mencoba mengalihkannya ke dalam BSa.
- 4) Pembuatan draf awal, dengan mempertimbangkan pembaca TSA dan latar pendidikan mereka.
- 5) Pengecekan dan revisi draf awal, dengan memeriksa kewajaran dan ketepatan terjemahan setelah beberapa waktu lamanya ditinggalkan untuk sementara demi mendapatkan pandangan baru yang lebih objektif. Selanjutnya mengerjakan revisi awal untuk menghasilkan draf kedua.
- 6) Pengujian terjemahan, dilakukan untuk mendapatkan umpan balik yang menunjukkan kelemahan terjemahan untuk selanjutnya diperbaiki. Hal itu dilakukan dengan meminta narasumber berikut untuk memeriksa kewajaran dan keterbacaan terjemahan.
 - Elias Marampa', S.Si, (32 thn) pengarang novel *Landorundun*, novel yang diinspirasi oleh legenda *Landorundun* dalam cerita rakyat orang Toraja. Beliau saya minta bantuannya untuk mengecek kewajaran dan keterbacaan terjemahan saya.
 - Oktavianus, S.Pd. (39 thn), guru bahasa Inggris SMA di Kelapa Gading yang juga sedang mengambil program magister penerjemahan di Universitas Gunadarma.
 - Sri Kusuma Winahyu, S.S, M.Hum. (38 thn), staf di Pusat Bahasa lulusan S1 Jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Magister Linguistik dari FIB Universitas Indonesia. Beliau saya minta kesediaannya untuk membantu saya mengecek kewajaran dan keberterimaan terjemahan saya terutama menyangkut register dan kaidah bahasa Indonesia.
- 7). Penyempurnaan terjemahan, dilakukan dengan merevisi draf kedua terjemahan serta draf selanjutnya berdasarkan pengamatan sendiri dan masukan yang diperoleh dari hasil pengujian terjemahan itu.

2.8.2 Metodologi Anotasi

Dalam menerjemahkan TSu adalah hal yang lumrah apabila muncul banyak kemungkinan atau pilihan cara menerjemahkan teks baik dari tataran kata, kalimat, paragraf maupun teks secara keseluruhan. Atas pilihan itu, penerjemah

pasti memiliki alasan tertentu hingga dapat memutuskan satu pilihan yang dianggap paling tepat untuk mengalihkan maksud penulis TSu dan tentu saja agar pembaca sasaran TSa juga dapat menangkap maksud penulis TSu dengan baik. Hal itulah yang ingin dicapai dalam melakukan penerjemahan beranotasi ini.

Penerjemahan beranotasi (Williams & Chesterman, 2002) atau penerjemahan dengan komentar tersebut merupakan suatu bentuk penelitian introspektif dan retrospektif yang memungkinkan penerjemah menerjemahkan teks sekaligus menuliskan komentar tentang proses penerjemahan yang dilakukan. Dengan mengacu pada pengertian penerjemahan beranotasi itu, saya memberikan anotasi pada terjemahan ini untuk menjelaskan berbagai masalah yang saya temui dalam penerjemahan serta langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan masalah itu hingga menghasilkan padanan yang sesuai.

Langkah yang saya tempuh dalam melakukan anotasi adalah sebagai berikut:

- Membandingkan TSu dengan TSa. Hal ini secara praktis saya lakukan dengan mengamati secara seksama kesesuaian TSu dan TSa untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam penerjemahannya.
- Kemudian, mengidentifikasi dan mengumpulkan unsur yang perlu dianotasi pada teks terjemahan terutama menyangkut kata budaya yang terdiri dari nama diri dan nama jenis baik dalam bahasa Toraja, Indonesia, maupun Belanda, dan Thai.
- Mengklasifikasi unsur pada TSa yang akan dianotasi tersebut untuk memudahkan dalam analisisnya.
- Mencari rujukan untuk menemukan penjelasan tentang kata, istilah, dan ungkapan baik dalam BSu maupun dalam BSa. Caranya adalah melakukan penelusuran pustaka dan berkonsultasi dengan narasumber.
- Menuliskan anotasi terhadap unsur yang sudah dipilih sesuai dengan klasifikasi yang ada.

Demikianlah pertanggungjawaban saya atas kerangka pikir serta pilihan cara mengatasi permasalahan dalam penerjemahan hingga menghasilkan TSa yang ada di Bab 3 berdasarkan TSu pada Bab 4 itu yang kemudian saya tuliskan secara lengkap pada Bab 5 tugas akhir ini sebagai anotasi.

BAB 3

TERJEMAHAN

PENDIDIKAN, ORGANISASI, DAN KESADARAN ETNIS

[7.1] Selama beberapa dekade sebelum tahun 1906 dan satu dekade atau beberapa dekade sesudahnya, para bangsawan Toraja menggunakan bahasa Bugis untuk membaca dan menulis. Akses kaum bangsawan pada bahasa tulis sangat terbatas, khususnya mereka yang menjalin hubungan dengan dataran rendah. Beberapa pemuda Toraja yang tinggal lama di istana atau rumah bangsawan dataran rendah belajar membaca, menulis, dan berhitung bersama kawan mereka dari Bugis di bawah bimbingan seorang guru.¹ Ketika para pedagang Bugis kian bertambah di dataran tinggi, beberapa di antaranya mengajarkan membaca dan menulis kepada para kepala kampung, serta menyebarluaskan bahasa Bugis di kalangan elite Toraja.² Para guru Islam juga berperan dalam menyebarkan literasi Bugis, khususnya di bagian timur dan selatan dataran tinggi yang berbatasan dengan Luwu dan Duri.³

[7.2] Belanda mengakui fungsi khusus bahasa Bugis di Ma'kale-Rantepao dan menyediakan terjemahan Bugis untuk semua dokumen yang dikeluarkan di sana selama dekade pertama atau lebih dari pemerintahannya.⁴ Meskipun demikian, masuknya Belanda secara tiba-tiba ke daerah dataran tinggi memperlambat dan kemudian menghambat penetrasi bahasa Bugis, dan menggantikannya dengan Bahasa Melayu, bahasa pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Ketika Pong Maramba dan Puang Taronkon bertemu Antonie van de Loosdrecht dalam suatu perjalanan dari Makassar ke Palopo pada tahun 1913, bahasa Melayu yang mereka gunakan dalam bercakap-cakap terdengar buruk karena mungkin mereka hanya belajar dari juru bahasa berbahasa Melayu yang membantu pekerjaan para pejabat Belanda setelah tahun 1906.⁵ Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi pemerintah kolonial menjadikan para bangsawan dewasa memiliki kemampuan trilingual, yaitu mampu berbahasa Bugis, Melayu, dan bahasa daerah mereka. Sementara itu, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah membuat anak kaum bangsawan memiliki kemampuan bilingual, yaitu menguasai

bahasa Melayu dan bahasa daerahnya. Akibatnya, orang Toraja yang berbahasa Melayu menjadi bagian dari semesta bahasa dan budaya yang membentang jauh melebihi Sulawesi Selatan, meliputi seluruh Hindia Belanda dan masyarakat Melayu Muslim lain. Penggunaan bahasa Melayu menggeser Toraja keluar dari orbit budaya Bugis dan masuk ke dalam dunia Hindia Belanda dengan model dan institusi kebudayaan yang berbeda. Sekolah modern adalah institusi yang paling berperan di Ma'kale-Rantepao.

Pendidikan Berbahasa Melayu

[7.3] Perkembangan sekolah berbahasa Melayu di dataran tinggi Sa'dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan misi, serta kondisi lokal dan regional yang khas. Sebagaimana yang terjadi di wilayah lain Hindia Belanda, pemerintah kolonial pertama-tama dan terutama hendak melatih korps pegawai negeri dalam suatu birokrasi lokal yang semakin rasional untuk menggantikan para pendahulu mereka yang tidak berpendidikan. Di dataran tinggi, mengingat tidak ada pejabat yang setara dengan priyayi Jawa, Belanda menciptakan hubungan administrasi regional pertama yang saling terkait dan menyeluruh. Kesempatan pendidikan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda terutama kepada putra kaum elite untuk mengisi jabatan pada pemerintah yang baru.

[7.4] Pada prinsipnya, setiap kota *onderafdeeling* di Sulawesi Selatan memiliki sedikitnya satu sekolah dasar pemerintah yang oleh penduduk setempat disebut dengan berbagai nama. Gubernur mengizinkan pembangunan satu sekolah di setiap kota *onderafdeeling* yang harus diselenggarakan setahun kemudian.⁶ Sekolah *landschap* atau sekolah daerah itu, sebagaimana biasa disebut di sana, adalah pendidikan lima tahun yang secara resmi dinamai Sekolah Pribumi Kelas Dua. Istilah "Pribumi" berarti bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Sekolah berbahasa Belanda pada awal abad ke-20 hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan sejumlah kecil pribumi yang mendapat privilese untuk menembus batas bahasa. Istilah "Kelas Dua" membedakannya dari sekolah Kelas Satu yang didirikan di Jawa bagi anak priyayi pada akhir abad ke-19, yang lambat laun ditiadakan.⁷ Akan tetapi, "Kelas Dua," juga menunjukkan bahwa posisi sekolah berbahasa Melayu dalam hierarki

pendidikan Hindia Belanda lebih rendah karena bahasa pengantar membedakan status.

[7.5] Pemerintah Belanda di Ma'kale-Rantepao mencoba membatasi penerimaan siswa di kedua sekolah tersebut hanya bagi anak para kepala kampung. Akan tetapi, terutama pada tahun-tahun awal sekolah itu diselenggarakan, para kepala kampung sering kali mengirim anak bawahan mereka ke sekolah dengan menggunakan nama anaknya karena khawatir bahwa setelah lulus mereka akan dikirim untuk mengikuti wajib militer pemerintah kolonial. Sulit diperkirakan apakah tidak berlebihan bahwa sedikit anak dari kelas sosial rendah yang berhasil bersekolah dengan menggunakan kesempatan itu dianggap sebagai hal yang sangat lazim terjadi pada masa itu. Pada kenyataannya, hanya sedikit anak berkelas sosial rendah yang berhasil menggunakan kesempatan untuk bersekolah karena umumnya mereka tidak mampu bertahan di dalam lingkungan dengan kesenjangan status sosial. Meskipun demikian, beberapa di antara mereka memang sukses dan menjadi guru atau administratur kolonial. Akan tetapi, ketika statusnya diketahui, mereka dipindahtugaskan ke luar Ma'kale-Rantepao.⁸

[7.6] Kebutuhan untuk mendidik dan mengangkat sekitar 200 orang anggota birokrasi *onderafdeeling* sesuai dengan daya tampung kedua sekolah *landschap* itu. Akan tetapi, pada tahun 1909 pemerintah kolonial diharapkan dapat lebih memerhatikan kesejahteraan “penduduk pribumi” secara umum dibandingkan apa yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Politik Etis, yang menyebarluaskan suatu rencana untuk lebih memerhatikan pelayanan masyarakat di sejumlah daerah jajahan Belanda, menekankan penyediaan pendidikan dasar yang menjangkau tidak hanya kaum elite tetapi meluas ke penduduk kampung secara menyeluruh. Itu berarti diperlukan perhatian lebih pada pembangunan sekolah dasar mengikuti sekolah rakyat tiga tahun (*volkschool*) yang didirikan di Jawa pada tahun 1907.⁹

[7.7] Politik “etis” di Batavia yang mendukung perluasan pendidikan kampung di seluruh Hindia Belanda muncul bertepatan dengan kekhawatiran pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan akan masuknya Islam ke dataran tinggi. Dapat dilihat pada Bab 5 dan Bab 6 bagaimana kekhawatiran itu mendorong pemerintah untuk

mengundang misionaris ke dataran tinggi Sa'dan yang kemudian mendirikan sekolah kampung dengan subsidi pemerintah. Dengan demikian, berkembanglah suatu jenjang sekolah baru untuk melengkapi keterbatasan jangkauan sekolah *landschap*, yaitu sekolah rakyat misi di kampung (*zendingsvolksschool*). Sekolah itu disokong oleh lembaga Gereformeerde Zendingsbond (GZB), namun memperoleh subsidi 5 persen dari pendapatan tahunan pemerintah yang dikumpulkan di Ma'kale-Rantepao, sejumlah kurang lebih f12.000* pada tahun 1920-an. Subsidi itu dihentikan tahun 1931 dengan pemberlakuan uang sekolah bulanan sebesar 10 sen Belanda yang dikumpulkan guru dari setiap siswa.¹⁰

[7.8] Pendidikan sekolah kampung meluas secepat kemampuan keuangan misi mendanainya karena misi menganggap pendidikan sebagai salah satu sarana paling efektif untuk menarik umat baru. Dorongan terbesar untuk mendirikan sekolah baru berasal dari para misionaris sendiri dalam dekade pertama penyelenggaraan pendidikan kampung. Akan tetapi, pada tahun 1926 minat penduduk setempat untuk bersekolah melampaui daya tampung sekolah sehingga untuk pertama kalinya sebagian murid ditolak karena sekolah sudah penuh.¹¹ Sekitar 11 persen dari semua anak usia sekolah mengikuti pendidikan di sekolah kampung pada tahun itu. Persentase itu meningkat menjadi 14 persen pada tahun 1939. (Lihat Tabel 3.1)

[7.9] Politik agama sangat memengaruhi bentuk ekspansi pendidikan Toraja pada tahun 1920-an. Para misionaris mencoba mengembalikan kepercayaan pemerintah Hindia Belanda pada kemampuan GZB untuk menangani seluruh pendidikan dasar yang telah diguncang oleh pemberontakan tahun 1917. Kedua sekolah *landschap* sekuler yang ada di *onderafdeeling* Ma'kale dan Rantepao itu tetap dipandang sebagai simbol keduniawian meskipun sebagian besar karyawannya penganut Kristen yang berbahasa Melayu. Untuk dapat diterima oleh misi, sebuah sekolah harus mempunyai pendidikan agama yang tidak diberikan oleh sekolah netral, sesuai dengan namanya.¹²

* f12.000 setara dengan Rp67.371.600,00 berdasarkan perhitungan konversi nilai mata uang gulden ke rupiah (f1=Rp5.614,00) yang terakhir diperbaharui pada tanggal 3 November 2011 (<http://coinmill.com/NLG-calculator.html#NLG=1>, diakses tanggal 4 November 2011).

[7.10] Tabel 3.1: Pertumbuhan Pendidikan di Ma'kale-Rantepao, 1913—1939

Tahun	Populasi	Jumlah anak usia sekolah (perkiraan) ^e	Jumlah siswa	% Populasi usia sekolah
1913	123.000 ^a	24.600	200 ^f	1
1914	123.000	24.600	1.000 ^g	4
1926	138.000 ^b	27.600	3.000 ^h	11
1930	184.000 ^c	36.800	3.800 ⁱ	10
1939	189.000 ^d	37.450	5.300 ^j	14

Catatan:
^a Breedveldt Boer, "Memorie van overgave," hlm.88.
^b H. T. Lanting, "Memorie van overgave," hlm. 47–51.
^c *Volkstelling 1930, Deel V*, hlm. 30.
^d G.R. Seinstra, "Memorie van overgave," hlm. 6
^e Berdasarkan rumus yang digunakan pemerintah Belanda di Hindia Belanda untuk menghitung jumlah anak usia sekolah: anak usia sekolah sama dengan 20% populasi. Penghitungannya adalah: 3 dari setiap 5 orang penduduk adalah anak-anak, dan 1 dari setiap 3 orang anak adalah usia sekolah, maka 20% dari populasi merupakan usia sekolah.
^f Perkiraan jumlah dua sekolah *landschap* dan beberapa sekolah kampung yang dibuka oleh Gereja Protestan Indonesia.
^g *AdV*, Nov. 1914, hlm.94.
^h *AdV*, Mar. 1928, hlm.30.
ⁱ *AdV*, Jul. 1931, hlm. 91; *AdV*, Jul. 1933.
^j Diproyeksikan dari total 5.000 siswa pada tahun 1937 (*AdV* 1937, hlm. 87–8) dengan penambahan tiga sekolah pada 1938—9 (G. R. Seinstra, "Memorie van overgave," hlm. 95).

[7.11] Antara tahun 1920—1924, pemerintah provinsi merundingkan serangkaian kesepakatan dengan GZB yang menandai peningkatan dukungan bagi pendidikan misi di Ma'kale-Rantepao. Kursus pelatihan guru (sebagai pengganti sekolah guru) diadakan di pos misi Barana dan mulai tahun 1920 kursus itu menerima subsidi dari pemerintah. Dua tahun kemudian, gubernur setuju untuk menempatkan hanya guru Kristen di kedua sekolah sekuler itu dan menanggapi positif usulan GZB untuk mengubah keduanya menjadi sekolah lanjutan (*vervolg-school*). Dengan prinsip itu, kelas satu sampai kelas tiga dikelola oleh misi, sementara kelas empat dan lima dikelola oleh pemerintah.¹³

[7.12] Pendidikan dengan sistem Melayu laksana sebuah kuldesak, dirancang hanya untuk memberikan landasan bagi pendidikan dasar dan tidak membuka jalan menuju pendidikan menengah. Pendidikan di sekolah *landschap* hanya berlangsung hingga tahun kelima seperti halnya pendidikan tiga tahun di sekolah kampung, kecuali bagi anak kaum elite yang pindah ke sekolah *landschap* untuk dua tahun terakhir pendidikannya.

[7.13] Setelah pendidikan dasar kampung terbentuk, lebih banyak lagi murid yang ingin melanjutkan ke kelas empat dan lima sehingga melebihi daya tampung sekolah *landschap*. Ijazah sekolah lima tahun membuka peluang untuk menjadi guru di sekolah kampung. Pekerjaan itu memberikan gaji dan prestise bagus. Pada tahun 1925, misi membuka dua sekolah lanjutan yang menawarkan pendidikan setara dengan dua kelas terakhir pada Sekolah Pribumi Kelas Dua.¹⁴ Perbedaan utama Sekolah Pribumi Kelas Dua dengan sekolah lanjutan adalah yang terakhir memberikan pelajaran agama dan menghilangkan sama sekali pembatasan status sehingga secara teoretis sekolah itu terbuka bagi siapa pun yang memiliki kemampuan dan dana yang cukup untuk membayar biaya pendidikan.¹⁵ Dalam kenyataan, situasinya lebih rumit. Anak kaum elite yang tinggal jauh dari kota sering kali enggan masuk ke sekolah *landschap* karena tidak ada fasilitas asrama. Akibatnya, anak dari keluarga kalangan bawah yang tinggal dekat kota mengisi bangku yang disiapkan bagi anak kaum elite di daerah terpencil. Karena menyediakan asrama, sekolah lanjutan memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak kaum elite daripada yang seharusnya.¹⁶ Singkatnya, meskipun lebih terbuka untuk menerima calon murid dari status sosial rendah dibandingkan pemerintah, misi tetap sangat ingin menampung anak kaum elite.¹⁷

[7.14] Dari awal, sekolah lanjutan hanya mampu menyerap sedikit murid lulusan sekolah kampung yang direkomendasikan untuk melanjutkan studi. Pada tahun 1928, dari 295 murid yang direkomendasikan untuk studi lanjut, hanya 55 orang yang masuk Kelas 1 *vervolgschool* di Rantepao. Sepuluh tahun kemudian, jumlah murid yang masuk *vervolgschool* hampir tiga kali lipat, yaitu 150 orang, sementara pendaftar di sekolah kampung hanya meningkat sekitar 66 persen.¹⁸ Namun, sementara lulusan sekolah kampung memiliki kesempatan yang lebih

baik untuk melanjutkan pendidikan selama dua tahun lagi pada tahun 1937, kesempatan kerja bagi lulusan sekolah lanjutan menurun tajam sepanjang tahun 1930-an. Peluang menjadi guru lebih kecil daripada jumlah lulusan kursus pelatihan guru. (Lihat bagian Guru pada bab ini.) Meskipun demikian, tersisa sejumlah peluang kerja bagi para penginjil yang digaji dan dilatih oleh misi. Makassar, Pare-Pare, dan Palopo menawarkan kesempatan untuk masuk angkatan kepolisian bagi sejumlah lulusan sekolah lanjutan, sementara yang lain berhasil mendapatkan posisi pada eselon rendah dalam dinas kolonial, namun peluang itu juga menurun karena dampak Depresi Ekonomi yang melanda dunia.

[7.15] Karena tidak ada lagi peluang kerja, lulusan sekolah lanjutan yang jumlahnya kian meningkat kembali ke kampungnya tanpa pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang baru mereka peroleh. Di sini mereka menjadi canggung, tidak ingin bertani tetapi juga tidak mampu berdagang. Para lulusan itu berada pada posisi yang sama dengan “kelompok semi-intelektual yang tidak puas” di Jawa, seperti yang telah ditulis Robert Van Niel. Bagaimanapun, berbeda dari rekan mereka di Jawa yang berjasa dalam pembentukan gerakan nasionalis di Jawa,¹⁹ para lulusan di Toraja tidak memiliki pengaruh politis besar di Ma’kale-Rantepao karena sekolah kolonial yang relatif lambat dimulai, sedikitnya jumlah sekolah lanjutan, kaum semi-intelektual yang tidak memusat di Toraja, dan adanya pintu keluar ke dataran rendah. Selain itu, berbagai ketidakpuasan terhadap Belanda dielakkan oleh kesadaran etnis yang sedang tumbuh di kalangan orang Toraja sebagai kepulauan yang dikelilingi oleh lautan Bugis.

Pendidikan Berbahasa Belanda

[7.16] Akses pada pendidikan berbahasa Belanda sangat memperlebar horizon cita-cita karier siswa. Berbeda dari sistem pendidikan berbahasa Melayu yang tertutup, yang dengan seketika berakhir di kelas lima, sekolah berbahasa Belanda secara teoretis dapat mengantarkan siswa ke salah satu dari tiga institusi pendidikan tinggi di Hindia setelah tahun 1913, atau, secara luar biasa, ke universitas di Belanda. Jarang terjadi, “orang Indonesia” dari kalangan atas yang mendapatkan akses ke pendidikan tinggi di Hindia (dan jauh lebih jarang lagi yang mendapatkan kesempatan ke Belanda). Namun seseorang tidak perlu

mendapat pendidikan begitu tinggi untuk mendapatkan tempat di antara para elite berpendidikan di Hindia Belanda; pendidikan menengah sudah cukup untuk menempatkan seseorang dalam kelompok yang cukup terpilih.

[7.17] Ketika pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Dasar Eropa (ELS) bagi “orang Indonesia” pada tahun 1903, banyak orang tua mampu yang berusaha memasukkan anaknya ke sekolah itu sebagai jalur paling pasti untuk mendapatkan posisi bagus dalam dinas kolonial. Pendidikan Eropa kemudian ditutup bagi mereka dengan alasan sekolah itu sudah dibanjiri murid pribumi dan suatu sistem pendidikan paralel Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda (HIS)[†] didirikan tahun 1914 untuk menampung minat yang meningkat pada pendidikan berbahasa Belanda.²⁰ Sekolah itu merupakan pendidikan tujuh tahun yang setara dengan pendidikan ELS, dengan kurikulum sangat berbobot yang berada beberapa tingkat di atas pendidikan sekolah dasar Amerika Serikat saat ini, bahkan ditambah dengan kurikulum sekolah menengah pertama.

[7.18] Di Ma’kale-Rantepao, orang tua Toraja mulai mendesak penyelenggaraan pendidikan Belanda pada awal tahun 1920-an. Organisasi modern pertama, Bunga’ Lalan (orang yang merintis jalan),²¹ lahir dari tuntutan itu dan muncul sebagai koalisi besar yang mencakup elite tradisional, pedagang (mungkin orang Bugis dan China), dan elite modern baru yang terutama beranggotakan guru.²² Misi segera menyokong permintaan akan pendidikan Belanda dengan melakukan negosiasi agar sebuah Sekolah Pribumi berbahasa Belanda dibuka di Ma’kale-Rantepao. Terjadi persaingan dengan Palopo yang sebagai ibu kota *afdeeling* telah mendapatkan izin untuk membuka sebuah HIS, namun mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengajar berbahasa Belanda yang berkualifikasi. Penundaan itu memberikan misi lebih banyak waktu untuk meyakinkan Makassar bahwa meskipun ada HIS yang dekat di Palopo (atau, mungkin, justru karena itu), keberadaan HIS di Ma’kale-Rantepao sangat vital.²³

[7.19] Misi berargumentasi bahwa kepentingan Belanda dapat sepenuhnya terealisasi apabila dilanjutkan kebijakan yang diprakarsai Gubernur Couvereur pada

[†] HIS merupakan singkatan dari *Hollandsch-Inlandsche School*.

tahun 1924 untuk mendorong otonomi dataran tinggi Toraja terpisah dari dataran rendah Luwu.²⁴ Yang pasti, apabila Ma'kale-Rantepao hendak dipertahankan sebagai perisai terhadap Islam, Ma'kale-Rantepao harus memiliki sistem sekolah sendiri:

Pemuda Toraja kita seharusnya tidak terpaksa pergi ke (daerah) pesisir yang Muslim untuk bertahun-tahun berada di bawah pengaruh Islam sehingga mereka kemungkinan menganut Islam dan kembali membawa pengaruh buruk bagi orang Toraja.²⁵

[7.20] Namun, mengapa kemudian diselenggarakan sebuah sekolah berbahasa Belanda? Alasannya sangatlah reaksioner. Dengan peningkatan popularitas pendidikan berbahasa Belanda di kalangan elite, mereka akan mengirim anak mereka ke mana pun untuk mendapatkannya. Kalaupun itu berarti harus ke dataran rendah Islam atau ke sekolah Katolik di Jawa, tidak menjadi masalah. Jadi, misi menetapkan pendidikan berbahasa Belanda sebagai salah satu pusat perhatiannya.²⁶

[7.21] Kampanye sekolah berbahasa Belanda di Ma'kale-Rantepao tidak hanya sukses, bahkan dalam waktu singkat sekolah itu telah berfungsi sebagai satu-satunya sekolah berbahasa Belanda di *afdeeling* Luwu. Jelas itu pil pahit yang harus ditelan *datu*. Meskipun pada kenyataannya HIS Palopo telah dibangun, bahkan sebelum Ma'kale mengusulkan pembangunan sekolah berbahasa Belanda, Ma'kale berhasil mengangkat guru yang berkualifikasi sebelum Palopo dapat melakukannya.²⁷ Apalagi pada kenyataannya, ketika pemerintah Hindia Belanda mengadakan penghematan dalam pelayanan sosial pada awal tahun 1930-an, HIS Palopo ditutup, sedangkan sekolah Ma'kale berhasil bertahan.²⁸

[7.22] Sekolah Ma'kale diubah dari HIS ke sekolah sambungan (*schakelschool*),²⁹ yang dirancang sesuai dengan namanya, untuk menyambungkan pendidikan berbahasa Melayu dengan pendidikan berbahasa Belanda yang memberi kesempatan kepada siswa berkualifikasi dari sekolah berbahasa Melayu untuk belajar bahasa Belanda guna melanjutkan ke pendidikan berbahasa Belanda. Dibandingkan dengan HIS, sekolah sambungan tidak hanya dikhususkan untuk anak kaum elite.³⁰ Biaya pendidikannya terbilang tinggi untuk standar waktu itu (*f*1.50), tetapi prasyarat minimal *f*1,000 untuk masuk ke HIS tidak berlaku di sekolah sambungan.³¹ Hal itu sangat sejalan dengan visi sebagian anggota GZB

yang menyokong pemberian kesempatan pendidikan lebih luas di luar batas masyarakat Toraja elite yang diberi privilese. Namun, perubahan itu mengecewakan orang Toraja dan beberapa anggota GZB yang menginginkan hanya kaum elitelah yang tetap memiliki mobilitas sosial.

[7.23] Dalam praktik, sekolah sambungan umumnya tidak egaliter dalam kebijakan penerimaan siswa. Walaupun tidak seketat pemerintah dalam memeriksa status keluarga, misi masih sangat memprioritaskan anak kaum elite. Pengecualian diberlakukan terutama bagi anak guru dengan mengabaikan asal-usul keluarganya dan keturunan mereka yang berhasil menembus batas status sosial di tahun-tahun awal.³² Karena hanya 23 sampai 45 lulusan sekolah kampung yang diterima di sekolah sambungan setiap tahun, jumlah bangku sekolah yang tersedia sangat mungkin diisi oleh anak kaum elite.³³ Mantan kepala sekolah sambungan mengulas kebijakan penerimaan siswa itu dalam sebuah surat yang ditulis pada tahun 1974:

Hanya masyarakat lapisan atas yang memperoleh pendidikan baik. Di kampung, guru yang berstrata sosial rendah mengalami kesulitan. Kaum elite tidak ingin mendengarkan pengakuan iman, misalnya, yang dipimpin oleh salah seorang *kaunan* mereka. Oleh karena itu, murid sebanyak mungkin diambil dari lapisan atas seperti halnya di Minahasa (Sulawesi Utara) dan Ambon.³⁴

[7.24] Tentu saja bukan hanya itu. Secara keseluruhan, Belanda tampaknya kurang berminat merusak lapisan sosial masyarakat Hindia dan secara umum berusaha mempertahankan hierarki pribumi yang ada dan menempatkan dirinya pada posisi tertinggi karena mereka menyadari bahwa pemerintahan kolonial lebih mudah dipertahankan apabila para pemimpin pribumi tidak merasa statusnya diancam oleh golongan yang lebih rendah. Misi di Toraja telah bereksperimen dalam “revolusi” sosial dan menolaknya setelah van de Loosdrecht wafat, dan itu jelas berimplikasi pada kebijakan pendidikan misi.

[7.25] Para lulusan dari pendidikan lima tahun di sekolah sambungan harus menghadapi kompetisi ketat untuk melanjutkan pendidikan. Sebagian besar melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (MULO) di Makassar untuk mendapatkan tambahan tiga tahun pendidikan berbahasa Belanda. Akan tetapi, setiap tahun tidak lebih dari lima orang siswa dari Ma’kale-Rantepao

diterima di MULO. Setiap tahun, sebagian kecil masuk ke Sekolah Perdagangan (*Handelschool*) di Makassar atau Malang (Jawa Timur) tempat mereka belajar administrasi dan pembukuan. Dua siswa lain biasanya ditempatkan di Sekolah Pertanian di Malang atau Bogor (Jawa Barat) untuk mendapatkan spesialisasi agronomi. Sedikit siswa perempuan, yang tamat dan mampu melanjutkan pendidikan, sering kali masuk ke Sekolah Ekonomi Rumah Tangga Kristen di Yogyakarta (Jawa Tengah).³⁵

[7.26] Pendidikan lanjut yang paling bergengsi bagi lulusan sekolah sambungan adalah Sekolah Pendidikan bagi Calon Pegawai Bumiputra (OSVIA) di Makassar. Setiap tahun, menurut seorang Toraja peserta pertama pelatihan, OSVIA Makassar hanya menerima 20 siswa dari seluruh bagian timur Nusantara. Lima dari 20 tempat yang tersedia dialokasikan untuk Sulawesi Selatan dan secara umum Ma'kale-Rantepao mendapat jatah satu tempat. Dalam pembagian itu terjadi fleksibilitas: jika satu daerah tidak dapat menyediakan jumlah kandidat yang berkualifikasi untuk mengisi, tempat itu diberikan kepada siswa dari daerah mana pun. Saat permintaan posisi administrator pribumi berkurang, jatah untuk dataran rendah Sulawesi Selatan tampak lebih diprioritaskan dibandingkan dataran tinggi. Namun, dengan berlimpahnya lulusan sekolah sambungan yang berkualifikasi, Toraja siap mengisi tempat yang dibiarkan kosong oleh daerah yang sistem pendidikannya kurang berkembang dan kaum elitnya lambat merespon pendidikan sebagai jalan baru untuk memperoleh status.³⁶

[7.27] Kebijakan resmi Hindia Belanda mengenai pendidikan berbahasa Belanda segera kembali ke posisi yang hanya sedikit lebih maju daripada masa sebelum penerapan Politik Etis. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mengisi jabatan dalam administrasi pribumi, pendidikan Belanda meluas pada 1920-an sehingga pada suatu saat sejumlah besar lulusan tidak mendapatkan peluang bekerja di dinas pemerintahan (Belanda). Dengan berkurangnya peluang kerja di dinas pemerintahan selama (masa) Depresi Ekonomi pada tahun 1930-an, kebutuhan akan pejabat “pribumi” berbahasa Belanda menurun. Hal itu meniadakan alasan utama pengadaan pendidikan berbahasa Belanda. Lagi pula, suara-suara dari gerakan nasionalis yang meningkat justru sering kali sangat lantang

dikumandangkan oleh mereka yang telah mengecap pendidikan Belanda. Peningkatan pengangguran ditambah dengan sistem pendidikan berbahasa Belanda yang meluas secara berlebihan menghasilkan kaum “proletar terpelajar” dengan potensi siap meledak setiap saat, atau seperti pandangan yang berkembang saat itu.³⁷ Akibatnya, Menteri Pendidikan dan Agama menggunakan tekanan untuk mengurangi sekolah berbahasa Belanda sambil berusaha membangkitkan kembali minat pada pendidikan berbahasa daerah (Toraja).

[7.28] Gelombang pertama penghematan yang dilakukan pemerintah yang beriringan dengan kekhawatiran pemerintah akan hilangnya pendidikan berbahasa Belanda terjadi di Ma'kale-Rantepao pada tahun 1932. Direktur Pendidikan dan Agama memerintahkan penarikan dana secara bertahap dari sekolah sambungan sebelum penghentian total pemberian subsidi pemerintah pada tahun 1936. Departemen Pendidikan dan Agama mengajukan penurunan status sekolah sambungan menjadi *vervolg-school* berbahasa Melayu, sedangkan porsi pelajaran bahasa Belanda dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, tindakan itu menggagalkan tujuannya sebagai saluran menuju pendidikan tinggi yang seluruhnya diselenggarakan dalam bahasa Belanda. Sekolah itu tampaknya memperoleh sejumlah subsidi kecil karena mendukung rencana Kementerian Pendidikan dan Agama untuk menghentikan masalah “produksi penutur bahasa Belanda yang berlebihan.”³⁸

[7.29] Rencana pemerintah mengurangi pendidikan berbahasa Belanda bertolak belakang dengan peningkatan permintaan orang Toraja akan pendidikan Belanda. Yang pasti, sepanjang tahun 1930-an, misi memperbesar kapasitas sekolah sambungan sehingga pada tahun 1937 ukuran kelas sudah dua kali lebih besar daripada tahun 1926. Itu tetap berarti bahwa dalam setahun hanya 40 orang siswa yang diterima di Kelas Satu, sementara masih banyak pula yang ingin masuk. Menghadapi minat itu, kemungkinan kecil misi akan melepaskan salah satu jalur yang paling efektif untuk merangkul kaum elite. Oleh karena itu, misi menolak usulan Kementerian Pendidikan dan Agama dan memutuskan untuk melanjutkan sekolah sambungan tanpa subsidi pemerintah jika perlu. Kesepakatan akhir adalah mempertahankan sekolah sambungan dengan subsidi yang jauh lebih kecil.³⁹

[7.30] Alasan yang digunakan untuk menyelamatkan sekolah sambungan pada tahun 1933 sangat berbeda dari yang digunakan GZB untuk mendirikan sekolah itu kurang dari satu dekade yang lalu. Alasan itu menunjukkan bahwa misi makin percaya terhadap kekokohan Toraja sebagai perisai untuk menghadapi Islam, namun misi tampaknya sangat berhasrat mengidentifikasi musuh baru dari luar:

Misi Protestan harus mempertahankan pendidikan berbahasa Belanda di tangannya, jika tidak, Roma (misi Katolik) akan mengambil alih. Dan sekarang dengan penutupan HIS di Palopo, pendaftar [di Sekolah Sambungan Ma'kale] mulai datang dari daerah pesisir itu sehingga pengaruh baik pada anak orang Islam terkemuka dari daerah pesisir mungkin terjadi.⁴⁰

Yang pasti, secara objektif kemungkinan peluasan Islam ke dataran tinggi Sa'dan semakin berkurang. Perpindahan yang substansial ke agama Kristen telah dimulai, sistem sekolah misi tertanam dengan kokoh dan tumbuh kuat meskipun terjadi *malaise* global yang mengurangi jumlah sekolah di Hindia secara keseluruhan dan peningkatan kesadaran etnis orang Toraja.

[7.31] Sekalipun misi Protestan mungkin merasa terancam oleh kedatangan misi Katolik di Ma'kale-Rantepao yang sudah di ambang pintu, namun persaingan kedua misi itu menguntungkan bagi pendidikan orang Toraja. Misi Katolik, dikenal dengan istilah Belanda *missie*, untuk membedakannya dari istilah *zending* yang digunakan oleh misi Protestan, mengutamakan pendidikan sebagai sebuah strategi untuk mencari pengikut baru, setidaknya seperti yang dilakukan misi Protestan. Dengan izin masuk ke dataran tinggi untuk mencari pengikut baru pada tahun 1937, setelah berhasil mengatasi keengganan pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkan persaingan misi di Kepulauan Luar, *missie* merasa makin terdesak untuk mengejar waktu yang hilang itu. Misionaris pertama adalah para guru dari Makassar yang hanya membuka tiga sekolah kampung dan sekolah lanjutan pada setengah dekade sebelum Pendudukan Jepang.⁴¹ Bagaimanapun, sumbangsih *missie* yang paling penting adalah keberhasilan mereka memaksa misi Protestan untuk lebih responsif terhadap permintaan orang Toraja akan pendidikan berbahasa Belanda.

Guru

[7.32] Sekolah di Ma'kale-Rantepao bergantung pada guru luar sebelum guru asal Toraja dapat dilatih. Menempatkan dan menggaji guru asal Eropa di sekolah Hindia selalu dianggap sebagai usaha yang mahal dan menghabiskan waktu sehingga idealnya guru pribumi selalu digunakan bila memungkinkan. Ditambah lagi karena kebanyakan guru direkrut untuk mengajar di sekolah berbahasa Melayu, tidak dibutuhkan banyak guru Belanda. Dalam sistem pendidikan berbahasa Melayu, peran guru Belanda terbatas pada pelatihan guru, pengawasan, dan pembuatan bahan ajar. Dalam sistem pendidikan berbahasa Belanda, jumlah mereka berkurang dengan peningkatan jumlah guru pribumi. Terutama dengan pemberlakuan kebijakan penghematan administratif, mempekerjakan guru pribumi lebih disukai karena gaji mereka lebih rendah dibandingkan rekannya dari Belanda.

[7.33] Kelompok terbesar kaum terpelajar terdapat di Jawa, tempat Sekolah Pribumi Belanda dimulai pada tahun 1900, dan di daerah Kepulauan Luar tempat misi Protestan telah berurat berakar tahun 1875, terutama di Ambon, Minahasa, Timor, dan kepulauan Sangir-Talaud di timur Minahasa. Mungkin, karena misi di Tapanuli berasal dari Jerman, jarang orang Batak menjadi guru di bagian timur Nusantara walaupun mereka sering kali mengisi jabatan dalam kerja sama administratif antara pejabat rendah Eropa dan kaum elite lokal. Belanda cenderung menganggap minoritas etnis itu lebih mudah diatur dibandingkan etnis Jawa, Sunda, dan kelompok Islam besar (atau kecil) lain.

[7.34] Di Ma'kale-Rantepao, orang Minahasa dan Ambon mengisi sebagian besar jabatan guru hingga pertengahan tahun 1920-an.⁴² Bahkan, di sekolah *landschap* yang dianggap sekuler, jarang sekali Muslim yang bekerja sebagai guru. Di sekolah pemerintah, sebagian besar guru beragama Kristen dan mereka tidak berusaha menyembunyikan hasrat mengkristenkan murid mereka. Pemerintah juga tidak berupaya untuk mendorong pluralisme agama dalam menghadapi tekanan kuat dari misi untuk menguasai sebanyak mungkin sistem pendidikan di Ma'kale-Rantepao.

[7.35] Sejak awal, para guru penutur bahasa Melayu dipekerjakan untuk melakukan peran ganda: mengajar dan menginjil. Keduanya berjalan berdampingan sesuai dengan pandangan GZB tentang pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai alat untuk mencapai tujuan agama dan pendidikan. Friksi yang cukup serius berkembang antara misionaris Belanda dan guru penutur bahasa Melayu mengenai cara yang tepat untuk menjalankan tugas ganda itu, namun tidak ada catatan mengenai guru yang dipecat karena lebih menekankan peran agama daripada pendidikan sekuler. Akan tetapi, para penginjil yang kurang memerhatikan peran ganda itu dipecat dalam beberapa peristiwa.⁴³

[7.36] Namun, kesulitan yang dihadapi penutur bahasa Melayu dalam komunitas orang Toraja dan Belanda lebih kompleks daripada itu. Mereka tampaknya ambivalen mengenai kedudukan mereka di Ma'kale-Rantepao, ditugasi dan terpencil, di antara orang yang jelas-jelas mereka anggap lebih rendah. Mereka menganggap diri sebagai orang kota yang sangat betah, itu pun kalau mereka pernah merasa betah, ditempatkan di kedua kota *onderafdeeling* sederhana itu. Mereka diharapkan tinggal di kampung yang dekat dengan sekolahnya, kecuali sebagian kecil guru yang beruntung mengajar di sekolah kota. Meskipun demikian, karena sekolah dan rumah guru sering kali dibangun di dekat pasar dan agak jauh dari pusat kampung, mereka secara fisik dan kultural terasing dari orang Toraja.

[7.37] Perasaan mereka muncul dalam lelucon yang bersifat merendahkan bahasa, pakaian, dan obsesi orang Toraja terhadap pesta kematian dan sabung ayam. Bahkan, saat berada di antara para misionaris Belanda yang tidak menyukai komentar menghina dari para penutur bahasa Melayu mengenai Toraja, para penutur bahasa Melayu sering kali tidak dapat menahan komentar mereka. Satu contoh di sebuah konferensi guru dan misionaris, seorang Minahasa menggambar cawat orang Toraja dan menamainya “dasi orang Toraja,” akibatnya dia kehilangan pekerjaannya.⁴⁴

[7.38] Perasaan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk. Sebagian besar penutur bahasa Melayu kurang berminat untuk belajar bahasa Tae' demi peningkatan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di berbagai sekolah

kampung. Penggunaan Tae' mengalami kemajuan yang cukup berarti di bawah pengawasan van de Loosdrecht dari tahun 1914—1917. Namun, resistensi para guru, seiring dengan pergantian seluruh staf guru setelah percobaan pemberontakan pada tahun 1917, merintangangi penggunaan Tae' secara luas sampai pertengahan tahun 1920-an, saat sebagian besar guru berasal dari Toraja.⁴⁵

[7.39] Sering kali, para guru penutur bahasa Melayu memberikan hukuman fisik di sekolah mereka.⁴⁶ Pukulan itu mengusik orang tua Toraja yang pada umumnya tidak pernah memukul atau menampar anak mereka dan guru itu sering kali ditegur oleh misionaris pengawas. Dalam beberapa kasus, guru dipecat karena terlalu sering memberikan hukuman fisik di dalam kelas sehingga, dalam satu kasus yang dilaporkan oleh Volkman, orang tua yang marah mengusir guru asal Minahasa dari kampung mereka setelah dia memukul seorang anak sampai mati.⁴⁷

[7.40] Dari penjelasan para misionaris menyangkut insiden itu, mereka melihat guru agak berlebihan dalam menerapkan filosofi mendisiplinkan anak dengan pukulan rotan.⁴⁸ Mereka tidak menyadari—atau tidak meninggalkan bukti bahwa mereka memang menyadari—hubungan yang renggang antara guru berbahasa Melayu dan masyarakat Toraja. Para guru itu terjebak di antara keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan perasaan kurang nyaman di tengah orang yang mereka anggap kurang beradab. Istri mereka sering kali menulis surat kepada keluarganya di kampung halaman yang mengeluhkan ketidaknyamanan hidup di dataran tinggi. Mereka mengkhawatirkan keselamatan diri dan keluarganya setelah pembunuhan van de Loosdrecht yang benar-benar memperburuk hubungan mereka dengan orang Toraja:

Istri guru merasa sangat khawatir jika suami mereka harus masuk kampung dan, dengan semua surat yang datang dari keluarganya yang mendesak mereka untuk meninggalkan manusia yang menyebalkan dan tidak dapat dipercaya, mereka ditekan untuk meninggalkan kami.⁴⁹

Ketakutan itu sangat berkurang setelah tahun 1917, namun perasaan terasing pastilah tetap ada.

[7.41] Pada tahun 1920-an dan 1930-an para misionaris kembali diasingkan, terutama dengan berkembangnya nasionalisme di Jawa yang menyebar melalui

berbagai publikasi dan dari mulut ke mulut mereka yang belajar di sana. Tanah asal orang Ambon dan Minahasa bukanlah sarang nasionalisme. Meskipun demikian, bila perlu sebagian besar tentara yang ditugasi untuk menumpas gerakan itu diambil dari sana. Namun, penutur bahasa Melayu itu lebih banyak berhubungan dengan daerah lain di Hindia melalui kunjungan dan korespondensi. Mereka adalah bagian dari sebuah kelompok kecil terpelajar yang sedang tumbuh dan mengikuti berita dari surat kabar nasionalis yang memang melibatkan beberapa editor yang sangat moderat. Wawasan para penutur bahasa Melayu itu lebih luas sehingga mereka lebih mengetahui perihal misionaris dan kurang menghormatinya dibandingkan rata-rata rekan mereka yang orang Toraja pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Dari merekalah, atau lebih tepat, melalui sejumlah kecil nasionalis aktif di antara guru penutur bahasa Melayu yang makin menurun jumlahnya pada tahun 1930-an (tinggal 25 persen), para guru Toraja menerima pelajaran pertama mengenai nasionalisme.

[7.42] Pembukaan kursus pelatihan guru di dekat Rantepao pada tahun 1917 menandai awal perubahan cepat dalam proporsi jumlah guru Toraja dan guru penutur bahasa Melayu. Pada tahun 1915 proporsi pengajar adalah satu guru Toraja berbanding sepuluh penutur bahasa Melayu. Pada tahun 1923, proporsi orang Toraja dan penutur bahasa Melayu meningkat menjadi sembilan berbanding tujuh, dan tahun 1930 meningkat menjadi tiga berbanding satu yang kemudian bertahan sampai Pendudukan Jepang.⁵⁰

[7.43] Hampir dapat dipastikan bahwa penerima manfaat utama dari kesempatan pendidikan di Ma'kale-Rantepao adalah anggota kaum elite. Seperti yang telah kita lihat, baik pemerintah maupun misi memberlakukan standar status dalam menyeleksi murid di berbagai sekolah pada semua jenjang dan pada umumnya semakin tinggi tingkat semakin ketat pemberlakuan standar itu. Pada prinsipnya, dibandingkan dengan pemerintah, misi lebih bersedia melonggarkan batasan status. Namun, ketika harus menghadapi reaksi kaum elite terhadap pelanggaran standar, pada umumnya misi mundur atau mengusahakan solusi yang tidak konfrontatif. Pada tahun 1930—1942, misi mencoba menerima *kaunan* dalam kursus pelatihan guru di Barana, namun akhirnya terpaksa mengirim para lulusan

kursus itu ke sekolah di luar Ma'kale-Rantepao. Hal itu mematahkan harapan misi untuk menerima mereka yang berstatus sosial rendah.⁵¹ Biaya kesertaan dalam pelatihan guru yang tinggi (f2.50 per bulan) menandakan bahwa ada kelompok tertentu yang dieliminasi oleh misi sehingga bertentangan dengan tujuan baik yang digembar-gemborkan oleh misi.⁵²

[7.44] Bahkan secara proporsional lebih banyak guru yang berasal dari kaum elite dibandingkan populasi murid. Namun, masalahnya sebenarnya jauh lebih rumit. Kaum elite di Toraja, sebagaimana di tempat lain, sangat berlapis-lapis. Sangat sulit membedakan secara analitis lapisan-lapisan elite karena tidak ada garis batas yang jelas, sebagaimana halnya dalam sistem *sakdina* (batasan status) di Thailand, misalnya.⁵³ Maka, terpaksa digunakan ungkapan seperti elite “tinggi,” “menengah,” dan “rendah” untuk menentukan kedudukan seseorang dalam kategori status lebih luas, yang biasa digunakan saat itu dan yang masih digunakan sekarang di Toraja. Keadaan lebih rumit karena jumlah kategori status utama yang berbeda di utara dan selatan, yaitu tiga di Rantepao dan empat di Ma'kale. Kategori elite tertinggi di Rantepao dikenal dengan *tomakaka*, sementara di Ma'kale terdapat satu kategori yang lebih tinggi, yaitu *puang*.⁵⁴ Perbedaan struktur status di Ma'kale (khususnya wilayah Tallu Lembangna) dan Rantepao pada dasarnya mengakibatkan perbedaan sosial yang lebih besar di Ma'kale daripada di Rantepao. Kemungkinan hal itu karena secara historis Ma'kale lebih lama berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan Bugis.

[7.45] Di Ma'kale dan Rantepao, sebagian besar guru diambil dari golongan elite yang lebih rendah dan menengah, bukan elite tinggi yang secara umum melihat sedikit manfaat dari karier guru.⁵⁵ Secara keseluruhan, kaum elite tinggi, termasuk mereka yang memegang posisi kepala distrik, lebih lambat merespon kesempatan pendidikan dibandingkan mereka yang anaknya memiliki akses yang kurang jelas pada jabatan administratif lebih tinggi di Ma'kale-Rantepao. Lagi pula, keluarga guru cenderung menghasilkan lebih banyak guru karena tradisi pendidikan modern lebih cepat mengakar di antara anak mereka.⁵⁶ Dengan demikian, kaum elite modern awal sebagian besar berkembang dari elite tradisional rendah dan menengah itu, dengan beberapa anggota yang berasal dari golongan atas atau

bawah sehingga semua lapisan terwakili. Saat menyadari bahwa kedudukan mereka semakin lemah, kaum elite tinggi mulai menganggap penting pendidikan sehingga menutup sedikit kesenjangan itu.⁵⁷ Akan tetapi, kesenjangan itu masih menjadi ciri masyarakat Toraja modern hingga tahun 1980-an.

[7.46] Thomas Van den End, pada pertengahan 1970-an, mengumpulkan data dasar tentang 430 guru yang pernah mengajar di Ma'kale-Rantepao antara tahun 1913—1949.⁵⁸ Kemudian dia meminta satu orang dari Ma'kale dan satu dari Rantepao yang akrab dengan sebagian besar nama yang dia kumpulkan untuk mengklasifikasinya menurut status sosial tradisional atau status bapak dan ibunya dulu. Rasanya tidak mungkin apabila klasifikasi semacam itu dilakukan terhadap orang Amerika Serikat zaman sekarang; garis keturunan itu di Toraja sendiri sudah lebih kabur saat ini. Namun, sebelum tahun 1950 masih mungkin mengklasifikasi setiap orang. Oleh karena itu, permintaan Van den End pada dua mantan guru yang punya pengetahuan yang cukup baik untuk mengklasifikasi nama-nama tersebut merupakan sebuah tantangan yang di luar kemampuan mereka.

[7.47] Dari klasifikasi Van den End muncul sejumlah amatan yang mendukung anggapan bahwa guru pada umumnya diambil dari golongan elite.⁵⁹ Dari 250 guru yang dapat diidentifikasi asal-usulnya (sebagian besar sisanya bukan orang Toraja), 78 persen diberi label anggota kelompok status tertinggi. Dengan kata lain, mereka adalah *tana' bulaan* di Ma'kale dan Rantepao. Selebihnya, atau 22 persen, berasal dari kelompok status yang lebih rendah. Perbedaan yang agak mencolok muncul ketika angkanya dipilah. Untuk Ma'kale, persentase orang yang diidentifikasi berasal dari Status 1 (*tana' bulaan*) 58 persen, sementara 28 persen berasal dari Status 2 (*tana' bassi*), dan 14 persen dari Status 3 (*tana' karurung*), yang dianggap *kaunan*. Tidak ada seorang pun yang diidentifikasi berasal dari kelompok Status 4 (*tana' kua-kua*). Untuk Rantepao, 92 persen berasal dari Status 1, sedangkan sisanya 8 persen berasal dari Status 2. Dalam sampel itu, tidak seorang guru pun dari Rantepao yang berasal dari tingkatan sosial di bawah Status 2.

[7.48] Klasifikasi dasar Van den End tidak dilengkapi dengan perbedaan yang lebih jelas di kalangan elite. Oleh karena itu, terpaksa digunakan generalisasi dari para informan terpercaya yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa profesi guru lebih kuat di tangan kaum elite Rantepao daripada di tangan kaum elite Ma'kale. Mayoritas guru tidak hanya berasal dari Rantepao (lebih dari 57 persen), tetapi juga sebagian besar mereka berasal dari kaum elite. Karena misi memilih orang yang berstatus tinggi untuk mengisi kelasnya dan kemudian hanya memberikan kesempatan kepada yang lain (dengan beberapa pengecualian) jika tidak ada pilihan lain, tampak bahwa respons kaum elite Ma'kale jauh lebih dingin dibandingkan elite Rantepao. Jumlah guru dari Ma'kale yang jauh lebih kecil memperkuat dugaan itu. Di Toraja masa kini, harus diakui bahwa elite Ma'kale kurang responsif terhadap pendidikan modern dibandingkan elite Rantepao. Selain itu, angka itu memperlihatkan bahwa tidak banyak anggota kaum elite yang melihat profesi guru sebagai alternatif yang menarik bagi anaknya. Namun, keengganan mereka justru merupakan kesempatan bagi *tana' bassi* dan *tana' karurung* yang statusnya lebih rendah untuk ditempatkan sebagai guru di Ma'kale-Rantepao. Padahal, mungkin mereka lebih sering dipindahkan dan lebih pendek kariernya dibandingkan rekan mereka yang berstatus lebih tinggi. Keadaan itu benar terjadi, khususnya pada *tana' karurung*.

[7.49] Elite modern yang muncul di Ma'kale-Rantepao, sebagaimana di wilayah Hindia Belanda lain, “bukanlah benar-benar elite baru, melainkan perluasan dan pengembangan dari yang lama.”⁶⁰ Seperti yang telah ditunjukkan di atas, hal itu terjadi terutama di Rantepao: lebih dari 90 persen guru Toraja yang merupakan unsur tunggal terbesar dalam elite modern diambil dari kaum elite lama, dan hanya 58 persen yang berasal dari Ma'kale. Di Rantepao, kaum elite modern tidak merupakan tantangan besar bagi kaum elite lama karena hanya perluasan dari elite lama, artinya berasal dari dan bertumpang tindih dengannya. Persaingan dalam mobilitas sosial lazim terjadi dalam elite lama yang diperluas seperti di Jawa karena seiring perjalanan waktu, priyayi lebih rendah lebih pandai memanfaatkan kesempatan memperoleh pendidikan daripada priyayi lebih tinggi.⁶¹ Akibatnya, hubungan antara kaum elite modern dan tradisional di Rantepao tidak diwarnai oleh permusuhan.

[7.50] Di Ma'kale, kaum elite modern terdiri dari berbagai unsur yang lebih rendah daripada elite lama, yang lambat menerima pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan status. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara kaum elite modern dan lama menimbulkan ketegangan sosial yang lebih hebat karena semakin banyak anggota dalam setiap kelompok yang tidak mengakui legitimasi kelompok lain. Ketegangan itu diperhebat terutama oleh karena orang Ma'kale lebih menyadari pentingnya keturunan (darah) daripada harta, tidak demikian dengan orang Rantepao.

[7.51] Berbagai perbedaan dalam elite modern yang mulai bangkit di Rantepao dan Ma'kale itu sedikit dijembatani oleh persamaan agama, pendidikan, dan orientasi etnis. Meskipun demikian, perbedaan karakter mereka mendorong pembentukan orientasi masing-masing terhadap Revolusi Indonesia dan pergolakan politis pasca kemerdekaan pada tahun 1950-an.

Upaya Awal Organisasi Modern

[7.52] Selain Bunga' Lalan yang pertama berdiri pada tahun 1926 untuk membela kepentingan sekelompok besar guru, elite tradisional, serta pedagang Bugis dan Cina, pendiri berbagai organisasi modern Toraja terutama adalah guru dan beberapa penginjil. Mereka berusaha membentuk berbagai koperasi dan asosiasi "kemajuan sosial". Beberapa organisasi jelas dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran etnis, sementara yang lain diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Toraja dengan memperkenalkan bentuk baru koperasi atau mengubah yang lama. Tidak ada organisasi politis terbuka di daerah Ma'kale-Rantepao namun beberapa orang secara individual masuk ke Parindra (Partai Indonesia Raya) pimpinan Thamrin-Sutomo yang berbasis di Jawa. Muhammadiyah, organisasi sosial Islam modern, secara sembunyi-sembunyi bersifat politis dan radikal. Akan tetapi, karena anggota Muhammadiyah sebagian besar adalah imigran Bugis dan peranakan Bugis-Toraja (lihat uraian dalam Bab 6, 8, dan 9), kelompok itu tidak dibahas sebagai organisasi Toraja.

Koperasi

[7.53] Seiring dengan peningkatan jumlah jemaat Kristiani pada tahun 1930-an, banyak jemaat berusaha memperkuat posisi ekonomi anggotanya dengan membentuk koperasi. Bentuk yang paling lazim adalah organisasi simpan pinjam yang berfokus pada dua kebutuhan dasar orang Toraja pada umumnya: paceklik di antara musim panen dan biaya pemakaman yang memberatkan. Untuk setiap kebutuhan khusus itu didirikan sebuah organisasi. Lumbung padi jemaat dimaksudkan untuk menabung padi. Koperasi padi Rembon, misalnya, dihidupkan dengan kontribusi sedikitnya lima ikat padi dari setiap anggota setelah panen raya. Pinjaman yang belum lunas juga sudah harus dilunasi pada masa itu. Pinjaman padi kapanpun sebelum panen dan dikembalikan setelah panen raya dikenakan bunga $33\frac{1}{3}$ persen. Walaupun tinggi, tingkat bunga itu lebih rendah daripada yang ditawarkan para tuan tanah; tingkat bunga 100 persen lazim pada masa itu, yang secara historis merupakan penyebab perhambaan karena utang dan penggadaian tanah mereka yang tidak mampu melunasi utang. Tingkat bunga lebih rendah yang ditawarkan lumbung padi koperasi benar-benar menghambat kelangsungan hidup koperasi itu. Permintaan pinjaman selalu melebihi ketersediaan simpanan padi sehingga lumbung dengan cepat kehabisan pasokannya. Pada akhir tahun 1930-an, setelah kurang dari satu dekade beroperasi, eksperimen penyelenggaraan koperasi beras tampaknya gagal.⁶²

[7.54] Koperasi biaya pemakaman juga berusaha memenuhi kebutuhan mendesak. Meskipun demikian, berbeda dari koperasi padi, mereka juga berusaha mengubah perilaku yang telah sangat mendarah daging dengan mencoba mengurangi jumlah pengeluaran pada pesta kematian. Besaran “Dana Pemakaman” ditentukan berdasarkan kontribusi padi tahunan wajib para anggota dan dari sumbangan dermawan lokal. Selain itu, orang Kristen dianjurkan untuk menyumbang hewan yang tidak disembelih dan sesuai dengan adat dibagikan dalam pesta kematian yang besar.⁶³ Pengambil manfaat utama dari Dana Pemakaman adalah mereka yang terlalu miskin untuk menyelenggarakan pesta berstandar minimal menurut adat. Di situ, seperti koperasi padi, arus pengeluaran jauh melebihi pemasukan, khususnya karena Dana Pemakaman sangat bergantung pada kemauan baik orang

kaya untuk menyubsidi orang miskin. Yang lebih serius lagi adalah usaha untuk secara serius memodifikasi pesta kematian itu sendiri menemui resistensi berat.

[7.55] Lusinan usaha koperasi yang sama gagal mengakar sebelum tahun 1930-an, beberapa bertahan hanya satu atau dua tahun. “Terlalu banyak uang dikumpulkan untuk pelayanan sosial hilang di gereja,” menurut seorang lelaki tua Toraja yang aktif sebagai penginjil pada masa itu. Hal itu jelas merupakan bencana karena dewan gereja biasanya memilih pejabatnya sebagai penanggung jawab kegiatan harian koperasi. “Pimpinan seringkali tidak jujur dan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi sehingga anggota koperasi kehilangan kepercayaan.”⁶⁴

[7.56] Organisasi yang miskin dan berbagai praktik yang tidak sehat atau korup hanyalah sebagian masalah. Koperasi, yang berlandaskan struktur horizontal dan egaliter, tidak berjalan dengan baik dalam masyarakat yang pada dasarnya berstratifikasi sosial. Mereka yang berkuasa terbiasa mengambil dana masyarakat untuk kepentingan pribadi; tindakan seperti itu dianggap sebagai hak prerogatif patron. Sebaliknya, mereka harus menyediakan layanan untuk mempertahankan privilese. Akan tetapi, yang diberi layanan mungkin kelompok yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Alih-alih memberi anggota koperasi akses yang sama, atau paling tidak proporsional, pada sumber daya koperasi, pimpinan usaha itu rupanya menganggap dana itu sebagai penghasilan tambahan pribadi.

[7.57] Satu pengecualian yang patut dicatat adalah Balo’ Toraja, sebuah koperasi simpan pinjam sekuler yang didirikan pada tahun 1941 oleh 15 orang pegawai pemerintah. Secara teknis, siapa pun yang berpendapatan tetap dapat menjadi anggota, tetapi tidak lebih dari dua persen anggota pertama yang merupakan pedagang dan petani. Simpanan anggota sebesar f25 menghambat hampir semua kalangan untuk bergabung, kecuali pegawai pemerintah dan pedagang besar, meskipun simpanan bulanan tidak harus lebih dari 10 sen. Pinjaman tidak boleh lebih dari f25 setiap tahun dan harus dibayar dalam sepuluh bulan dengan angsuran tetap, termasuk bunga tiga persen untuk sisa pokok pinjaman. Anggota Balo’ Toraja mungkin tidak lebih dari 100 orang sebelum Pendudukan Jepang, namun organisasi itu mampu bertahan. Keanggotaan yang terbatas pada pegawai pemerintah berpendidikan dengan pendapatan tetap merupakan landasan yang

aman bagi koperasi sederhana itu. Lagi pula, pimpinan Balo' Toraja yang cermat dan berdisiplin mampu menjaga kepercayaan anggotanya. Itulah alasan mereka bergabung dalam koperasi itu.⁶⁵

[7.58] Balo' Toraja didirikan oleh para guru dan pegawai pemerintah yang merupakan tokoh utama dalam upaya menstimulasi identitas etnis Toraja. Organisasi sekuler lain yang menarik, walaupun tidak bertahan lama, didirikan oleh K. Kadang, orang Toraja pertama yang jadi guru (murid van de Loosdrecht). Organisasi itu sangat jelas bernapaskan etnis. Koperasi Persaudaraan Bumiputera yang didirikan tahun 1933 di Rantepao, lahir dari situasi *malaise* yang makin parah di awal tahun 1930-an. Koperasi itu dirancang bagi konsumen perkotaan, yang menurut Kadang,

... dalam masa sulit ini ... harus mencari cara untuk meringankan [beban] kebutuhan sehari-hari kita, keperluan rumah tangga kita. Apabila sebagai kepala rumah tangga kita tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, kita kecewa dengan pekerjaan kita. Terus terang saja, kita masih bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan itu, bukan?

“Orang lain” tempat orang Toraja bergantung adalah orang Bugis dan Cina yang menguasai sistem perdagangan kota Rantepao dan Ma'kale. Hingga tahun 1930-an, masih sedikit orang Toraja yang tinggal di kedua kota itu. Dengan semakin banyak kaum terpelajar yang meninggalkan kampung untuk mencari pekerjaan di luar pertanian, sebuah kelompok baru orang Toraja terbentuk di kota. Mereka bergabung dengan kesadaran sendiri melawan para pedagang “asing” itu. Kesadaran itu diperkuat selama beberapa tahun oleh para misionaris Belanda yang berusaha membedakan domba dari kambing, sebagaimana adanya. Akibatnya, dalam kesadaran etnis orang Toraja terkandung semangat negatif kuat yang mirip dengan gerakan kesadaran etnis lain di Hindia Belanda:

Banyak di antara kita yang masih bergantung kepada *lintah darat*. Anda semua tahu bahwa lintah ini sangat berbahaya ketika mengisap darah, karena dia mengisap darah sampai kenyang. Oleh karena itu, kita benar-benar merasakan gigitannya. Kita juga tahu bahwa setelah kehilangan darah akhirnya kita jatuh sakit.

Seperti itulah kehidupan sebuah rumah tangga yang bergantung atau memercayakan nasib kepada orang asing. Bukankah mereka mendapatkan keuntungan yang jauh melebihi yang layak?... Milikilah kesadaran diri untuk menjadi anggota Koperasi supaya kebutuhan rumah tangga Anda tidak lagi bergantung kepada orang asing.⁶⁶

Tidak seperti sebagian besar konflik etnis yang melibatkan orang Cina di Hindia Belanda, ketegangan antara orang Toraja dan Cina tidaklah parah. Orang Cina

Universitas Indonesia

pekerja bangunan dan pemilik toko segera menikahi orang Toraja (biasanya yang berstatus rendah). Mereka bersedia menerima orang Toraja yang mereka anggap pekerja keras untuk magang. Kecenderungan orang Toraja mengumpulkan modal (dalam bentuk kerbau atau babi) merupakan ikatan lain. Karena alasan itu dan semakin meningkatnya sentimen anti-Bugis, khususnya di kalangan umat Kristen, cercaan Kadang tampaknya lebih diarahkan kepada para pedagang Bugis dibandingkan Cina. Yang pasti, jumlah orang Bugis di Ma'kale-Rantepao jauh lebih banyak, yaitu 2.100 orang, dibanding orang Cina yang hanya 88 orang pada tahun 1930.⁶⁷

[7.59] Koperasi Persaudaraan Bumiputera meninggalkan sedikit jejak bagi sejarawan untuk ditelusuri.⁶⁸ Koperasi itu bertahan sepanjang tahun 1938, saat kepemimpinan baru disebutkan dalam *Soelo* (obor), dan mungkin berlangsung hingga Pendudukan Jepang. Selama satu dekade penting dalam pembentukan kesadaran etnis Toraja, substansi koperasi itu lebih merupakan ungkapan nyata dari identitas Toraja daripada bentuk penolakan terhadap kendali perdagangan oleh orang non-Toraja.

Soelo

[7.60] Ungkapan perasaan identitas Toraja yang diorganisasi secara modern lambat laun mulai terbentuk pada awal tahun 1930-an di bawah bimbingan konservatif misi. Posisi Toraja yang terisolasi diperkuat oleh kebijakan misi dan pemerintah sehingga hanya sedikit orang Toraja yang menjalin kontak dengan dunia politik nasionalis yang bergolak di Jawa sebelum para nasionalis “radikal” dikekang dan dibuang. Secara umum, GZB mampu mengantisipasi perkembangan kesadaran politis di Ma'kale-Rantepao dan menyalurkannya ke arah yang tak membahayakan (bagi mereka).

[7.61] Peranan GZB dalam mendirikan penerbitan yang pertama, dan ternyata satu-satunya penerbitan Toraja sebelum tahun 1950, merupakan contoh soal. *Soelo* (obor) naik cetak pada pertengahan tahun 1932 sebagai terbitan bulanan dengan enam sampai delapan halaman yang mengetengahkan nilai-nilai Kristiani (GZB) melalui berbagai artikel berbahasa Melayu dan Tae'. J. Belksma, editor *Soelo* yang pertama, dengan ringkas mengungkapkan niat GZB untuk mengawasi

Universitas Indonesia

isi majalah ini dalam surat yang ia tulis dari Den Haaq kepada rekan-rekannya: “Terbitan ini tidak boleh dibiarkan jatuh bangkrut; dalam situasi apapun kita harus mempertahankan “majalah” itu dalam kendali kita.”⁶⁹

[7.62] Hanya sedikit tulisan kontroversial yang muncul dalam terbitan itu. *Soelo* secara teratur memuat tulisan dengan pesan religius dan puisi pendek yang ditulis oleh para penganjur Toraja, di samping komentar religius berkala dari editor atau rekannya. Artikel mengenai berbagai aspek budaya lokal atau tradisi lisan, yang sering kali ditulis dalam bahasa Tae’, jumlahnya cukup banyak. Editor menyisipkan sekelumit potongan berita dari “Hindia Timoer”, misalnya mengenai bagaimana depresi memengaruhi pendapatan pajak, peningkatan pemberhentian pekerja jalan kereta api di Jawa, dan penurunan pensiun para pejabat pemerintah. Berita dunia mencakup artikel mengenai kebangkitan agama Kristen di Jepang; pandangan positif mengenai undang-undang pelarangan perdagangan minuman keras di Amerika Serikat; pandangan emosional mengenai antikomunis Uni Soviet dengan acuan utama aktivitas “Anti-Kristus” di sana; dan perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Pada tahun 1935, oplah *Soelo* telah meningkat tiga kali lipat menjadi 2.100 eksemplar.⁷⁰

[7.63] Meskipun pengawasan editorialnya ketat, *Soelo* sesungguhnya menyediakan saluran untuk mengungkapkan kesadaran baru yang sedang terbentuk di kalangan pemuda terpelajar. Berbagai artikel yang mengangkat perlawanan yang dipimpin Pong Tiku, Ua Saruran, dan Bombing terhadap pendudukan Belanda di Toraja merupakan upaya awal untuk membangkitkan sejarah lisan dan mencetaknya. Meskipun para penulisnya tidak secara terbuka bersikap kritis terhadap “Kompeni”, gambaran hidup mengenai pembantaian lelaki, perempuan, dan anak-anak Toraja di Buntu Alla’ membawa sebuah pesan nyata. Izin editor untuk memuat artikel itu dapat berarti misi berhasrat menggugah kesadaran identitas Toraja dengan mengorbankan pemerintah.⁷¹

[7.64] *Soelo* merupakan sebuah forum untuk penajakan solidaritas dan partisipasi orang Toraja dalam berbagai bentuk modernitas intelek. Meskipun demikian, karena pada dasarnya merupakan organ bahasa daerah resmi GZB, *Soelo* tidak dan mungkin tidak dapat mengangkat topik mengenai hubungan Toraja dengan

gerakan nasionalis yang sedang bergolak di Jawa. Setelah mengabaikan topik itu selama dua setengah tahun, editor tiba-tiba mengumumkan pada akhir tahun 1934 bahwa Sukarno telah dibuang: “Ir. Soekarno, pemimpin para nasionalis, telah dijatuhi hukuman buang di Flores agar ketenteraman dan ketenangan Hindia tidak akan terusik.”⁷² Dua bulan kemudian, editor yang memberitakan pemindahan tempat pembuangan berusaha untuk mengurangi perhatian lokal kepada para nasionalis dengan menyampaikan informasi terbaru itu secara sambil lalu bahwa “Ir. Soekarno telah berangkat dari Bandung ke Timor ditemani istrinya dan tiga orang pembantu rumah tangganya. Tidak ada tanda-tanda bahwa rakyat memberi perhatian pada keberangkatannya.”⁷³

[7.65] Satu dari dua acuan lain aktivitas nasionalis muncul dalam sebuah artikel singkat yang mengumumkan penangkapan Hatta dan pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) lain pada 25 Februari 1934. Cerita itu selanjutnya menyatakan bahwa rumah Hatta dan kantor surat kabar *Daulat Rayat*-nya telah digeledah bersama 45 rumah lain di Batavia, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Padang, dan Fort de Kock – pesan yang cukup tegas bahwa keterlibatan dalam gerakan nasionalis merupakan hal yang serius.⁷⁴ Hampir setahun kemudian, para pembaca majalah mengetahui bahwa “Mochammad Hatta bersama beberapa rekannya akan diperintahkan tinggal di Boven Digul, Papua karena menyebarkan ajaran Komunis di Hindia-Belanda.”⁷⁵ Memang pesan itu masih tidak jelas, tetapi pengumuman tentang wafatnya Tjokroaminoto pada Desember 1934 menegaskan dengan lebih berani bahwa “Dia membentuk Partai Serikat Islam pada tahun 1912 dan setelah itu [cetak miring dari saya] diasingkan ke Banda.” Itu sebuah penyajian yang keliru dan buruk mengenai keterlibatannya yang lama dalam politik nasionalis bila dibanding dengan waktu yang singkat dalam penahanan.⁷⁶ Bagaimanapun, intinya sederhana dan tidak bergantung pada kecermatan historis: pembentukan partai adalah aktivitas yang membawa risiko.

[7.66] Gambaran suram *Soelo* mengenai politik nasionalis muncul pada saat beberapa figur pemimpin dalam elite Toraja yang sedang tumbuh mulai memihak kepada para pemimpin nasionalis di Jawa. Seorang guru bernama Albert Dendang, salah seorang Toraja yang pertama masuk Kristen, menulis surat kepada

para pemimpin Indonesia di Volksraad yang mengeluhkan pemerintahan Belanda di Ma'kale-Rantepao. Kesalahan dia satu-satunya adalah menceritakan hal itu kepada seorang Belanda bernama Saathof yang berpura-pura menaruh simpati, dan yang kemudian melaporkannya kepada misionaris GZB. Setelah itu, mereka menahannya dengan pengawasan ketat.⁷⁷ Reputasi Dendang sebagai penginjil yang berapi-api sama sekali tidak berarti untuk mengurangi kekhawatiran GZB bahwa guru lain akan mengikuti teladannya.

[7.67] Guru, seperti So'Inan dan Sampe Pandin, yang dikirim ke Jawa untuk melanjutkan sekolah, juga kembali dengan pandangan yang dipolitisasi mengenai masyarakat mereka yang menempatkan GZB sebagai musuh. Selain itu, lulusan lain dari *schakelschool* dan seorang lulusan HIS yang mengikuti OSVIA Makassar secara tegas menyampaikan kritik terhadap *status quo*. Singkatnya, suatu massa yang terdiri dari pemuda terpelajar, vokal, dan sadar politis muncul pada tahun 1934—1936 dan berusaha mengorganisasi diri mengikuti pemikiran modern.

Berbagai Asosiasi “Kemajuan Sosial”

[7.68] Karena pendidikan begitu penting bagi pertumbuhan identitas Toraja, tidaklah mengejutkan bila keempat organisasi untuk kemajuan sosial yang muncul pada tahun 1930-an semuanya berusaha meningkatkan kesempatan pendidikan bagi orang Toraja. Pada dasarnya, keempatnya tidaklah berbeda satu sama lain. Anggota mereka berasal dari kelompok lulusan sekolah sambungan dan sekolah lanjutan, sedangkan pemimpin organisasi itu selalu berasal dari lulusan sekolah sambungan. Anggota utamanya adalah guru dan pegawai di korps administratif “pribumi”, dengan beberapa pengecualian.

[7.69] Perhimpunan Boenga' Lalan (PBL) menata diri kembali di Rantepao setelah kebangkitannya yang singkat pada pertengahan tahun 1920-an ketika PBL diorganisasi untuk memperjuangkan pendidikan berbahasa Belanda. Kebangkitannya kembali pada tahun 1934 yang diprakarsai oleh beberapa guru Toraja senior mencerminkan perubahan yang telah menembus masyarakat Ma'kale-Rantepao selama dekade terdahulu. Organisasi itu, walaupun tidak terang-terangan Kristiani, beranggotakan orang berstatus sosial tinggi yang

merupakan buah pertama pendidikan misi. Pimpinannya berasal dari distrik di *Onderafdeeling* Rantepao; kedua pejabat utama pemerintah yang dipilih pada tahun 1934 berasal dari Sa'dan dan Tikala.⁷⁸ “Tujuan dan sasaran [Boenga' Lalan] tidak lain daripada keinginan memajukan orang dan tanah Toraja ... yang masih dalam kegelapan,” ungkap mereka dalam sebuah pengantar untuk para pembaca *Soelo*. Anggaran dasar organisasi menekankan pada “pembangunan persaudaraan di kalangan orang Toraja agar mereka bersatu” [bersehati], mengumpulkan beasiswa bagi murid yang kurang mampu menyelesaikan sekolahnya, dan “mencurahkan perhatian pada upaya memajukan kehidupan orang *tanah Toraja* [cetak miring dari saya].” Anggaran dasar PBL itu merupakan dokumen pertama tempat orang Toraja menyatakan diri sebagai orang “Toraja” dan memperkenalkan diri dengan sebuah wilayah geografis yang mereka sebut “tanah Toraja”.⁷⁹

[7.70] Sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar sepuluh pemuda Kristen lulusan sekolah sambungan dan sekolah lanjutan dan satu dari HIS Palopo mendirikan sebuah organisasi tandingan di Ma'kale dua tahun kemudian.⁸⁰ Perserikatan Toraja Kristen (PTC) serta-merta bersikap lebih religius dan militan daripada PBL, meskipun tujuan yang ditetapkan sama, yaitu untuk membentuk sebuah asosiasi yang akan “... menyatukan orang Toraja yang masih tercerai-berai” Basis persatuan itu adalah memperkuat identitas etnis, tetapi lebih khusus lagi membangun identitas etnis di kalangan orang Toraja *Kristen* yang tinggal di dalam dan di luar tanah Toraja. Anggota PTC ingin mempertahankan adat Toraja, namun sebaliknya juga ingin membasmi kebiasaan “... yang tidak sesuai dengan kemajuan dan standar umum kesusilaan.” Di samping itu, organisasi itu berjanji “... untuk mempertahankan hak dan kepentingan anggota serta orang Toraja secara umum berdasarkan keadilan dalam menghadapi masalah internal dan yang lain, baik di Toraja maupun di tempat lain”.⁸¹

[7.71] Walaupun berkiblat Kristiani yang kental, PTC mulai mencari jalan yang bebas dari campur tangan GZB. Dengan lebih memilih ibu kota administratif Ma'kale daripada Rantepao, tempat pusat kegiatan GZB, secara simbolis PTC menegaskan otonominya. Ketua pertamanya, Jacob Sampe Pongrante, orang

Toraja senior yang dididik di OSVIA, telah menjaga jarak dengan terpaksa terhadap misi. Orang tua Pongrante telah memilih Sekolah Pribumi Belanda Palopo sebagai tempatnya bersekolah daripada sekolah sambungan Ma'kale dengan warna misi yang kuat.⁸² Kapan dia menjadi Kristen dan diberi tambahan nama Jacob tidak jelas, namun dia tetaplah seorang Kristen yang berpikiran bebas dalam situasi yang mendukung kebergantungan. Anggota PTC lain yang berpengaruh, Sampe Pandin, dicurigai cenderung anti-GZB dan pro-nasionalis sejak menempuh pendidikan di Solo (Jawa Tengah).⁸³ Pandin telah menerima pendidikan menengah Belanda yang tertinggi kedua dari semua guru Toraja. Dia terpelajar dan memiliki pengetahuan luas mengenai perjuangan nasionalis yang muncul di Hindia yang nantinya akan memengaruhi situasi di Sulawesi Selatan, juga Ma'kale-Rantepao. Orang PTC lain yang kemudian muncul sebagai figur berpengaruh dalam politik Kristen, di antaranya adalah J. Linting (seorang penginjil dan kemudian menjadi pendeta dari Ma'kale) dan F.K. Sarungallo (seorang politisi Kristen terkemuka pada tingkat *onderafdeeling* pada tahun 1950-an). Dengan reputasi sebagai aktivis, J. Rapi', sekretaris pada Dinas Kehutanan dan juga ketua PTC yang kedua, menjadi buruan pejabat NICA setelah Pendudukan Jepang.

[7.72] Sebagian besar tokoh terkemuka PTC berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi. Satu orang yang bukan dari golongan itu adalah C. Rongre, lulusan sekolah lanjutan yang kemudian menjadi guru. Pemuda yang ambisius dan energik itu lahir dalam keluarga berstatus sosial sangat rendah di Sangalla' tempat kesadaran "darah" sangat kuat, tetapi dia berhasil masuk ke lingkaran dalam elite Kristen terpelajar. Pada tahun 1937, Rongre naik jabatan menjadi wakil ketua PTC dan, dengan perubahan nasib, menjadi orang Toraja pertama yang mengepalari pemerintah Tana Toraja setelah Kemerdekaan Indonesia.⁸⁴

[7.73] Catatan dari sebuah pertemuan PTC pada tahun 1937 menunjukkan bahwa organisasi itu berawal dari 60 anggota dan enam bulan kemudian, setelah hampir setahun didirikan, menjadi 102.⁸⁵ Anggota inti yang aktif, jika dinilai dari mereka yang rutin menghadiri pertemuan, mungkin berjumlah kurang dari setengahnya. Seperti Bunga' Lalan, salah satu aktivitas utama PTC adalah mengumpulkan

sumbangan untuk membiayai studi para pemuda yang kurang mampu. Akan tetapi, lebih dari Bunga' Lalan, PTC ikut serta dalam diskusi yang mempertemukan kegiatan “sosial” dan “politis” di bawah rubrik “kemajuan di Jawa.” PTC menghadapi tekanan publik dan pribadi misionaris untuk bergabung dengan Bunga' Lalan, dan reaksi hati-hati dari sebagian besar orang Toraja. “PTC dianggap seperti suatu penyakit,” kenang Sampe Pandin. “[orang Toraja] khawatir bahwa jika kita membicarakan politik, Belanda akan mengasingkan kita semua.”⁸⁶

[7.74] Menurut cerita orang sezaman, GZB berusaha keras mencegah orang Kristen terpelajar membaca surat kabar nasionalis. Para misionaris serta-merta menghina pemuda yang didapati mempelajari pustaka politis “yang tidak dapat dipercaya” walaupun itu legal. Sebuah komunitas baca yang hanya berjumlah ratusan orang memungkinkan misi untuk mengadakan pengawasan yang cukup efektif dalam membatasi pertumbuhan komunitas Toraja Kristen yang melek politik. Akan tetapi, anggota PTC yang pandai sesungguhnya menerima terbitan reguler *Bintang Timur*, yang disunting oleh seorang Batak yang populer di Toraja, Parada Harahap; *Suara Umum*, organ Budi Utomo dari Dr. Sutomo (bergabung dengan Parindra pada tahun 1935) yang memiliki daya tarik besar bagi anggota PTC dan sangat memengaruhi pemikiran mereka; dan *Suara Parindra*, penyambung lidah Parindra, sebuah koalisi organisasi nasionalis moderat yang terbentuk pada tahun 1935 yang lebih senang bekerja dalam kerangka kerja perwakilan terbatas yang ditawarkan Dewan kolonial, *Volksraad*, yang hanya memiliki otoritas penasihat. *Fikiran Rakyat*, mingguan Sukarno, diketahui beredar di kalangan pemuda sampai Sukarno diasingkan pada tahun 1934 walaupun media itu sangat disensor.⁸⁷

[7.75] Apa yang dapat kita simpulkan mengenai pengaruh nasionalis pada para pemuda Toraja? Dari sedikit publikasi yang beredar secara teratur, tampak bahwa panutan intelektual bagi pemuda Kristen yang paling sadar politik adalah kaum intelek Jawa moderat yang mencari kerja di lembaga perwakilan terbatas yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Minat nasionalis yang tumbuh di kalangan pemuda Kristen itu adalah rasa “tanggung jawab” yang ditunjukkan oleh Parindra Thamrin-Sutomo dari pertengahan sampai akhir tahun 1930-an, yaitu

menjadi kooperator yang dipertentangkan dengan nonkooperator, sebagaimana diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) Sukarno.⁸⁸

[7.76] Hal itu tidaklah berarti bahwa hubungan antara “kooperator” tersebut dengan orang Belanda setempat selalu lancar. Kecanggihan kaum elite Kristen terpelajar membawa mereka pada konflik terbuka dengan beberapa misionaris GZB yang bersikap lebih menggurui mereka. D.J. Van Dijk, khususnya, membuat berang para intelektual Toraja terkemuka, seperti Sampe Pandin dan So’ Inan, karena pendirian kolonialisnya yang kaku. Kedua lelaki itu, bersama seorang guru Manado bernama Rompas yang sejalan pemikirannya, memegang peran penting dalam pendirian sebuah sekolah mandiri berbahasa Belanda yang menyelipkan pandangan nasionalis dalam pengajarannya. Bunga’ Lalan dan PTC bersatu mendukung sekolah itu ketika beberapa misionaris GZB tampak berusaha mendiskreditkannya dengan alasan politis.

[7.77] Walaupun tidak loyal terhadap GZB atau pemerintah Hindia Belanda, elite Kristen muda mengakui perpaduan kepentingan kolektif di antara mereka. Mereka mungkin telah berselisih paham dengan orang Belanda mengenai orientasi pendidikan berbahasa Belanda dan kesewenang-wenangan GZB. Namun, solusi mereka tetap mendirikan lebih banyak sekolah Kristen berbahasa Belanda, bukan menolak seluruh sistem. Sebagai orang Toraja, mereka dapat memiliki satu visi dengan kalangan non-Kristiani sebagai satu suku bangsa yang mempunyai semangat untuk menempatkan diri sebagai kaum yang bermartabat di pulau itu, bahkan di Nusantara. Pandangan itulah, bukan pandangan nasionalis, yang dianggap menyatukan elite modern Toraja sehingga melemahkan nasionalisme Indonesia di Ma’kale-Rantepao.

[7.78] Puang Tallu Lembangna adalah orang pertama yang mengangkat isu otonomi terhadap Luwu segera setelah tentara Belanda menduduki dataran tinggi Sa’dan. Sementara itu, Puang Sangalla’ telah bekerja tanpa kenal lelah untuk memupuk isu itu. Jajaran *controleur* yang bersimpati sepanjang tahun 1920-an berkali-kali membuat rekomendasi mengenai otonomi Ma’kale-Rantepao atau, setidaknya, otonomi Ma’kale. Para informan Toraja mencari bukti historis yang substansial untuk menunjukkan bahwa klaim Luwu atas dataran tinggi Sa’dan

dahulu telah dinafikan karena kekuasaan kerajaan makin terkikis dan pemberi upeti satu demi satu menghilang. Pertimbangan politis mencegah Belanda untuk mengambil tindakan apa pun atas klaim itu karena datu Luwu dan pengikutnya tidak akan menghiraukan klaim itu. Prioritas pemerintah sedemikian rupa sehingga mempertahankan stabilitas lebih diutamakan oleh pemerintah daripada memperbaiki tindakan tidak adil yang mungkin terjadi dalam sejarahnya. Akibatnya, rekomendasi mengenai otonomi itu tidak dipedulikan di Makassar dan Batavia.

[7.79] Zaman telah berubah pada tahun 1936. Sekelompok pemuda Toraja Kristen yang bertekad, yang dididik dalam retorika misi untuk memajukan orang Toraja, mulai menangkap isu tersebut. “Kami mendirikan PTC dengan motivasi politis tersembunyi,” kenang ketua pertamanya. “Tujuan kami adalah memisahkan diri dari Luwu dan mendapatkan status yang sama.” Sasaran publik adalah kemajuan sosial, namun [demi niat kami yang sebenarnya] kami bahkan berusaha memengaruhi beberapa kepala distrik untuk bergabung dalam PTC.” Ketika ditanya mengenai sikap misi terhadap agenda tersembunyi mereka, ia menjawab bahwa misi diam-diam mendorong usulan pemisahan mereka dari Luwu.⁸⁹

[7.80] Beberapa orang dalam lingkungan GZB masih yakin bahwa Toraja ditakdirkan untuk berjaya. Pemikiran itu berakar dalam sejarah misi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, mungkin semula dipupuk oleh Adriani dan Kruyt yang berhasil membebaskan Poso dari kekuasaan Luwu pada tahun 1907. Setelah menjadi buah bibir para misionaris Belanda dari beberapa organisasi yang aktif menginjil penduduk dataran tinggi di daerah itu selama lebih dari tiga dekade, ide mengenai “Toraja Raya”– yang terdiri dari semua kelompok dataran tinggi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan – dirumuskan secara paling jelas dalam sebuah artikel *Alle den Volcke* pada tahun 1932. Penulisnya D. Saathof adalah pengganti kepala *schakelschool* yang sedang cuti. Saathof yang relatif baru dalam lingkungan itu menjelaskan kepada pembaca di Negeri Belanda apa yang telah direnungkan oleh para mantan misionaris:

Selama berabad-abad orang Muslim pesisir telah menjarah dan membunuh di tanah Toraja. Tak satu pun dan tak seorang pun yang aman dari ancaman orang Bugis. Orang Toraja tidak tanpa alasan membangun rumah mereka di puncak gunung yang tinggi!

Universitas Indonesia

Pemerintah Belanda mengakui klaim Luwu terhadap tanah Toraja. Daerah perburuan lama itu secara resmi diakuisisi oleh Luwu. Hal itu tampaknya tidak masuk akal. Akan lebih rasional apabila Pemerintah Belanda menghentikan secara radikal dominasi Luwu dan menempatkan tanah Toraja secara utuh langsung di bawah kekuasaan Belanda: orang Toraja dari dataran tinggi Sa'dan bersama orang Mamasa dan Poso. Kelompok etnis Toraja [*Toradja stamen*] dapat berkembang menjadi orang Toraja [*Toradja volk*] di bawah bimbingan Belanda. Orang Toraja pada akhirnya akan bersatu dalam Kekristenan.⁹⁰

[7.81] Seorang penginjil Toraja menggemakan pemikiran yang sama beberapa bulan kemudian dalam *Soelo*. Dengan membangkitkan ingatan akan seorang leluhur mitis Toraja, Patta La Bantang, ia memberi penghormatan kepada Pemerintah Belanda karena memulihkan tatanan, menyokong pendidikan, dan melaksanakan kehendak Allah untuk mendorong kesadaran etnis daripada kepentingan pribadi yang sempit. Dengan bersemangat dia menggambarkan bagaimana metode yang digunakan pemerintah telah membawa kemajuan pada tanah Toraja dan bagaimana “Dr. Bahasa (van der Veen) yang terhormat di Angin-Angin sedang menyusun beberapa hal yang menyangkut perkembangan Toraja” (mungkin mengacu pada kamus Toraja). Penginjil itu kemudian melanjutkan:

Karena itu, saya mengajak Anda semua orang Toraja, bangsaku, dan khususnya para kepala kampung dan kaum bangsawan, untuk bersatu dalam pikiran, saling mendukung, saling membantu, dan hidup sebagai saudara sehingga pada akhirnya nama kalian akan menjadi besar di Celebes. Yang pasti, sudah lama sebuah *Afdeeling* untuk bangsa ini telah siap ... [mengacu pada suatu kesatuan mitis yang pernah ada]. Semoga, jika Allah berkenan, kerajaan Patta La Bantang akan hidup kembali seperti sediakala berkat kasih Allah dalam Kristus, [dan] mungkin didirikan oleh mereka yang berkuasa, yakni bendera tiga warna [negeri Belanda]...⁹¹

[7.82] Setelah menjelaskan bahwa Jawa dibagi berdasarkan golongan etnis dan berbagai pertimbangan lain menjadi tiga provinsi dan masing-masing dibagi dalam beberapa Keresidenan, ia melanjutkan:

Jadi, ada juga berita bahwa Celebes akan dijadikan satu Provinsi yang dikenal dengan Provinsi Timur. Kita orang Toraja juga berharap dapat menjadi satu Keresidenan dalam Provinsi itu.⁹²

[7.83] Kesatuan etnis merupakan tema yang dapat mempersatukan pemuda Toraja terpelajar dari berbagai aliran politis. “Kemajuan” tidak dapat dicapai tanpa kekompakan etnis di bawah struktur administratif yang rapuh, yaitu *Onderafdeeling* Ma’kale-Rantepao. Namun, kesadaran etnis baru itu terutama dimiliki oleh pemuda yang telah menerima ideologi agama baru yang merupakan

Universitas Indonesia

ancaman inti tradisi budaya Toraja. Pendidikan dan agama akan menyelamatkan mereka dari apa yang mereka anggap warisan perpecahan dan kebiasaan boros orang Toraja. Kekristenan terutama dianggap dapat mempertahankan identitas Toraja sambil memupuk kebanggaan diri sendiri di antara mayoritas Muslim di wilayah itu:

Di samping pendidikan, Agamalah yang terutama menjadi akar “kemajuan” di dunia ini ... Lihatlah Timur, Barat, Utara, dan Selatan di dunia ini, bangsa mana yang mengungguli kemajuan dan keadaan orang Barat, baik dalam hal spiritual maupun material? ... Sangat jelas bahwa Kristus adalah fondasi kemajuan. Karena itu, bangsaku Toraja, terimalah fondasi itu sehingga namamu juga menjadi kebanggaan dan tidak hanya menjadi sasaran penghinaan oleh kaum Muslim: “orang Toraja memakai cawat, pembual, pemakan babi,” dan seterusnya. Belum pernahkah kamu mendengarnya? Jika belum, pergilah ke pesisir sebelah timur dan barat tanah kita atau [simaklah] sekelompok Muslim dan kamu pasti akan mendengar hinaan seperti itu apabila salah seorang dari kita melakukan kesalahan kecil, atau bahkan jika tidak bersalah, karena orang Toraja sangat rendah di mata mereka. Yang pasti, penghinaan itu ada dasarnya, karena sebelum [Belanda] memperluas kekuasaannya ke tanah kita Toraja, bangsa kita dibunuh atau diikat seperti binatang dan dijual ke seluruh daerah Bugis serta dicuri barang-barangnya.

Syukurlah Tuhan telah mengulurkan kasih-Nya, membawa damai di tanah kita [dengan] mengusir orang jahat yang siang malam mengganggu kita, mengganti dukacita dengan sukacita karena mereka [sic] meletakkan fondasi untuk kemajuan. ...⁹³

Catatan Akhir

¹ La Side Daeng Tapala, *Sejarah Kebangkitan Nasional di Sulawesi Selatan 1900-1942* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 249; Puang Palayukan, “The Autobiography of Puang Lasok Rinding the King of Sangalla”, As Palodang XII” (Naskah tidak diterbitkan yang disiapkan oleh Panitia Pelaksana upacara pemakaman puang, Sangalla’, Toraja, 1970.)

² Sarungu’, “Sejarah Pong Tiku,” hlm. 15.

³ M. Biuw, wawancara dengan penulis, Juni 1978, Rantepao.

⁴ Sampe Pandin, wawancara dengan penulis, 31 Mar. 1978, Ujung Pandang.

⁵ A.A. van de Loosdrecht, ADV, Feb. 1914, hlm. 13.

⁶ Boer, “Memorie van overgave,” hlm. 249.

⁷ Robert Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* (Den Haag: W. van Hoeve, 1970), hlm. 69–70.

⁸ H. van der Veen, wawancara dengan penulis, 25 Sept. 1977, Leusden-Zuid.

⁹ Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, hlm. 68.

¹⁰ Risalah, 47e Conferentie van Zendelingen, 25-27 en 29 Juni, 1931, Sangalla’/Barana’, AGZB no. 191, Arsip, Gereformeerde Zendingsbond, dalam Arsip Nasional Belanda, Cabang Utrecht.

-
- ¹¹ *AdV*, Mar. 1928, hlm. 30.
- ¹² Sekolah *landschap* menyediakan dua jam pelajaran agama Kristen setiap minggu dengan keikutsertaan suka rela.
- ¹³ *AdV*, Mar. 1922, hlm. 19-20; *AdV*, Juni 1923, hlm. 67-8.
- ¹⁴ *AdV*, Nov. 1926, hlm. 136-7.
- ¹⁵ S.D. Tallu Lembang, wawancara dengan penulis, 20 Feb. 1978, Rantepao.
- ¹⁶ Belksma dan P. Zijlstra, surat kepada Gubernur Sulawesi dan Protektorat, 30 Mei 1923, Rantepao, AGZB no. 312, Arsip, Gereformeerde Zendingbond, dalam Arsip Nasional Belanda, Cabang Utrecht.
- ¹⁷ *AdV*, Juni 1918, hlm. 43; J. Tanis, surat kepada Thomas Van den End, 1974, dalam koleksi arsip pribadi.
- ¹⁸ *AdV*, Sept. 1930, hlm. 127; S. Sambo, *Soelo*, 1937, hlm. 72.
- ¹⁹ Seinstra, “Memorie van overgave,” hlm. 95-6; Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, hlm. 20.
- ²⁰ Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, hlm. 67-8.
- ²¹ Nooy-Palm memperkenalkan bunga’ lalan sebagai “imam padi yang paling penting” (yang dikenal masyarakat sebagai *indo padang*). Nooy-Palm, *The Sa’dan-Toraja*, hlm. 279. Bunga’ lalan juga nama yang diberikan orang Toraja kepada konstelasi bintang gugus kartika yang digunakan untuk menentukan awal musim tanam. Van der Veen, *Woordenboek*, hlm. 83.
- ²² *AdV*, 1931, hlm. 53.
- ²³ P. Zijlstra dan J. Belksma, surat kepada Asisten Residen Nobeke, 3 Agustus 1921, Rantepao, AKUGT no. 30, Arsip, Komisi Gereja Toraja (AKUGT), Rantepao; J. Tanis, *AdV*, Feb. 1929, hlm. 21.
- ²⁴ Risalah rapat dengan Direktur Pendidikan dan Agama, 8 Mar. 1932, Rantepao, hlm. 3, AGZB no. 192, Arsip, Gereformeerde Zendingbond, dalam Arsip Nasional Belanda, Cabang Utrecht.
- ²⁵ Tanis, *AdV*, Feb. 1929, hlm. 21.
- ²⁶ Risalah, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933, Rantepao, AGZB no. 192, Arsip, Gereformeerde Zendingbond, dalam Arsip Nasional Belanda, Cabang Utrecht.
- ²⁷ Tanis, *AdV*, Feb. 1929, hlm. 22.
- ²⁸ Risalah, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933.
- ²⁹ Tanis, *AdV*, Apr. 1929, hlm. 47.
- ³⁰ Tanis, *AdV*, Jan. 1929, hlm. 7-8.
- ³¹ J. Sampe Pongrante, wawancara dengan penulis, 11 Mar. 1978, Rantepao.
- ³² S.D. Tallu Lembang, wawancara dengan penulis, 20 Feb. 1978, Rantepao; J. Linting, wawancara dengan penulis, 15 Mar. 1978, Rantepao.
- ³³ *AdV*, 1938, hlm. 167-8; Tanis, *AdV*, Feb. 1929, hlm. 23. Pada tahun 1926—1938 penerimaan siswa baru di sekolah sambungan meningkat dari 23 ke 42 orang setahun, dan total pendaftar pada

lima kelas yang ada mencapai 149 orang. Dari jumlah itu, 75% orang Toraja, 8% orang Ambon, 7% orang Manado, 6% orang Bugis, dan 2% berbagai kelompok etnis lain. Berdasarkan agamanya, 59% adalah Kristen, 31% Aluk To Dolo, dan 10% Muslim.

³⁴ Surat dari J. Tanis kepada Thomas van den End.

³⁵ *AdV*, 1938, hlm. 167-8.

³⁶ J. Sampe Pongrante, wawancara dengan penulis, 11 Mar. 1978.

³⁷ Paul van der Veur, *Education and Social Change in Colonial Indonesia* (Athens, OH: Ohio University, Center for International Studies, 1969), hlm. 9.

³⁸ Risalah, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933, Rantepao, AGZB no. 192, Arsip, Gereformeerde Zendingsbond, dalam Arsip Nasional Belanda, Cabang Utrecht.

³⁹ J. Tanis, "De Zending-Schakelschool te Ma'kale," dalam *Om te Gedenken*, ed. Gereformeerde Zendingsbond, hlm. 173-84 (Delft: A. van Barneveld Drukkerij Hoogland, 1938), hlm. 184.

⁴⁰ Risalah, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933.

⁴¹ Patrick Decavele, "[Catholic] Missionaries in Tanah Toraja," hlm. 16-9.

⁴² *AdV*, Jan. 1916, hlm. 3; *AdV*, Juni 1924, hlm. 64.

⁴³ *AdV*, Mar. 1918, hlm. 18.

⁴⁴ Thomas van den End, komunikasi pribadi, Mei 1978.

⁴⁵ *AdV*, Nov. 1915, hlm. 87; *AdV*, Juli 1919, hlm. 52; *AdV*, Juni 1924, hlm. 64.

⁴⁶ *AdV*, Jan. 1916, hlm. 5. Akan tetapi, sebuah laporan yang jelas dari kepala distrik Ranteballa menekankan bahwa guru di sana "belum pernah memukul atau memarahi siswa." Lihat *AdV*, Feb. 1918, hlm. 10.

⁴⁷ *AdV*, Apr. 1918, hlm. 27; *AdV*, Juni 1918, hlm. 44; Toby Volkman, "The Pigs," hlm. 66. Van de Loosdrecht melaporkan bahwa sekolah di Tondoklitak, yang diacu Volkman, ditutup karena lokasinya yang sangat dingin bagi guru yang tidak terbiasa dengan ketinggian seperti itu. Menurut laporan, sekolah itu kemudian dibuka kembali. Akan tetapi, ketika sekolah itu dibuka kembali pada awal tahun 1920-an, sudah tersedia lebih banyak guru asal Toraja yang jauh lebih terbiasa dengan suhu dingin daripada guru penutur bahasa Melayu.

⁴⁸ *AdV*, Juni 1918, hlm. 44.

⁴⁹ *AdV*, Juli 1919, hlm. 52.

⁵⁰ Lihat Tabel 3.1 pada bab ini.

⁵¹ H. van der Veen, wawancara dengan penulis, 16 Sept. 1977, Leusden-Zuid.

⁵² S.D. Tallu Lembang, wawancara dengan penulis, 20 Feb. 1978, Rantepao.

⁵³ Lihat Akin Rabibhadana, *The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period, 1782 – 1837* (Lembar Data No. 74, Program Asia Tenggara Universitas Cornell, Ithaca, 1969).

⁵⁴ Untuk pembahasan yang lebih terperinci mengenai kategori status sosial, lihat Bab 1.

⁵⁵ J. Linting, wawancara dengan penulis, 15 Mar. 1978, Rantepao.

-
- ⁵⁶ Kepala, bagian Statistik, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, wawancara dengan penulis, 13 Feb. 1978, Ma'kale.
- ⁵⁷ H. van der Veen, wawancara dengan penulis, 16 Sept. 1977, Leusden-Zuid; J. Linting, wawancara dengan penulis, 15 Maret 1978, Rantepao.
- ⁵⁸ Thomas Van den End, daftar stensilan guru asal Toraja yang dikumpulkan oleh Van den End and yang diacu olehnya sebagai "daftar besar guru," n.d.).
- ⁵⁹ Silakan mengacu ke Bab 1 untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai tingkatan status di Toraja.
- ⁶⁰ Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, hlm. 177—8.
- ⁶¹ Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite* (Singapore: Heinemann Educational Books [Asia] Ltd, 1979), hlm. 53 – 4.
- ⁶² J. Tappi, "Lumbung Jum'at Rembon," *Soelo* 67 (1937): 8.
- ⁶³ "Begrafenisfonds Ju'mat Rembon," *Soelo* 67 (1937): 8
- ⁶⁴ Ne' Kana, wawancara dengan penulis, 4 Agustus 1978, Batu Leleng (Toraja).
- ⁶⁵ J. Rapi', wawancara dengan penulis, 5 Juli 1978, Ma'kale.
- ⁶⁶ K. Kadang, "Cooperatie," *Soelo* 22 (1933): 4 – 5.
- ⁶⁷ *Volkstelling 1930, Deel V: Inheemsche bevolking van Borneo, Celebes, de Kleinen Sunda Eilanden, en de Molukken* (Batavia: Department van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1935), hlm. 29, 132.
- ⁶⁸ Kadang sendiri meninggal pada tahun 1978 sebelum saya dapat mewawancarainya. Dia menderita sakit keras selama beberapa bulan, sehingga akan sangat mengganggu apabila wawancara dilakukan.
- ⁶⁹ J. Belksma, surat untuk Konferensi para Zendeling, akhir tahun 1932, Den Haag, AKUGT no. 5, Arsip, Komisi Gereja Toraja (AKUGT), Rantepao.
- ⁷⁰ *Soelo* 30 (1934): 7.
- ⁷¹ Editor terbukti kurang mampu menoleransi kritik yang ditujukan kepada GZB. Satu-satunya artikel yang mengkritik secara tidak langsung yang saya temukan ditulis oleh seseorang yang hanya dikenal sebagai C.P. dari Rantepao. Artikel itu dianggap sebagai sebuah dialog rekaan antara dua orang yang bukan Toraja (menggunakan Tae') dan seorang pemuda Toraja yang duduk di tempat teduh di ujung sebuah jembatan menuju Buntao'. Kedua orang asing itu mengkritik persembahan dalam jumlah besar yang dituntut misi dari orang Kristen dan sekolah yang mahal serta salah arah yang tidak mengurus masalah mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dibandingkan dengan keuntungan yang dibawa Muhammadiyah ke Toraja: "bukankah 'kelompok etnis' bangsamu selalu mengekor, bernyanyi gembira dengan gaduhnya? Anda mencari dunia nyata tanpa menyadari bahwa diri Anda bagaikan seekor lalat yang menempel di punggung gajah." Artikel itu memicu peringatan keras editorial yang mengingatkan para pembaca Toraja seberapa banyak kontribusi Misi pada kemajuan Toraja, dan terutama peran baik kaum perempuan dalam kekristenan GZB yang bertolak belakang dengan Muhammadiyah. *Soelo* 57 (1936): 4 – 5.
- ⁷² *Soelo* 29 (1934): 5.
- ⁷³ *Soelo* 31 (1934): 6.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ *Soelo* 40 (1935): 8.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ “Notulen 57e Conferentie van Zendelingen,” 5 – 7 Nov. 1934, Angin-Angin, AGZB no. 192, Arsip, Gereformeerde Zendingbond, dalam Arsip Nasional Belanda, Cabang Utrecht.

⁷⁸ *Soelo* 61 (1936): 8. Salah satu diantaranya adalah K. Kadang dari Tikala, yang pernah menjadi salah satu juru bahasa van de Loosdrecht dan seorang keponakan Pong Maramba. Dia juga ikut mendirikan Koperasi Persaudaraan Bumiputera. Yang lain adalah M. Biuw, salah satu pemeluk Kristen pertama dan mungkin guru pertama dari distrik Sa’dan.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ J. Sampe Pongrante, wawancara dengan penulis, 11 Mar. 1978, Rantepao.

⁸¹ *Soelo* 62 (1936): 7. Huruf “P” pada PTC diubah dari ‘Perserikatan’ kemudian menjadi ‘Persatoean’. Perbedaannya tipis namun mencerminkan pergeseran cara berpikir dari organisasi sebagai satu jenis federasi bagian yang mandiri (orang Kristen Toraja dari sejumlah distrik) menjadi sebuah kesatuan saat identitas etnis diperkuat.

⁸² J. Sampe Pongrante, wawancara dengan penulis, 11 Mar. 1978, Rantepao.

⁸³ Sampe Pandin, wawancara dengan penulis, 22 Jan. 1978, Ujung Pandang.

⁸⁴ *Soelo* 75 (1937): 5 – 6.

⁸⁵ Sebuah cabang pembantu PTC dimulai di palopo pada tahun 1937 oleh seorang guru Toraja bernama A. Taula’bi’. Dikenal sebagai PPTC, kelompok itu pastilah berjumlah paling sedikit 15 orang untuk dapat memiliki status cabang. Lihat *Soelo* 67 (1937): 5 – 6 dan *Soelo* 71 (1937): 7.

⁸⁶ Sampe Pandin, wawancara dengan penulis, 31 Mar. 1978, Ujung Pandang.

⁸⁷ A. Rumpa, wawancara dengan penulis, 9 Mar. 1978, Ma’kale; C.T. Mislak, *Soelo* 70 (1937): 203.

⁸⁸ J. D. Legge, *Sukarno: A Political Biography* (New York: Praeger, 1972), hlm. 136.

⁸⁹ J. Sampe Pongrante, wawancara dengan penulis, 11 Mar. 1978, Rantepao. Sebuah peristiwa pada tahun 1935 mengungkapkan sejauh mana pejabat Belanda di Sulawesi Selatan mencurigai maksud misi untuk memupuk identitas etnis Toraja. Dalam kunjungan Gubernur Jenderal ke Toraja, ia menghadiri sebuah upacara di halaman gereja distrik Sangalla’. Puang Sangalla’ telah meminjamkan penutup kepala tradisional dari manik-manik (*kanda-aeros*) dan sebuah panji yang telah lama dikaitkan dengan citra puang Sangalla’ sebagai seorang keturunan Laki Padada, leluhur mitis kerajaan Sulawesi Selatan, sebagai dekorasi untuk kunjungan gubernur jenderal. Apakah puang telah menyadari itu sebagai saat yang tepat atau tidak untuk mencapai tujuannya tidaklah diketahui. Bagaimanapun juga, para pejabat yang menemani gubernur jenderal menjelaskan pengibar panji sebagai tanda sentimen antipemerintah dan simbol otonomi–pernyataan perlawanan terhadap otoritas Luwu. Gubernur jenderal, pada gilirannya, menyampaikan kejangkelannya terhadap Konsul Zending Batavia yang menganggap GZB di Ma’kale-Rantepao “memanfaatkan perasaan nasionalistis rakyat” untuk menaikkan popularitasnya sendiri. Dalam hal ini misionaris dilaporkan “tidak dapat berkata-kata.” Mereka menyangkal tuduhan dan menyalahkan misinterpretasi “pejabat Belanda [yang] merasakan besarnya tempat yang diberikan kepada misi dalam kunjungan Gubernur Jenderal.” Notulen 56e Conferentie van Zendelingen, 10–

12 Apr. 1935, Rantepao, AGZB no. 192, Arsip, Gereformeerde Zendingsbond, dalam Arsip Nasional Belanda, Cabang Utrecht.

⁹⁰ *Adv*, 1933, hlm. 55.

⁹¹ F. D. Tangjong, *Soelo* 22 (1933): 4.

⁹² *Ibid.* Sampe Pongrante menemukan sentimen Toraja Raya yang kuat berkembang di Mamasa ketika bertugas di sana dalam perpindahan dinas pertamanya sebagai pegawai pemerintah pada tahun 1936. Dia membantu mendirikan sebuah cabang Perserikatan Toraja Kristen di sana, dengan menggunakan kesempatan dari keinginan separatistis orang Mamasa. J. Sampe Pongrante, wawancara dengan penulis, 11 Mar. 1978, Rantepao.

⁹³ F. D. Tangjong, *Soelo* 22 (1933): 4 – 5.

BAB 4

TEKS SUMBER

EDUCATION, ORGANIZATION, AND ETHNIC CONSCIOUSNESS

[7.1] For some decades prior to 1906 and a decade or so after, Bugis was the language of literacy for the Torajan elite. Access to the written word was highly restricted, mainly to members of the elite with contacts in the lowlands. Some young Toraja lived for extended periods at the lowland courts or in the houses of lowland nobles where, along with their Bugis peers, they learned to read, write, and count under the guidance of a teacher.¹ As Bugis traders became more numerous in the highlands, some taught local headmen to read and write, spreading the Bugis language more widely among the Torajan elite.² Islamic teachers also played a role in spreading Bugis literacy, particularly in the eastern and southern portions of the highlands contiguous with Luwu and Duri.³

[7.2] The Dutch recognized this special function of the Bugis language in Ma'kale-Rantepao and provided Bugis translation of all legal documents issued there during the first decade or more of their rule.⁴ However, the abrupt entry of the Dutch into the highland world slowed and then reversed the penetration of Bugis, replacing it with Malay, the language of colonial rule throughout the East Indies. When Pong Maramba and Puang Taronkon met Antonie van de Loosdrecht on a voyage from Makassar to Palopo in 1913, they conversed with him in broken Malay, probably learned from Malay-speaking interpreters through whom the Dutch administrators worked after 1906.⁵ The use of Malay as an official language of the colonial government made elite adults trilingual in Bugis, Malay, and their local languages while Malay as the medium of instruction in schools for children of the elite made these children predominantly bilingual in Malay and their local languages. As a result, Toraja who spoke Malay became part of a linguistic and cultural universe stretching far beyond South Sulawesi, encompassing the whole Netherlands East Indies and the rest of the Malayo-Muslim world. The use of Malay shifted these Toraja out of the Bugis cultural

orbit into an East Indies world with different cultural models and institutions. In Ma'kale-Rantepao, the most important of these was the modern school.

Malay Medium Education

[7.3] The development of Malay-Medium schools in the Sa'dan highlands was governed by the interplay of government and mission policies, influenced by particular local and regional conditions. As elsewhere in the East Indies, the colonial administration first and foremost wanted to train a corps of functionaries to replace their unschooled predecessors in an increasingly rationalized local bureaucracy. In the highlands, where no body of officials comparable to the Javanese aristocratic governing class (*priyayi*) had previously existed, the Dutch were creating the region's first interconnecting, overarching administration. It was primarily toward the sons of the elite that the Dutch East Indies government directed its educational opportunities to staff this new administration.

[7.4] In principle, each onderafdeeling town in South Sulawesi had at least one government primary school, popularly known by a variety of names. The governor authorized construction of one school each for the operating within a year.⁶ These *landschap* or regional schools, as they were usually called there, were five-year schools officially named Second Class Native Schools. Being "Native" meant that the teaching medium was Malay as opposed to Dutch, which in the early twentieth century was reserved for European children and a few privileged indigenous persons who were permitted to cross the language bar. "Second Class" distinguished them from the First Class schools established in Java for children of *priyayi* in the late nineteenth century which were later phased out.⁷ But "Second Class," at least in its English connotation, also betrayed the place of these Malay-language schools in the educational hierarchy of the Netherlands East Indies where the medium carried a distinct message about status.

[7.5] Dutch authorities in Ma'kale-Rantepao tried to restrict attendance at these two schools to the children of headmen. Particularly in the early years of schools, however, headmen sometimes substituted their dependents' children under the names of their own children, afraid that those who graduated would be sent from

the highlands into the military service of the colonial government. It is hard to gauge the extent to which a few celebrated cases of low-status children sneaking through a crack in the schoolhouse door have inflated recollections about how commonly this occurred. One finds it hard to believe that low-status children could have perserved under the treatment they must have received from their supposed peers, unless the whole exercise in deception was carried out to unimaginable lengths. Some nevertheless did succeed, going on to hold positions in teaching or the colonial administration. When their status became known, however, they were transferred to work outside Ma'kale-Rantepao.⁸

[7.6] The need to educate and staff an onderafdeeling bureaucracy consisting of some 200 positions was well within the capacity of the two landschap schools. However, by 1909 the colonial administration was expected to give more attention to general “native” welfare than it had before then. The Ethical Policy, which promulgated a plan to give increased attention to providing social services in Dutch colonies, emphasized reaching beyond the elite to extend a basic education to the general village population. This meant that some attention had to be paid to establishing village primary schools on the model of the three-year village schools (*volkschool*) founded in Java in 1907.⁹

[7.7] The “ethical” milieu in Batavia that favored extending village education throughout the East Indies coincided with concerns emanating from the Dutch administration in South Sulawesi that Islam was spreading to the highlands. We have seen in chapters 5 and 6 how this latter concern induced the government to invite missionaries to the Sa'dan highlands who in turn founded village schools that the government subsidized. Thus, a new tier of schools developed to supplement the narrowly circumscribed landschap school – the mission village school (*zendingsvolkschool*). These schools were supported by the GZB but subsidized by five per cent of the government revenues collected in Ma'kale-Rantepao, amounting to some f12,000 annually by the 1920s. In 1931, this subsidy was ended in favor of a monthly tuition of ten Dutch cents that was to be collected from each student by the teacher.¹⁰

[7.8] Village school education expanded as rapidly as mission resources would permit, for the mission viewed education as one of its most effective means of conversion. Most of the impetus for setting up new schools came from the missionaries themselves in the first decade of village education. However by 1926, the local demand for places in existing schools outstripped the supply, and for the first time students were turned away because of filled schools.¹¹ Some 11 per cent of all school age children attended village schools that year. This percentage grew to 14 per cent in 1939. (See Table 4.1)

[7.9] The politics of religion figures heavily in shaping the expansion of Torajan education in the 1920s. The missionaries sought to restore the Netherlands East Indies government's confidence in the GZB's ability to assume control of all primary-level education which had been shaken by the 1917 rebellion. The landschap schools in Ma'kale and Rantepao, the only two secular schools in these onderafdeeling, remained symbols of impiety even if they were largely staffed by Christian Malay-speakers. The litmus test for acceptability by the mission was religious education which a neutral school, by definition, could not provide.¹²

[7.10] Table 4.1

Growth of Education in Ma'kale-Rantepao, 1913 to 1939

Year	Population	Number of School-Age Children (est.) ^e	Actual Number of Students	% of School-age Population
1913	123,000 ^a	24,600	200 ^f	1
1914	123,000	24,600	1,000 ^g	4
1926	138,000 ^b	27,600	3,000 ^h	11
1930	184,000 ^c	36,800	3,800 ⁱ	10
1939	189,000 ^d	37,450	5,300 ^f	14

Notes:
^a Breedveldt Boer, "Memorie van overgave," p.88.
^b H. T. Lanting, "Memorie van overgave," pp. 47 – 51.
^c *Volkstelling 1930, Deel V*, p. 30.
^d G.R. Seinstra, "Memorie van overgave," p. 6
^e Based upon formula the Dutch used in the Netherlands East Indies to calculate the number of school-aged children: school-age children equal 20 per cent of population. The calculation was as

follows: 3 of every 5 people are children, and 1 of every 3 children is school age, thus 20 per cent of the population is school age.

^f Estimated total of the two landschap schools and few village schools opened by the Indies Protestant Church.

^g *AdV*, Nov. 1914, p.94.

^h *AdV*, Mar. 1928, p.30.

ⁱ *AdV*, Jul. 1931, p. 91; *AdV*, Jul. 1933.

^j Projected from 1937 total of 5,000 (*AdV* 1937, pp. 87-8) with addition of three schools in 1938-9 (G. R. Seinstra, "Memorie van overgave," p. 95).

[7.11] Between 1920 and 1924, the provincial government negotiated a series of agreements with the GZB that signified increased support for mission education in Ma'kale-Rantepao. Teacher training courses (in lieu of a teacher's school) were taught at the mission station in Barana and these received government subsidies beginning in 1920. Two years later, the governor agreed to place only Christian teachers in the two secular schools and responded positively to GZB suggestions that these schools be converted to continuing schools (*vervolgschool*). By this formula, Grades 1 to 3 would be administered by the mission while Grades 4 and 5 would be administered by the government.¹³

[7.12] Malay stream education was a cul-de-sac, designed to provide only the rudiments of primary instruction and to offer no path to secondary education. The five-year course at the landschap school was terminal as was the three-year course at the village school, except for those children of the elite who transferred to the landschap school for their final two years.

[7.13] After the base for village primary education had been laid, many more students than could be accommodated by the landschap school sought to go on for a fourth and fifth year. A five-year certificate opened the way to a career teaching in the village school system, a job that carried with it a good salary and prestige. In 1925, the mission opened two continuing schools that offered an equivalent of the last two years of the Second Class Native School education.¹⁴ The main differences between the Second Class Native Schools and the continuing schools were that the latter included religious instruction and eliminated the outright status restrictions, theoretically opening the schools to anyone with sufficient ability and the means to pay tuition.¹⁵ In reality the situation was more complex. Children of

the elite who lived far from the towns were often reluctant to attend the landschap school because there were no dormitory facilities. This resulted in children from lower-status families who lived near town filling openings that by design should have gone to elite children in more remote areas. The continuing schools, since they provided dormitories, supplied more opportunities to children of the elite than their more egalitarian design suggests should have been the case.¹⁶ In sum, while the mission was more willing than the government to overlook the low social status of a school applicant, it was always anxious to accommodate the children of the elite.¹⁷

[7.14] From their inception the continuing schools were able to absorb only a fraction of students graduating from village schools who were recommended for further study. In 1928, of 295 students recommended to continue, only 55 entered Class 1 of the Rantepao vervolgschool. Ten years later the number of students entering vervolgschool had nearly tripled to 150, during which time village school enrollments only increased by two-thirds.¹⁸ However, while a village school graduate had a considerably better chance to go on for two more years of education in 1937, employment opportunities for continuing school graduates declined sharply through the 1930s. Teaching positions were growing at a slower rate than the pool of graduates from which candidates for the teacher training courses were drawn. (See Guru section in this chapter.) However, some employment possibilities remained for evangelists hired and trained by the mission. Makassar, Pare-Pare, and Palopo offered opportunities in the police force to a number of continuing school graduates, while others managed to find niches elsewhere in the lower echelons of the colonial service, but these opportunities were also decreasing under the effects of the Great Depression.

[7.15] With no further opportunities open to them, an increasing number of continuing school graduates returned to their kampung without employment befitting their newly acquired educational status. Here they were misfits, often not willing to farm but not equipped to engage in trade either. These graduates found themselves in a position similar to the “dissatisfied group of semi-intellectuals” in Java, about which Robert Van Niel has written. However, unlike their Javanese

counterparts who contributed to the formation of a nationalist movement in Java¹⁹ Torajan graduates did not have a great political impact in Ma'kale-Rantepao due in part to the relatively late start of colonial schooling, the small number of the continuing schools, the low concentration of these semi-intellectuals in the region, and the safety valve of out-migration to the lowlands. Also, much dissatisfaction with the Dutch was deflected by the Toraja's growing ethnic consciousness of being islands surrounded by a sea of Bugis.

Dutch-medium Education

[7.16] Access to Dutch-language education vastly widened the horizons of a student's career aspirations. Unlike the closed Malay-language system, which abruptly ended at the fifth grade, the Dutch-medium schools in theory could carry a student through to one of the three institutions of higher learning in the Indies begun after 1913, or, exceptionally, to a university in the Netherlands. It was the rare, well-born "Indonesian" who attained access to higher education in the Indies (and much less often in the Netherlands), but one did not have to go so far to be among the educated elite in the Netherlands East Indies; a secondary education put one in a select enough group.

[7.17] Once the Netherlands East Indies government opened the European Primary Schools (ELS) to "Indonesians" in 1903, many well-off parents sought to place their children in these schools as the surest route to a good position in the colonial service. The European system was later closed to them with the rationale that it was being swamped by indigenous students, and a parallel system of Dutch Native Schools (HIS) was established in 1914 to accommodate the growing desire for a Dutch education.²⁰ This was a seven-year course of instruction that provided the equivalent of an ELS education, a rigorous curriculum that was notches above the present-day American elementary school education, even with the addition of junior high school.

[7.18] In Ma'kale-Rantepao, Torajan parents began to exert pressure for Dutch education by the early 1920s. The first modern organization, the Bunga' Lalan (the one who leads the way),²¹ grew out of this demand and appears to have been

composed of a broad coalition including the traditional elite, traders (probably Bugis and Chinese), and a nascent modern elite composed mainly by teachers.²² The mission quickly got behind the demand for Dutch education, lobbying to have a Dutch Native School opened in Ma'kale-Rantepao. A race was on with Palopo, which as the afdeeling capital had already received permission to open an HIS but had run into difficulty finding a suitable Dutch-speaking instructor. This delay bought some time for the mission to try to convince Makassar that despite the HIS in nearby Palopo (or, perhaps, because of it), another HIS for Ma'kale-Rantepao was vital.²³

[7.19] The mission argued that Dutch interests would be best served by continuing the policy initiated by Governor Couver in 1924 to encourage the autonomy of the Torajan highlands from the Luwu lowlands.²⁴ If indeed Ma'kale-Rantepao was to be preserved as a non-Islamic buffer, it must have its own schools system:

Our Torajan youths should not be forced to go to the Muslim coast to spend long years under Islamic influence, perhaps converting to that religion themselves and later returning to exert a bad influence on the Torajan people.²⁵

[7.20] But why, then, a Dutch-language school? The argument was mainly reactive. With the growing popularity of Dutch education among the elite, they would send their children wherever necessary to get it. If this meant to the Islamic lowlands or to Catholic schools in Java, so be it. Thus, the mission saw the provision of Dutch language education as one of its vital concerns.²⁶

[7.21] Not only did the campaign for a Dutch-medium school in Ma'kale-Rantepao succeed, but for a short time it functioned as the only Dutch-medium school in afdeeling Luwu, surely a bitter pill for the datu to swallow. Despite the fact that the Palopo HIS had been built even before Ma'kale applied for a Dutch-language school, the latter managed to sign a qualified teacher before Palopo could.²⁷ And indeed, when the Netherlands East Indies government retrenched its social services in the early 1930s, the Palopo HIS was closed while the Ma'kale school managed to survive.²⁸

[7.22] The Ma'kale school was transformed from an HIS to a link school (*schakelschool*),²⁹ designed as its name suggests to link the Malay-medium

stream with the Dutch-medium stream of education by enabling qualified Malay-medium students to acquire the Dutch language necessary to continue in the Dutch-medium stream. Compared to the HIS, the link school was less oriented toward the children of the elite.³⁰ Tuition expenses were high by the standards of the day, (f1.50 per month), but the f1,000 minimum family income necessary to qualify for admission to an HIS did not apply to link schools.³¹ It better fit the ideal of those within the GZB who favored extending educational opportunity beyond the privileged sector of Torajan society while disappointing Toraja and members of the GZB who wanted social mobility to remain the preserve of the elite.

[7.23] In practice, the link school was hardly egalitarian in its admission policy. While the mission was not as strict as the government in examining family status, it still strongly favored the children of the elite. Exceptions were made mainly for the children of teachers, whose bloodlines were ignored, and the offspring of those who had slipped through the status screen in the early years.³² Yet with only 23 to 45 graduates of the village schools admitted to the link school each year, the number could be easily filled with the children of the elite.³³ The former head of the link school reflected on this admission policy in a letter written in 1974:

Only the upper layer of the society obtained a good education. In the villages any teacher from a lower social level had difficulties. The elite did not want to hear the confession of faith, for example, led by one of their *kaunan*. Because of that, students were taken from the upper layer as much possible, just as in Minahasa (North Sulawesi) and Ambon.³⁴

[7.24] Certainly this is not all there was to it. Overall, the Dutch showed little desire to disturb the social layers of Indies societies and generally tried to preserve the existing indigenous hierarchy and insert themselves at the top because they realized that colonial rule was easier to maintain if indigenous leaders did not feel their status threatened by the lower orders. The mission in Toraja had conducted an experiment in social “revolution” and rejected it with the death of van de Loosdrecht, and this had obvious implications for mission educational policy.

[7.25] Graduates of the five-year course at the link school faced stiff competition to go on for further education. The largest portion of those continuing went to the School for More Extended Lower Education (MULO) in Makassar for three more

years of Dutch-medium coursework. However, no more than five students from Ma'kale-Rantepao were admitted annually to the MULO. A few each year went on to the School of Commerce (*Handelschool*) in Makassar or Malang (East Java) where they studied administration and bookkeeping. Another two students were usually placed at the Agricultural School in Malang or Bogor (West Java) to pursue an agronomy specialization. The few graduating girls who were able to go on often attended the Christian Home Economics Schools in Yogyakarta (Central Java).³⁵

[7.26] The most prized appointment for a link school graduate was to the School for Training Native Officials (OSVIA) in Makassar. The Makassar OSVIA admitted only 20 students annually from the entire eastern archipelago, according to an early Torajan trainee. Five of these 20 places were allotted to South Sulawesi, with Ma'kale-Rantepao generally receiving one. Within these allotments some flexibility existed so that if one region could not provide enough qualified candidates those positions were opened to persons from elsewhere. In periods of declining demand for indigenous administrators, the lowland portions of South Sulawesi appear to have taken priority over the highlands. However, with an abundance of qualified link school graduates, Toraja were available to fill places forfeited by regions with less well-developed educational systems whose elite were slower in responding to education as the new road to obtain status.³⁶

[7.27] The official Netherlands East Indies policy toward Dutch-medium education soon returned to a position little advanced beyond the days preceding the Ethical Policy. While the main purpose had been to fill positions in the indigenous administration, Dutch education expanded in the 1920s to a point where substantial numbers of graduates could not find opportunities in government service. With retrenchment of government services during the Great Depression in the 1930s, the need for Dutch-speaking "native" officials declined, ending the major rationale for Dutch-medium education in the first place. Moreover, the mounting voices of the nationalist movement often rose most emphatically from many who had received a Dutch education. Rising unemployment, mixed with a Dutch-medium educational system that was overly

extended, would produce an “educated proletariat” with explosive potential, or so the thinking ran.³⁷ As a result, the Ministry of Education and Religion (O. and E.) exerted pressure to throttle back on Dutch-medium schools while trying to resuscitate interest in vernacular education.

[7.28] The first waves of government austerity coupled with government misgivings about Dutch-medium education broke upon Ma’kale-Rantepao in 1932. The Director of the O. and E. ordered the progressive withdrawal of funds from the link school until by 1936 it would receive no further government subsidies. The O. and E. proposed to reduce the link school to a Malay-medium *vervolg*school in which a modicum of Dutch would be taught, thus defeating the intended purpose of the school as a conduit to higher all-Dutch education. This school would have received a small subsidy since it supported the O. and E.’s design to correct the problem of “too many Dutch speakers [being] turned out.”³⁸

[7.29] The government’s planned retrenchment of Dutch-medium education conflicted with a rising demand from Toraja for Dutch education. Indeed throughout the 1930s, the mission expanded the capacity of the link school, with classes by 1937 having doubled in size over those in 1926. This still meant that only 40 students a year were admitted to Level One, with many more than that wanting to attend. In the face of such interest, the mission was unlikely to abandon one of its most effective means of reaching the elite. It therefore rejected the O. and E. proposal and decided to continue the link school without government subsidy if necessary. The final settlement preserved the school and included a much-reduced subsidy.³⁹

[7.30] The argument used in 1933 to save the link school differed markedly from that used by the GZB to secure the school less than a decade before. This argument reflected the mission’s growing confidence that the Torajan buffer against Islam was firming up, but the mission seemed all too eager to identify a new external enemy:

The Protestan mission must keep Dutch-medium education in its own hands or else Rome [the Catholic mission] will attend to it. And now that the HIS in Palopo is closed, application [for the Ma’kale Link School] are arriving from the coastal region,

Universitas Indonesia

so that a favorable influence on the children of prominent Mohammedans from the coast is feasible.⁴⁰

Indeed, objectively the expansion of Islam into the Sa'dan highlands was a diminishing probability. Substantial conversion to Christianity had begun, a system of mission schools was firmly established and growing despite the general malaise that was reducing the number of schools in the Indies as a whole, and Torajan ethnic consciousness was rising.

[7.31] While the Protestant mission may have seen the imminent arrival of the Catholic mission in Ma'kale-Rantepao as a threat, the impending rivalry of the two missions was beneficial for Torajan education. The Catholic mission, known by the Dutch term, *missie*, so as to distinguish it from its Protestant equivalent, *zending*, emphasized education as a conversion strategy at least as much as the Protestant mission did. Having received permission to proselytize in the highlands in 1937, only after having overcome the official reluctance of the Netherlands Indies government to permit mission competition in the Outer Islands, the *missie* felt more pressed to make up for lost time. The first missionaries were teachers from Makassar who opened only three village schools and continuing school in the half-decade before the Japanese Occupation.⁴¹ The *missie*'s most substantial contribution, however, was in forcing the Protestant mission to become more responsive to Torajan demands for Dutch-medium education than it otherwise would have been.

Guru

[7.32] Until a Torajan cadre of teachers could be trained, the schools in Ma'kale-Rantepao depended on outsiders to staff them. Locating and hiring a European to teach in Indies schools was always an expensive and time-consuming proposition, so ideally indigenous teachers were used whenever possible. And since the majority of teachers were recruited to teach in the Malay-medium schools, few Dutch were required in any case. In the Malay-medium system, the role of Dutch teachers was limited to teacher training, supervision, and creating teaching

Universitas Indonesia

materials. In the Dutch-medium system their numbers declined in proportion to indigenous teachers as more of the latter became available. Particularly as administrative austerity measures went into effect, it became more desirable to hire indigenous teachers since they received much lower salaries than their Dutch counterparts.

[7.33] The largest pools of educated persons were in Java, where Dutch Native Schools were begun in 1900, and in those Outer Islands regions where Protestant missions had entrenched themselves by 1875, chiefly Ambon, Minahasa, Timor, and the Sangir-Talaud islands east of Minahasa. Perhaps because the mission in Tapanuli was German, Bataks were not often used as teachers in the eastern archipelago though they often filled positions in the administrative joint between lower European officials and local elites. The Dutch tended to view these ethnic minorities as more pliable than the Javanese, Sundanese, and other large (or small) Islamic groups.

[7.34] In Ma'kale-Rantepao, Minahasans and Ambonese filled most teaching positions until the mid-1920s.⁴² Even in the supposedly secular landschap schools, few if any Muslims received teaching positions. For the most part Christians taught in the government schools and did little to hide their desire to have their students become Christians as well. For its part, the government did little to encourage religious pluralism in the face of steady mission pressure to control as much as possible of the educational system in Ma'kale-Rantepao.

[7.35] From the outset, Malay-speaking teachers were hired for a dual role: teaching and evangelizing. The two went hand in hand in the GZB view of education where schooling was a means to religious and educational ends. Considerable friction developed between the Dutch missionaries and Malay-speaking teachers over what was the proper mix of duties, but there is no record of any teacher being dismissed for over-emphasizing his religious as opposed to secular educational role. Reluctant evangelists, however, were dismissed on several occasions.⁴³

[7.36] The difficulties of Malay speakers in the Torajan and the Dutch community were more complex than that, however. They seem to have felt ambivalent about their position in Ma'kale-Rantepao, an isolated posting among persons whom they considered distinctly inferior. They saw themselves as urban persons who were most at home, if at home they ever were, in the two modest onderafdeeling towns. Except for the fortunate few who taught in town schools, they were expected to live in kampung near their schools. Yet because the school and the teacher's houses were often built near the market some distance from the kampung proper, they were physically as well as culturally isolated from Toraja.

[7.37] Their feelings emerged in condescending jokes about the Toraja language, their dress, and their seeming obsession with death feasts and cockfights. Even when among the Dutch missionaries, who disapproved Malay speakers' abusive comments about Toraja, the latter could often not contain their remarks. In one instance at a conference of teachers and missionaries, a Minahasan doodled a picture of the Torajan loincloth and entitled it "the Torajan necktie," which cost him his job.⁴⁴

[7.38] The feeling manifested itself in other ways. Most Malay speakers showed little inclination to learn Tae' to augment Malay as a language of instruction in the village schools. The use of Tae' made some inroads under the persistent supervision of van de Loosdrecht from 1914 to 1917, but the teachers' resistance coupled with a total turnover of the teaching staff after the attempted rebellion in 1917 impeded extensive use of Tae' until the mid-1920s, by which time most teachers were Toraja.⁴⁵

[7.39] Frequently, Malay-speaking teachers resorted to corporal punishment in their schools.⁴⁶ The beatings upset Torajan parents, who generally avoided striking their children at all costs and often earned a rebuke from their supervising missionary. In a few cases, teachers were dismissed for persistently using corporal punishment in the classroom and, in one case reported by Volkman, angry parents drove the Minahasan teacher from their village after he beat a child to death.⁴⁷

[7.40] To the extent the missionaries tried to explain these incidents, they saw the teachers as carrying the spare-the-rod-and-spoil-the-child philosophy a bit far.⁴⁸ They did not see – or left no evidence that they did – the tenuous relationship of the Malay-speaking teacher to Torajan society. Teachers were caught between their desire to earn a good living and their disdain for living among persons they considered less civilized than themselves. Their wives often wrote letters to their families back home complaining about the deprivations of life in the highlands. They feared for their security and that of their families after the van de Loosdrecht killing, which simply worsened their relationships with Toraja:

The gurus' wives die a thousand deaths if their husbands must enter the kampung, and with all the letters coming from family urging them to abandon that miserable untrustworthy people, they are pressured into leaving us.⁴⁹

That fear certainly diminished after 1917, but a certain alienation no doubt hung on.

[7.41] To some degree that alienation was redirected toward the missionaries in the 1920s and 1930s, especially with the growth of nationalism in Java that spread through publications and by the mouths of those who studied there. The homelands of Ambonese and Minahasans were not hotbeds of nationalism. On the contrary, most troops intended to crush these movements if necessary were drawn from there. Yet these Malay speakers were more in touch with other parts of Indies through travel and correspondence, and they were part of a small but growing group of literates who followed the nationalist press, which, after all, included some exceedingly moderate editors. The Malay speakers' wider orientation kept them better informed and less in awe of the missionaries than their average Torajan counterparts in the 1920s and early 1930s. Through them, or more precisely, through the small number of active nationalists among the declining percentage of the teaching population that were Malay-speakers by the 1930s (then 25 per cent), Torajan teachers received their first lessons in nationalism.

[7.42] The opening of a teacher-training course near Rantepao in 1917 marked the beginning of a rapid change in the proportion of Torajan to Malay-speaking teachers. For every one Torajan teacher in 1915 there were ten Malay-speakers.

Universitas Indonesia

By 1923, the proportion of Toraja to Malay-speaker had risen to nine to seven, and by 1930 it had grown to three to one, where it stabilized until the Japanese Occupation.⁵⁰

[7.43] There can be little doubt that the main benefactors of educational opportunity in Ma’kale-Rantepao were members of the elite. As we have seen, both the government and the mission applied status standards in selecting students for schools at all levels, and generally the higher the level the more strictly these standards were adhered to. In principle, the mission was more willing to try to bend status restrictions than was the government, but when it ran up against elite reaction to a loosening of standards, it generally backed off or sought a non-confrontational solution. Between 1930 and 1942, the mission tried to admit kaunan to the teacher’s training course at Barana, but it was ultimately forced to send these graduates to teaching posts outside Ma’kale-Rantepao, which discouraged the mission from admitting low-status people.⁵¹ The high tuition charge for the teacher’s training course (*f*2.50 per month), stands as a symbol of just which status groups the mission actually screened out, whatever its stated good intentions to the contrary.⁵²

[7.44] Even more than the general school population, teachers came from the elite. That said, however, the matter quickly becomes more complex. The elite in Toraja, as elsewhere, was itself subtly gradated. It becomes exceedingly difficult to subdivide the elite in an analytically satisfying way, for it does not supply its own easily visible demarcations, as the Thai system of *sakdina* (status points) does, for instance.⁵³ One is forced to use such expressions as “high,” “middle,” and “low” elite in trying to locate the position of a given person within the broader status categories that were, and to some extent still are, commonly used in Toraja. This is further complicated by the different number of major status categories that are used in the north and south. In Rantepao there are three while in Ma’kale there are four. The top elite category in Rantepao is known as tomakaka while in Ma’kale there is one category higher, the puang.⁵⁴ This difference in the status structures of Ma’kale (particularly the Tallu Lembangna area) and Rantepao is

essentially the result of greater social differentiation in Ma'kale than in Rantepao, perhaps due to Ma'kale's longer historical interaction with Bugis kingdoms.

[7.45] In both Ma'kale and Rantepao, the largest portion of teachers was drawn from the lower and middle elite, not the high elite, who generally saw little personal advantage in a teaching career.⁵⁵ As a whole the high elite, including those holding positions as district head, responded more slowly to educational opportunities than did those whose children had less clear access to upper administrative positions in Ma'kale-Rantepao. Moreover, teacher families tended to produce more teachers as a tradition of modern education became quickly established among their children.⁵⁶ The early modern elite, then, largely developed out of this lower and middle traditional elite, with some members drawn from both above and below rounding it out. As the high elite became aware of its eroding position, it also began to stress the importance of education and somewhat closed this gap.⁵⁷ The gap remained a feature of the modern Torajan society well into the 1980s, however.

[7.46] Thomas Van den End, in the mid-1970s, collected bio-data sketches on 430 teachers who had taught in Ma'kale-Rantepao between 1913 and 1949.⁵⁸ He then asked one person from Ma'kale and one from Rantepao who were familiar with most of the names in his collection to classify them according to traditional social status, in other words what the status of their fathers and mothers had been. It is hard to conceive of people being classified in such a way in the contemporary United States; the lines in Toraja itself are more obscure today. But before 1950 it was possible to classify everyone, and for Van den End to have asked two well-informed former teachers to do so posed a challenge that was within their capacity to determine.

[7.47] From Van den End's classification emerge a number of observations supporting the contention that teachers were mainly drawn from the elite.⁵⁹ Of 250 teachers whose origins they were able to identify (the bulk of the rest was non-Torajan), 78 per cent were labeled as members of the highest status group. In other words, they were tana' bulaan in Ma'kale and Rantepao. The remainder or

22 per cent were from status groups lower than that. Quite a striking contrast emerges when the figures are disaggregated. For Ma'kale, the percentage of persons identified as originating from Status 1 (tana' bulaan) is 58 per cent, while 28 per cent are from Status 2 (tana' bassi), and 14 per cent from Status 3 (tana' karurung), who are considered to be kaunan. There were none identified from the Status 4 group (tana' kua-kua). For Rantepao, 92 per cent originated from Status 1 while the remaining 8 per cent are from Status 2. None of the teachers in the sample who came from Rantepao originated from a social level below Status 2.

[7.48] Van den End's basic classification does not help us with more subtle distinctions within the elite. For these we are forced to use the generalizations of reliable informants noted earlier. It does suggest that the teaching profession was much more firmly in the hands of the Rantepao elite than it was in the hands of the Ma'kale elite. Not only were the majority of teachers from Rantepao (upwards to 57 per cent), but there were overwhelmingly from the elite. Because the mission chose high-status persons to fill its classrooms and only then resorted to others (with some exceptions), it appears that the elite response from Ma'kale was considerably cooler than from Rantepao. The lower total number of teachers from Ma'kale strengthens this suspicion. That Ma'kale's elite was less responsive than Rantepao's elite to modern education is readily admitted in Toraja today, and these figures make it clear that fewer elite members saw teaching as a desirable alternative for their children. Their reluctance, however, was converted into opportunity by the tana' bassi and tana' karurung who, despite their lower status, were placed as teachers in Ma'kale-Rantepao, though perhaps they were moved with greater frequency and had shorter careers than their higher status colleagues. This was particularly true of tana' karurung.

[7.49] The emerging modern elite in Ma'kale-Rantepao was, as elsewhere in the Netherlands East Indies, "not really a new elite, but rather an expansion and extension of the old."⁶⁰ We have seen that this was particularly true of Rantepao where over 90 per cent of the Torajan teachers, the largest single element in the modern elite, were drawn from the old elite, compared with only 58 per cent for Ma'kale. In Rantepao, the modern elite was not so much a challenge to as an

extension of the old elite, springing from it and overlapping with it. Rivalry for social mobility occurred largely within this extended old elite as in Java where, over time, lesser priyayi made better advantage than upper priyayi of the opportunity for schooling.⁶¹ As a result, relations between the modern and traditional elites in Rantepao were not markedly acrimonious.

[7.50] In Ma'kale, the modern elite contained more diverse elements drawn from below the old elite, which was slow to accept education as a means to retain status. Because of this, the disjuncture between the modern and old elites caused greater social tensions, with more persons in each group who did not recognize the other groups' claims to legitimacy. These tensions were intensified by the particularly strong blood consciousness in Ma'kale that was not ameliorated by an admiration for wealth to same degree as in Rantepao.

[7.51] These differences within the emerging modern elites of Rantepao and Ma'kale were somewhat bridged by their shared religious, educational, and ethnic orientation. Yet their distinctive characters helped to shape their respective orientations toward the Indonesian Revolution and the post-independence political upheavals of the 1950s.

Early Attempts at Modern Organization

[7.52] But for the possible exception of the first incarnation of Bunga' Lalan in 1926, which may have represented the interests of a broad group of teachers, the ascriptive elite, plus Bugis and Chinese traders, the founders of modern Torajan organizations were mainly teachers and to a lesser degree evangelists. They attempted to form a variety of cooperatives and "social progress" associations. Some were overtly intended to raise ethnic consciousness while others were bent on improving Torajan prosperity by introducing new forms of cooperation or transforming old ones. No openly political organizations existed in the Ma'kale-Rantepao area though a few men belonged individually to the Thamrin-Sutomo Parindra (Greater Indonesian Party), which was based in Java. Muhammadiyah, the modernist Islamic social organization, was clandestinely political and radical. However, because Muhammadiyah was composed mainly of immigrant Bugis and

Bugis-Toraja mestizos, it is treated in Chapters 6, 8, and 9 but excluded from this treatment of Torajan organizations.

Cooperatives

[7.53] As the size of Christian parishes grew in the 1930s, many parishes tried to strengthen the economic position of their members by forming cooperatives. The most common form was a savings and loan organization which addressed two of the pressing needs of Toraja in general: rice shortages in between harvests and heavy funeral expenses. Separate organizations were set up to address each of these specific needs. A parish rice granary addressed the first. The Rembon rice cooperative, for instance, was maintained by contributions of at least five *ikat* (standard bundles) of rice sheaths given by each member after the harvest feast. Outstanding loans were also due at that time. The rate of interest for rice borrowed any time prior to harvest and returned after the feast was 33½ per cent. While steep, this interest rate was a bargain compared to what wealthy landholders were prepared to offer; rates of 100 per cent were common, which was historically a cause of debt bondage and pawned land for those who defaulted. The favorable interest rates offered by cooperative rice granaries seriously strained their viability. Invariably, demands for loans exceeded the availability of stored rice, and the granaries quickly exhausted their supplies. By the late 1930s, after less than a decade in operation, experiments in rice cooperatives seem to have failed.⁶²

[7.54] Cooperatives for funeral expenses also sought to fill a serious need. Unlike the rice cooperative, however, they also attempted to change deeply ingrained behavior by trying to reduce the amount spent on death feasts. The financial base for the “Burial Fund” was created by annual contributions of rice required from members and some local philanthropy. In addition, Christians were urged to donate to the fund animals which otherwise would have been slaughtered and divided at sumptuous death feasts according to convention.⁶³ The clear beneficiaries of the Burial Fund would have been those too poor to conduct a feast of minimally acceptable proportions. Here, as with the rice cooperative, outflow far exceeded income, especially as the Burial Fund was excessively dependent on the goodwill of the wealthy to subsidize the poor. Even more than this, any

Universitas Indonesia

venture dependent on seriously modifying the death feast itself was bound to meet heavy resistance.

[7.55] Dozens of similar cooperative ventures failed to take root in the 1930s, some surviving only one or two years. “Too much money collected for social service disappeared in the church,” asserted an elderly Torajan man who was active as an evangelist at that time. This was clearly disastrous in a context where church councils usually chose the officers responsible for the day-to-day operation of cooperatives. “The leadership was often dishonest and used the funds for personal gain, so members of the cooperatives lost confidence.”⁶⁴

[7.56] Poor organization and inept or corrupt practices were only part of the problem. Cooperatives, based on a horizontal and egalitarian structure, did not work well in an essentially stratified society. Persons in positions of power were accustomed to drawing on the community’s resources for personal purposes, all of which was accepted as the patron’s prerogative. They, in turn, had to provide services in order to sustain their privileges. However, the persons to whom those services extended might be a totally different group than the cooperative. Rather than providing cooperative members equal or at least proportional access to the cooperative’s resources, the leadership of these ventures appears to have treated these funds as personal perquisites.

[7.57] One notable exception was the Balo’ Toraja, a secular savings and loan cooperative founded in 1941 by 15 government employees. Technically anyone with a steady income could join, but no more than two per cent of its early membership consisted of traders and tillers. The membership deposit of *f*25 discouraged almost all but government employees and large traders from joining, even though monthly deposits did not need to exceed ten cents. Loans could not exceed *f*25 annually, and these were to be repaid within ten months in equal installments, that included a three per cent interest charge on the remaining principal. Balo’ Toraja’s membership probably was not greater than 100 prior to the Japanese Occupation, but it remained a viable organization. The narrow base of educated, regularly paid government employees from which it drew its

membership provided a secure basis for the modest cooperative. Moreover, the scrupulous, disciplined leadership of Balo' Toraja sustained the confidence with which members initially joined the cooperative.⁶⁵

[7.58] Balo' Toraja was founded by teachers and government servants who were at the center of efforts to stimulate Torajan ethnic identity. Another interesting, if ephemeral, secular organization with the most overtly ethnic appeal was founded by the first Torajan teacher (a student of van de Loosdrecht), K. Kadang. The Indigenous Brotherhood Cooperative (Cooperatie Persaudaraan Bumiputra), established in 1933 in Rantepao, grew out of the deepening malaise of the early 1930s. The cooperative was designed for urban consumers, who, Kadang wrote,

... in these hard times ... must look for ways to lighten [the burden of] our daily needs, our household necessities. If we heads of households cannot sufficiently or comfortably provide, we are disenchanted with our work. We still depend on others to obtain those needs, to put it bluntly. Isn't it so?

The "others" on which Toraja depended were Bugis and Chinese in whose grasp the commercial economies of the towns of Rantepao and Ma'kale were firmly held. Until the 1930s, few Toraja lived in either of these towns. As increasing numbers of educated persons left their village in search of non-agricultural employment, a new group of Toraja formed in the towns, self-consciously rubbing against these "foreign" merchants. Reinforced for some years by Dutch missionaries who sought to differentiate the sheep from the goats, as it were, Torajan's ethnic consciousness carried a strong negative appeal not dissimilar to other ethnic consciousness movements in the Netherlands East Indies:

Many of us still depend on the *leech*. You all know that this leech is very dangerous when it sucks blood, for it sucks blood until it is full. And because of that, we really feel it when we are bitten. We also know that after losing blood we finally fall ill.

Such is the life of a household that depends or counts on the foreigner. Doesn't he take a profit that far exceeds what is proper?... Have the self-awareness to join the Cooperative so that your household needs no longer depend on foreigners.⁶⁶

Unlike most lines of ethnic conflict involving Chinese in the East Indies, the tension between Toraja and Chinese was not severe. Chinese artisans and shopkeepers readily married Toraja (usually lower status), and were willing to accept Toraja as apprentices, viewing them as hard workers. The Torajan propensity to accumulate capital (in the form of buffalo and pigs) was another

Universitas Indonesia

common bond. For these reasons and the growing anti-Bugis sentiments, particularly among Christians, Kadang's invective seems directed more at Bugis than Chinese merchants. Indeed, there were many more Bugis in Ma'kale-Rantepao, numbering 2,100 in 1930, compared to only 88 Chinese.⁶⁷

[7.59] The Indigenous Brotherhood Cooperative left few tracks for future historians to follow.⁶⁸ It survived through 1938, when a new presiding officer was mentioned in *Soelo*, and probably lasted until the Japanese Occupation. Its importance was probably less as a challenge to non-Torajan commercial control than as a clear expression of Torajan identity, during a crucial decade in the formation of Torajan ethnic consciousness.

Soelo

[7.60] Modern-organized expression of a sense of Torajan identity took shape slowly in the early 1930s under the conservative tutelage of the mission. The insularity of the Toraja, reinforced by mission and government policy, meant that few gained contact with the turbulent world of nationalist politics in Java before the "radical" nationalists had already been reined in and packed off to exile. For the most part, the GZB was able to anticipate development of political consciousness in Ma'kale-Rantepao and channel it in a (for them) harmless direction.

[7.61] The leading role assumed by the GZB in founding the first and, as it turned out, only Torajan publication before 1950 is a case in point. *Soelo* (Torch) went to press in mid-1932 as a six to eight page monthly promoting (GZB) Christian values with articles in Malay and Tae'. J. Belksma, the first editor of *Soelo*, succinctly expressed GZB intentions to control the content of the periodical when he wrote from The Hague to his colleagues: "This paper cannot be allowed to go under; in any event we must keep the 'press' in our hands."⁶⁹

[7.62] Little of a controversial nature appeared in the paper. *Soelo* regularly carried religious exhortations and short poems written by Torajan evangelists, in addition to occasional religious commentaries by the editor or his colleagues. Pieces on aspects of local culture or oral tradition, often written in Tae', were

quite numerous. The editor inserted bits of news from “Hindia Timoer” on, for instance, how the depression cut into taxation revenues, increasing lay-offs of Javanese railroad workers, and pension decreases for government officials. World news items included articles on the rise of Christianity in Japan; a favorable look at prohibition in America; an emotional anti-communist view of the Soviet Union with particular reference to the “Anti-Christ” activities there; and Queen Wilhelmina’s birthday celebration. By 1935, circulation of *Soelo* tripled to 2,100 copies.⁷⁰

[7.63] Despite its strict editorial control, *Soelo* did provide a channel to express the new consciousness that was forming among the educated young. Articles appeared on the resistance led by Pong Tiku, Ua Saruran, and Bombing to the Dutch occupation of Toraja, the first efforts to resurrect this oral history and commit it to print. While their authors were not overtly critical towards the “Kompeni,” the vivid description of the massacre of Torajan men, women and children at Buntu Alla’ carried a clear message. That the editor allowed these articles suggests that the mission was willing to score a few points with identity-conscious Toraja at the expense of the government.⁷¹

[7.64] *Soelo* provided a forum for tentative gropings toward Torajan solidarity and participation in the literate forms of modernity. Yet because it was in essence the official vernacular organ of the GZB, it did not and perhaps could not deal with Toraja’s relationship to the nationalist movement brewing in Java. After ignoring the issue for two and a half years, the editor glibly announced late in 1934 that Sukarno had been exiled: “Ir. Soekarno, the leader of the nationalists, has been sentenced to exile in Flores so that the order and tranquility of the Indies will not be disturbed.”⁷² Two months later the editor, shuffling the site of exile, sought to further dampen any local interest in the nationalists with the casual update that “Ir. Soekarno has left Bandung for Timor accompanied by his wife and 3 persons from his household. It was not evident that the populace paid any attention to his departure.”⁷³

[7.65] One of the only two other references to nationalist activities came in a short article announcing the arrest of Hatta and other leaders from the Partai Nasional Indonesia (PNI, Indonesian National Party) on 25 February 1934. The story went on to say that Hatta's house and his *Daulat Rakyat* newspaper office had been searched along with 45 other houses in Batavia, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Cheribon, Padang, and Fort de Kock – an unsubtle message that playing at nationalist games was serious business.⁷⁴ Almost a year later, the readership learned that “Moehammad Hatta with some of his friends will be ordered to live in Boven Digul in New Guinea for spreading Communist teachings in Hindia-Belanda.”⁷⁵ If the message was still not clear, the announcement of Tjokroaminoto's death in December 1934 drew the lines more boldly still: “He formed the Partai Serikat Islam in 1912 *and after that* [my italics] was exiled to Banda,” an unbearable misrepresentation of a long life in nationalist politics with comparatively little time spent under incarceration.⁷⁶ The point, however, was simple and not dependent on historical accuracy: party formation is risky.

[7.66] *Soelo's* gloomy portrayal of nationalist politics came at a time when a few leading figures in the emerging Torajan elite began to themselves identify with moderate nationalist leaders in Java. One teacher named Albert Dendang, an early Torajan convert to Christianity, wrote to Indonesian leaders in the Volksraad complaining about Dutch administration in Ma'kale-Rantepao. His only mistake was that he confided in an ostensibly sympathetic Dutchman named Saathof, who informed GZB missionaries. After that, they kept him under close observation.⁷⁷ Dendang's success as a fiery evangelist did nothing to lessen GZB concern that other teachers would follow his example.

[7.67] Teachers such as So'Inan and Sampe Pandin, sent to Java for advanced schooling, also returned with politicized views of their world in which the GZB appeared as the adversary. Still other graduates of the schakelschool and one HIS graduate who attended the Makassar OSVIA spoke out as critics of the status quo. In short, a critical mass of educated, articulate, and politically aware youth emerged between 1934 and 1936 and sought to organize themselves along modern lines.

“Social Progress” Associations

[7.68] Because education was so integral to the growth of Torajan identity, it comes as no surprise that the four social improvement organizations which emerged in the 1930s all sought to enhance educational opportunities for Toraja. They did not radically differ from one another, and all four drew their members from the pool of link school and continuing school graduates with the leadership coming invariably from the former. The leading members were teachers and persons working in the “native” administrative corps, but for a few exceptions.

[7.69] Perhimpunan Boenga’ Lalan (PBL) reconstituted itself in Rantepao out of the cold ashes of its brief incarnation in the mid-1920s, when it organized to champion Dutch-medium education. Its revival in 1934 by some senior Torajan teachers reflected changes that had penetrated Ma’kale-Rantepao society over the previous decade. This organization, while not overtly Christian, was composed of high-status persons who were among the first fruits of mission education. Its leadership came from districts in Onderafdeeling Rantepao; the two main governing officers elected in 1934 originated from Sa’dan and Tikala.⁷⁸ “[Boenga’ Lalan] has no other purpose and goal than the desire to advance the Toraja people and land ... which are still in darkness,” they asserted in an introduction for *Soelo* readers. The organizational charter emphasized “building brotherhood among the Torajan people so that they become united” [*bersehati*], collecting money to help put deserving students through school, and “devoting attention to the matter of advancing the life of the people of *tanah Toraja* [my italics].” This PBL charter is the first document in which Toraja portrayed themselves as a people named “Toraja” and identified themselves with a geographic space they called the land of Toraja (“tanah Toraja”).⁷⁹

[7.70] A group of about ten young Christian graduates from the link and continuing schools and one from the Palopo HIS founded a rival organization in Ma’kale two years later.⁸⁰ The Perserikatan Toraja Kristen (PTC, Christian Toraja Union) struck a stance at once more religious and more militant than that of the PBL, though its stated goal was similar: to form an association that would “... join together a still divided Torajan people” The basis for this unity would be a

strengthened ethnic identity, but more especially an ethnic identity built among *Christian* Toraja who were living both in and outside of tanah Toraja. Members of the PTC would defend Torajan adat but, conversely, would also root out those customs "... which do not fit with progress and general standards of decency." Moreover, the organization pledged "... to defend the rights and interests of members and Toraja in general on the basis of justice in both domestic and other matters, within Toraja and other places".⁸¹

[7.71] Despite its strong Christian orientation, the PTC set out to steer a course free of GZB interference. By choosing Ma'kale, the administrative capital, over Rantepao, the center of GZB operations, the PTC symbolically affirmed its autonomy. Its first chairman, Jacob Sampe Pongrante, the senior OSVIA-trained Torajan, had maintained an uneasy distance between himself and the mission. Pongrante's parents had chosen the Palopo Dutch Native School for his schooling over the Ma'kale link school with its strong mission flavor.⁸² When he became a Christian and added the name Jacob is not clear, but he remained an independent-minded Christian under conditions that encouraged dependence. Another of the PTC's influential members, Sampe Pandin, became suspect for the anti-GZB and pro-nationalist inclinations he developed while studying in Solo (Central Java).⁸³ Pandin had received the second highest Dutch-medium education of all Torajan teachers. He was well read and had a broad sense of the nationalist struggle emerging in the Indies that would eventually shape conditions in South Sulawesi, affecting Ma'kale-Rantepao as well. Other PTC individuals would later emerge as powerful figures in Christian politics, including J. Linting (an evangelist and later a minister from Ma'kale) and F.K. Sarungallo (a leading onderafdeeling-level Christian politician in the 1950s). J. Rapi', a secretary in the Forestry Service who became the second chairman of the PTC, gained a reputation as an activist that made him a hunted man by Netherlands Indies Civil Administration (NICA) officers after the Japanese Occupation.

[7.72] Most of the PTC leading lights came from high-status families. One who did not was C. Rongre, a continuing school graduate who later became a teacher. This ambitious and energetic youth was born into a very low-status family in

Sangalla' where "blood" consciousness was strong, yet he made his way into the inner circle of the Christian-educated elite. By 1937 Rongre rose to hold the vice-chairmanship of the PTC and, by a twist of fate, became the first Torajan to head the government of Tana Toraja after Indonesian Independence.⁸⁴

[7.73] Notes from a PTC meeting in 1937 show that the organization grew from 60 members nearly a year after its founding to 102 six months later.⁸⁵ Its active core, if we may judge by those attending the meetings, probably numbered less than half of that. As with the Bunga' Lalan, one of its major activities was collection of contributions to fund the study of deserving youths. More than Bunga' Lalan, however, the PTC engaged in discussions that crossed the line between "social" and "political" activity under the rubric of "progress in Java." It faced public and private pressure from the missionaries to merge with Bunga' Lalan, and a skittish reaction from most Toraja. "The PTC was looked upon as a disease," recalls Sampe Pandin. "[Toraja] feared that if we talked politics the Dutch would exile us all."⁸⁶

[7.74] By accounts of contemporaries, the GZB strongly discouraged educated Christians from reading the nationalist press. Missionaries easily shamed youths caught looking at "dubious" political literature, even if it were legal. A reading public numbering only in the hundreds of persons made mission vigilance a fairly effective check on the growth of a politically literate Christian Torajan community. Precocious PTC members, however, did receive regular issues of *Bintang Timur*, edited by the locally popular Batak, Parada Harahap; *Suara Umum*, the organ of Dr. Sutomo's Budi Utomo (merged into Parindra in 1935) which had great appeal to PTC members and heavily influenced their thinking; and *Suara Parindra*, the mouthpiece of Parindra, a coalition of moderate nationalist organizations formed in 1935 which favored working within the framework of limited representation provided by the Colonial Council, the Volksraad, which had only advisory powers. *Fikiran Rakyat*, Sukarno's weekly, was known to circulate among youths until his exile in 1934, though it was heavily censored.⁸⁷

[7.75] What are we to make of the nationalist influence on Torajan youths? It is apparent from the few publications regularly circulating among the most politically aware Christian youth that their intellectual models were Javan moderates who sought to work within the limited representational institutions provided by the Netherlands East Indies government. What nationalist interest was generated among these Christians was of the “responsible” stripe represented by the Thamrin-Sutomo Parindra in the mid- to late-1930s: the cooperators as opposed to the non-cooperators, as represented by Sukarno’s Partai Nasional Indonesia (PNI, Indonesian National Party).⁸⁸

[7.76] This is not to say that relations between these “cooperators” and local Dutch were always smooth. The growing sophistication of the Christian-educated elite brought them into more open conflict with some of the more patronizing GZB missionaries. D. J. Van Dijk, in particular, angered leading Torajan intellectuals like Sampe Pandin and So’ Inan with his inflexible colonialist positions. These two men, along with a like-minded Menadonese teacher named Rompas, were instrumental in establishing an independent Dutch-medium school, which taught course with a nationalist slant. Both the Bunga’ Lalan and the PTC united behind the school when some GZB missionaries appeared to be trying to discredit it on political grounds.

[7.77] Whatever their disaffection with the GZB or Netherlands East Indies government, the young Christian elite nevertheless recognized their collective conjunction of interests. They might have quibbled with the Hollanders about the orientation of Dutch-medium education and the heavy hand of the GZB, but their solution still lay in creating more Christian, Dutch language schools – not in rejecting the whole system. As Toraja they could share with non-Christians a vision of an energized people carving out a proud place for itself in the island, even the archipelago. It was this vision rather than the nationalist one that rallied the Torajan modern elite and accounts in large part for the weakness of Indonesian nationalism in Ma’kale-Rantepao.

[7.78] The puang of the Tallu Lembangna first raised the issue of autonomy from Luwu soon after Dutch troops occupied the Sa'dan highlands, and the Puang of Sangalla' had worked indefatigably to keep it alive. A sympathetic series of controleurs through the 1920s produced repeated recommendations for an autonomous Ma'kale-Rantepao or, at least, an autonomous Ma'kale. Torajan informants mustered substantial historical evidence that Luwu's earlier claim to the Sa'dan highlands had been negated as the kingdom's power eroded and tributaries one by one slipped away. Political expediency prevented the Dutch from taking any action on this claim, since the datu of Luwu and his court would hear nothing of it. Administrative priorities remained such that continued stability had a higher priority than righting possible historical injustices, so the recommendations fell on deaf ears in Makassar and Batavia.

[7.79] Times had changed by 1936. A determined group of Christian Torajan youth, educated in the mission rhetoric of advancing the Torajan people, began to seize upon this ready issue. "There was a hidden political motivation in our founding the P.T.C.," its first chairman recalled. "Our intention was to be separated from and given equal status to Luwu." The public aims were social improvement, but [sympathy with our real intentions] even allowed us to talk some district heads into joining P.T.C." Asked about the mission attitudes toward their hidden agenda he replied that the mission quietly encouraged their proposed separation from Luwu.⁸⁹

[7.80] Some within the GZB had still a grander notion of Torajan destiny. The roots of this idea lay deep in the history of the mission in South and Central Sulawesi, probably nurtured first by Adriani and Kruyt, who did succeed in wresting Posso out from under Luwu's control in 1907. Banded about by Dutch missionaries from the several proselytizing organizations active among the highlanders in these regions over the following three decades, the notion of a "Toraja Raya" – a Greater Toraja composed of all highland groups in Central and South Sulawesi – received its clearest formulation in an *Alle den Volcke* article dating from 1932. The author, D. Saathof, had replaced the regular schakelschool head who was on furlough. Relatively fresh on the scene, Saathof articulated for

Universitas Indonesia

the Netherlands audience what veteran missionaries had mainly mused upon among themselves:

For centuries the Mohammedan coastal people have plundered and killed in the Torajalands. Nothing and no one was secure from the Bugis. The Torajan did not build their houses on steep mountain peaks for nothing!

The Netherlands Government recognized the claim of Luwu to the Torajalands. The old hunting ground was officially incorporated by Luwu. This appears unreasonable. It would have been more rational if the Netherlands Administration had made a radical end to Luwu's domination and brought the whole Torajaland under direct Netherlands Rule: The Toraja of the Sa'dan plateau together with those from Mamasa and Posso. The Torajan ethnic groups [*Toradja stamen*] could develop into a Torajan people [*Toradja volk*] under Dutch guidance – a Torajan people that ultimately found its supreme unity in collective Christianity.⁹⁰

[7.81] A Torajan evangelist echoed similar thoughts a few months later in *Soelo*. Harking back to a mythical ancestor of the Toraja, Patta La Bantang, he then paid homage to the role of the Dutch Government in *restoring* order, promoting education, and carrying out the will of God in encouraging ethnic consciousness over narrow, selfish interests. In glowing terms he described how government measures had brought progress to the land and how “the Honorable Dr. Bahasa (van der Veen) at Angin-Angin is in the midst of arranging several matters respecting the development of Toraja” (probably reference to the dictionary). The evangelist then continued:

Because of this, I call on you all Toraja, my people, and especially headmen and nobles, to be of one mind, support each other, help one another, and live as brothers so that finally your name will be great in Celebes. Indeed, for a long time an Afdeeling for your people has been ready ... [referring to the mythical state of unity previously existing]. Hopefully, if God wills it, the kingdom of Patta La Bantang will live again just as before, brought about by the love of God in Christ [and] probably established by those in power, that is the flag of the 3 stripes [the Netherlands]⁹¹

[7.82] After explaining that Java was divided according to ethnic and other considerations into three provinces, each divided into Residencies, he continued:

So also there is news that Celebes will be made a Province, known as the Eastern Province. We Toraja hope that we also can become one Residency in that Province.⁹²

[7.83] Ethnic unity was a theme around which educated Toraja youth of various political stripes could unite. “Progress” could not be achieved without ethnic solidification under the gossamer administrative structure that was Onderafdeeling Ma’kale-Rantepao. Those caught up in this new ethnic consciousness, however, were mainly youths who had accepted a new religious ideology which challenged central features of Torajan cultural tradition. Education and religion would save them from what they saw to be the Torajan legacy of disunity and wasteful custom. Christianity in particular was seen as preserving Torajan identity while garnering its people’s self-respect among the Muslim majority of the region:

Besides education, it is particularly Religion that becomes the root of ‘progress’ in this world ... Looking East, West, North and South in this world, which people has exceeded the progress and order of Westerners, both in the spiritual and material matters? ... It is very clear that Christ is the starting point for progress. Because of that my Toraja People, accept that basis so that your name becomes a proud one also and does not just remain something out of the past for Muslims to sling around: “Toraja the loin-cloth wearers, the boasters, the pig eaters,” etc. Haven’t you heard that? If not, just go to the coast east or west of our land or [listen to] a group of Muslims and it is certain you will hear those insults if one of us commits a small blunder or even if we don’t, since Toraja are very low in their eyes. Indeed, the insults have a basis, because before [the Dutch] extended their power to our land Toraja, our people were killed or tied up like animals and sold all over Bugis country in addition to having their goods stolen.

Thank God that He extended his love, bringing peace to our land [by] driving out the evil ones who day and night troubled us, replacing grief with joy because they [sic] established the basis of progress. ...⁹³

¹ La Side Daeng Tapala, *Sejarah Kebangkitan Nasional di Sulawesi Selatan 1900-1942* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), p. 249; Puang Palayukan, “The Autobiography of Puang Lasok Rinding the King of Sangalla’, As Palodang XII” (unpublished typescript prepared by the Program Committee for the puang’s funeral ceremony, Sangalla’, Toraja, 1970).

² Sarungu’, “Sejarah Pong Tiku,” p. 15.

³ M. Biuw, interview with author, June 1978, Rantepao.

⁴ Sampe Pandin, interview with author, 31 Mar. 1978, Ujung Pandang.

⁵ A. A. van de Loosdrecht, *ADV*, Feb, 1914, p.13.

⁶ Boer, “Memorie van overgave,” p. 249.

⁷ Robert Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* (The Hague: W. van Hoeve, 1970), pp. 69-70.

-
- ⁸ H. van der Veen, interview with the author, 25 Sept. 1977, Leusden-Zuid.
- ⁹ Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, p. 68.
- ¹⁰ Verslag, 47e Conferentie van Zendelingen, 25-27 en 29 Juni, 1931, Sangalla'/Barana', number AGZB 191, Archive, Gereformeerde Zendingsbond, in Netherlands National Archive, Utrecht Branch.
- ¹¹ *AdV*, Mar. 1928, p.30.
- ¹² The landschap school provided two hours of Christian instruction weekly in which participation was voluntary.
- ¹³ *AdV*, Mar. 1992, pp. 19-20; *AdV*, June 1923, pp. 67-8
- ¹⁴ *AdV*, Nov. 1926, pp. 136-7
- ¹⁵ S.D. Tallu Lembang, interview with the author, 20 Feb. 1978, Rantepao.
- ¹⁶ J. Belksma and P. Zijlstra, letter to the Governor of Celebes and Dependencies, 30 May 1923, Rantepao, number AGZB 312, Archive, Gereformeerde Zendingsbond, in Netherlands National Archive, Utrecht Branch.
- ¹⁷ *AdV*, June 1918, p. 43; J. Tanis, letter to Thomas Van den End, 1974, in recipient's personal archive.
- ¹⁸ *AdV*, Sept. 1930, p. 127; S. Sambo, *Soelo*, 1937, p. 72.
- ¹⁹ Seinstra, "Memorie van overgave," pp. 95-6; Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, p. 20.
- ²⁰ Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, pp. 67-8.
- ²¹ Nooy-Palm identifies the bunga' lalan as "the most important of the rice priests" (who are known collectively as *indo padang*). Nooy-Palm, *The Sa'dan-Toraja*, p. 279. Bunga' lalan is also the name Toraja give to the constellation of Pleiades which is used to determine the beginning of the planting season. Van der Veen, *Woordenboek*, p. 83.
- ²² *AdV*, 1931, p. 53.
- ²³ P. Zijlstra and J. Belksma, letter to Assistant Resident Nobele, 3 Aug. 1921, Rantepao, number AKUGT 30, Archive, Komisi Gereja Toraja (AKUGT), Rantepao; J. Tanis, *AdV*, Feb. 1929, p. 21.
- ²⁴ Verslag bespreking met de Directeur van Onderwijs en Eredienst, 8 Mar. 1932, Rantepao, p. 3, number AGZB 192, Archive, Gereformeerde Zendingsbond, in Netherlands National Archive, Utrecht Branch.
- ²⁵ Tanis, *AdV*, Feb. 1929, p. 21.
- ²⁶ Verslag, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933, Rantepao, number AGZB 192, Archive, Gereformeerde Zendingsbond, in Netherlands National Archive, Utrecht Branch.
- ²⁷ Tanis, *AdV*, Feb. 1929, p. 22.

-
- ²⁸ Verslag, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933.
- ²⁹ Tanis, *AdV*, Apr. 1929, p. 47.
- ³⁰ Tanis, *AdV*, Jan. 1929, pp. 7-8.
- ³¹ J. Sampe Pongrante, interview with the author, 11 Mar. 1978, Rantepao.
- ³² S.D. Tallu Lembang, interview with the author, 20 Feb. 1978, Rantepao; J. Linting, interview with the author, 15 Mar. 1978, Rantepao.
- ³³ *AdV*, 1938, pp. 167-8; Tanis, *AdV*, Feb, 1929, p. 23. Between 1926 and 1938 the annual new admissions to link school students rose from 23 to 45, and total enrollment in the five classes of the school reached 149. Of this number, 75% were Toraja, 8% were Ambonese, 7% were Menadonese, 6% were Bugis, and assorted other ethnic groups totalled 2%. By religion, 59% were Christian, 31% Aluk To Dolo, and 10% Muslim.
- ³⁴ Letter from J. Tanis to Thomas van den End.
- ³⁵ *AdV*, 1938, pp. 167-8.
- ³⁶ J. Sampe Pongrante, interview with the author, 11 Mar. 1978.
- ³⁷ Paul van der Veur, *Education and Social Change in Colonial Indonesia* (Athens, OH: Ohio University, Center for International Studies, 1969), p. 9.
- ³⁸ Verslag, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933, Rantepao, number AGZB 192, Archive, Gereformeerde Zendingsbond, in Netherlands National Archive, Utrecht Branch.
- ³⁹ J. Tanis, "De Zendings-Schakelschool te Ma'kale," in *Om te Gedenken*, ed. Gereformeerde Zendingsbond, pp. 173-84 (Delft: A. van Barneveld Drukkerij Hoogland, 1938), p. 184.
- ⁴⁰ Verslag, 52e Conferentie van Zendelingen, 8 Mar. 1933.
- ⁴¹ Patrick Decavele, "[Catholic] Missionaries in Tanah Toraja," pp. 16-9.
- ⁴² *AdV*, Jan. 1916, p. 3; *AdV*, June 1924, p. 64.
- ⁴³ *AdV*, Mar. 1918, p. 18.
- ⁴⁴ Thomas van den End, personal communication, May 1978.
- ⁴⁵ *AdV*, Nov. 1915, p. 87; *AdV*, July 1919, p. 52; *AdV*, June 1924, p. 64.
- ⁴⁶ *AdV*, Jan. 1916, p. 5. However, one glowing report from the Ranteballa district head emphasizes that the teacher there "has still never hit or scolded the children." See *AdV*, Feb. 1918, p. 10.
- ⁴⁷ *AdV*, Apr. 1918, p. 27; *AdV*, June 1918, p. 44; Toby Volkman, "The Pigs," p. 66. Van de Loosdrecht reported that the school at Tondoklitak, to which Volkman refers, was closed because the site was too cold for guru who were not used to such altitudes. The school was later reopened at report. When it was reopened in the early 1920s, however, there was many more Torajan guru available who were far more accustomed to cool temperatures than the Malay speakers.
- ⁴⁸ *AdV*, June 1918, p. 44.

-
- ⁴⁹ *AdV*, July 1919, p. 52.
- ⁵⁰ See Table 4.1 in this chapter.
- ⁵¹ H. van der Veen, interview with the author, 16 Sept. 1977, Leusden-Zuid.
- ⁵² S.D. Tallu Lembang, interview with the author, 20 Feb. 1978, Rantepao.
- ⁵³ See Akin Rabibhadana, *The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period, 1782 – 1837* (Data Paper No. 74, Cornell University Southeast Asia Program, Ithaca, 1969).
- ⁵⁴ For a more detailed discussion of social status categories, refer to Chapter 1.
- ⁵⁵ J. Linting, interview with the author, 15 Mar. 1978, Rantepao.
- ⁵⁶ Head, Statistical Section, Department of Education and Culture, interview with the author, 13 Feb. 1978, Ma'kale.
- ⁵⁷ H. van der Veen, interview with the author, 16 Sept. 1977, Leusden-Zuid; J. Linting, interview with the author, 15 March 1978, Rantepao.
- ⁵⁸ Thomas Van den End, stenciled list of Toraja teaching staff generated by Van den End and referred to by him as the “large teacher list,” n.d.).
- ⁵⁹ Please refer to Chapter 1 for a more complete explanation of status levels in Toraja.
- ⁶⁰ Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, pp. 177 – 8.
- ⁶¹ Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite* (Singapore: Heinemann Educational Books [Asia] Ltd, 1979), pp. 53 – 4.
- ⁶² J. Tappi, “Lumbung Jum’at Rembon,” *Soelo* 67 (1937): 8.
- ⁶³ “Begrafenisfonds Ju’mat Rembon,” *Soelo* 67 (1937): 8
- ⁶⁴ Ne’ Kana, interview with the author, 4 Aug. 1978, Batu Leleng (Toraja).
- ⁶⁵ J. Rapi’, interview with the author, 5 July 1978, Ma'kale.
- ⁶⁶ K. Kadang, “Cooperatie,” *Soelo* 22 (1933): 4 – 5.
- ⁶⁷ *Volkstelling 1930, Deel V: Inheemsche bevolking van Borneo, Celebes, de Kleinen Sunda Eilanden, en de Molukken* (Batavia: Department van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1935), pp. 29, 132.
- ⁶⁸ Kadang himself died in 1978 before I could interview him. He had been seriously ill for several months, and an interview request seemed to be an unwarranted intrusion.
- ⁶⁹ J. Belksma, letter to Conferentie van Zendelingen, late 1932, The Hague, number AKUGT 5, Archive, Komisi Gereja Toraja (AKUGT), Rantepao.
- ⁷⁰ *Soelo* 30 (1934): 7.

⁷¹ The editor proved much less tolerant of criticism directed at the GZB. The only obliquely critical article that I discovered was written by someone identified only as C.P. from Rantepao. It was organized as a mock dialog between two (Tae' speaking) non-Toraja and a Toraja youth sitting in the shade at the edge of a bridge leading to Buntao'. The two strangers criticized the heavy offerings exacted from Christians by the mission, and the expensive and misguided schooling that did not address basic problems of daily life. Juxtaposed to these criticisms were the benefits Muhammadiyah was bringing to Toraja: "Isn't it always like your *bangsa* 'ethnic group' to follow along, noisily singing with merriment? You look for real earth unaware that you are but like a fly on an elephant's tail."

The article stimulated a sharp editorial rebuke reminding Torajan readers how much the Mission had contributed to Torajan progress, and particularly the favorable role of women in GZB Christianity in contrast to Muhammadiyah. *Soelo* 57 (1936): 4 – 5.

⁷² *Soelo* 29 (1934): 5.

⁷³ *Soelo* 31 (1934): 6.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Soelo* 40 (1935): 8.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ "Notulen 57e Conferentie van Zendelingen," 5 – 7 Nov. 1934, Angin-Angin, number AGZB 192, Archive, Gereformeerde Zendingbond, in Netherlands National Archive, Utrecht Branch.

⁷⁸ *Soelo* 61 (1936): 8. One was K. Kadang of Tikala, who had been one of van de Loosdrecht's interpreters and a nephew of Pong Maramba. He also founded the Indigenous Brotherhood Cooperative. The other was M. Biuw, an early Christian convert and probably the first teacher from Sa'dan district.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ J. Sampe Pongrante, interview with the author, 11 Mar. 1978, Rantepao.

⁸¹ *Soelo* 62 (1936): 7. The "P" in PTC was later changed from Perserikatan to Persatoean. The difference is subtle but reflects a shift from thinking of the organization as a sort of federation of independent parts (Torajan Christians from many districts) to a union as ethnic identity intensified.

⁸² J. Sampe Pongrante, interview with the author, 11 Mar. 1978, Rantepao.

⁸³ Sampe Pandin, interview with the author, 22 Jan. 1978, Ujung Pandang.

⁸⁴ *Soelo* 75 (1937): 5 – 6.

⁸⁵ An associate branch of the PTC was begun in Palopo in 1937 by a Torajan teacher named A. Taula'bi'. Known as the PPTC, the group must have numbered at least 15 to qualify for branch status. See *Soelo* 67 (1937): 5 – 6 and *Soelo* 71 (1937): 7.

⁸⁶ Sampe Pandin, interview with the author, 31 Mar. 1978, Ujung Pandang.

⁸⁷ A. Rumpa, interview with the author, 9 Mar. 1978, Ma'kale; C.T. Misluyuk, *Soelo* 70 (1937): 203.

⁸⁸ J. D. Legge, *Sukarno: A Political Biography* (New York: Praeger, 1972), p. 136.

⁸⁹ J. Sampe Pongrante, interview with the author, 11 Mar. 1978, Rantepao. An incident in 1935 reveals the extent to which Dutch officials in South Sulawesi mistrusted the mission's intentions to cultivate Torajan ethnic identity. On a visit by the governor general to Toraja, he attended a ceremony in the churchyard of Sangalla' district. The puang of Sangalla' had lent traditional beadwork headpieces (*kanda-aeros*) and a pennant long associated with the notion that the puang of Sangalla' was a descendant of Laki Padada, the mythical ancestor of South Sulawesi royalty, as decorations for the governor general's arrival. Whether or not the puang had appreciated a ripe moment to make his point is not known. At any rate, officials accompanying the governor general explained the flying of the pennant as a sign of anti-government sentiment and a symbol of autonomy – demonstration against Luwu's authority. The governor general, in turn, conveyed his annoyance to the Batavia Zending Consul that the GZB in Ma'kale-Rantepao was "trading on the nationalistic feelings of the people" to advance its own popularity. At this the missionaries were reportedly "struck dumb." They denied the accusation, blaming the misinterpretation on "Dutch officials [who] felt too great a place was made for the mission in the Governor General's visit." Notulen 56e Conferentie van Zendelingen, 10 – 12 Apr. 1935, Rantepao, number AGZB 192, Archive, Gereformeerde Zendingsbond, in Netherlands National Archive, Utrecht Branch.

⁹⁰ *AdV*, 1933, p. 55.

⁹¹ F. D. Tangjong, *Soelo* 22 (1933): 4.

⁹² *Ibid.* Sampe Pongrante found strong Toraja Raya sentiment developing in Mamasa when he was posted there for his first tour as a civil servant in 1936. He helped to found a Perserikatan Toraja Christen chapter there, capitalizing on separatist desires of Mamasans. J. Sampe Pongrante, interview with the author, 11 Mar. 1978, Rantepao.

⁹³ F. D. Tangjong, *Soelo* 22 (1933): 4 – 5.

BAB 5

ANOTASI

Bab ini akan menguraikan beberapa permasalahan yang saya hadapi dalam penerjemahan, khususnya yang menyangkut masalah kesepadanan. Cara yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan itu dijelaskan dalam bentuk anotasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemilihan padanan. Teks sumber terkait dengan sejarah Toraja khususnya yang menyangkut pendidikan, organisasi, dan kesadaran etnis sebagai salah satu bagian dari disertasi yang ditulis oleh sejarawan Amerika Serikat. Penulis TSu itu menggunakan bahasa Inggris dan menulis untuk pembaca yang berbahasa Inggris.

Teks Sumber (TSu) sebagai teks teknis cukup banyak menggunakan kata-kata budaya baik berupa istilah atau pun nama diri dan nama jenis, ungkapan idiomatis, serta metafora. Pada umumnya istilah teknis dan kata budaya itu merupakan kata yang digunakan penulis TSu, tetapi tidak berasal dari BSu melainkan dari bahasa Toraja dan bahasa asing khususnya bahasa Belanda, serta beberapa yang berasal dari BSa. Oleh karena itu sebagian besar masalah yang ditemukan dalam penerjemahan terkait dengan penggunaan istilah, nama diri, ungkapan idiomatis, metafora dalam TSu. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan budaya yang melatari BSu, BSa, dan bahasa Toraja atau asing sebagai bahasa ketiga yang digunakan penulis TSu dalam teksnya dan berbagai alasan lain seperti yang akan diuraikan dalam anotasi berikut ini.

5.1 Istilah

Terdapat cukup banyak istilah Toraja dan Belanda dalam TSu. Hal itu sangatlah wajar karena walaupun TSu ditulis dalam bahasa Inggris, kontennya menyangkut sejarah budaya dan masyarakat Toraja. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan TSu ada istilah Toraja yang tidak diberi padanan, tetapi ada juga yang dipadankan. Hal yang sama juga berlaku untuk istilah Belanda.

5.1.1 Istilah yang Tidak Diberi Padanan

Pada umumnya istilah Toraja yang saya temukan dalam TSu tidak saya beri padanan dalam TSa sebagaimana yang dilakukan oleh penulis TSu. Ia tentu sangat menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah disertasi mengenai sejarah harus mengungkapkan fakta apa adanya berdasarkan sumber sejarah yang diperolehnya. Selain itu, penulis pasti mempertimbangkan fungsi informatif dari karya itu sehingga penggunaan istilah khas Toraja yang sarat nilai budaya itu dapat memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pembaca TSu.

Tabel 5.1: Istilah Toraja yang Tidak Diberi Padanan

No.	TSu	Tsa	Par.
1.	Not only did the campaign for a Dutch-medium school in Ma'kale-Rantepao succeed, but for a short time it functioned as the only Dutch-medium school in afdeeling Luwu, surely a bitter pill for the datu to swallow. Despite the fact that the Palopo HIS had been built even before Ma'kale applied for a Dutch-language school, the latter managed to sign a qualified teacher before Palopo could....	Kampanye sekolah berbahasa Belanda di Ma'kale-Rantepao tidak hanya sukses, bahkan dalam waktu singkat sekolah itu telah berfungsi sebagai satu-satunya sekolah berbahasa Belanda di <i>afdeeling</i> Luwu. Jelas itu pil pahit yang harus ditelan <i>datu</i> . Meskipun pada kenyataannya HIS Palopo telah dibangun, bahkan sebelum Ma'kale mengusulkan pembangunan sekolah berbahasa Belanda, Ma'kale berhasil mengangkat guru yang berkualifikasi sebelum Palopo dapat melakukannya....	[7.21]
2.	... The former head of the link school reflected on this admission policy in a letter written in 1974:	... Mantan kepala sekolah sambungan mengulas kebijakan penerimaan siswa itu dalam sebuah surat yang ditulis pada	[7.23]

	<p>Only the upper layer of the society obtained a good education. In the villages any teacher from a lower social level had difficulties. The elite did not want to hear the confession of faith, for example, led by one of their kaunan. Because of that, students were taken from the upper layer as much possible, just as in Minahasa (North Sulawesi) and Ambon.</p>	<p>tahun 1974:</p> <p>Hanya masyarakat lapisan atas yang memperoleh pendidikan baik. Di kampung, guru yang berstrata sosial rendah mengalami kesulitan. Kaum elite tidak ingin mendengarkan pengakuan iman, misalnya, yang dipimpin oleh salah seorang kaunan mereka. Oleh karena itu, murid sebanyak mungkin diambil dari lapisan atas seperti halnya di Minahasa (Sulawesi Utara) dan Ambon.</p>	
3 & 4.	<p>... In Rantepao there are three while in Ma'kale there are four. The top elite category in Rantepao is known as tomakaka while in Ma'kale there is one category higher, the puang. This difference in the status structures of Ma'kale (particularly the Tallu Lembangna area) and Rantepao is essentially the result of greater social differentiation in Ma'kale than in Rantepao, perhaps due to Ma'kale's longer historical interaction with Bugis kingdoms.</p>	<p>...yaitu tiga di Rantepao dan empat di Ma'kale. Kategori elite tertinggi di Rantepao dikenal dengan tomakaka, sementara di Ma'kale terdapat satu kategori yang lebih tinggi, yaitu puang. Perbedaan struktur status di Ma'kale (khususnya wilayah Tallu Lembangna) dan Rantepao pada dasarnya mengakibatkan perbedaan sosial yang lebih besar di Ma'kale daripada di Rantepao. Kemungkinan hal itu karena secara historis Ma'kale lebih lama berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan Bugis.</p>	[7.44]
5.	<p>From Van den End's classification emerge a number of observations supporting the contention that teachers were mainly drawn from the elite. Of 250</p>	<p>Dari klasifikasi Van den End muncul sejumlah amatan yang mendukung anggapan bahwa guru pada umumnya diambil dari golongan elite. Dari 250 guru yang dapat diidentifikasi asal-</p>	[7.47]

<p>teachers whose origins they were able to identify (the bulk of the rest was non-Torajan), 78 per cent were labeled as members of the highest status group. In other words, they were tana' bulaan in Ma'kale and Rantepao....</p>	<p>usulnya (sebagian besar sisanya bukan orang Toraja), 78 persen diberi label anggota kelompok status tertinggi. Dengan kata lain, mereka adalah tana' bulaan di Ma'kale dan Rantepao....</p>	
---	---	--

Istilah *datu* menurut *KBBI* (2008, hlm. 321) berasal dari bahasa Sanskerta yang sama artinya dengan kata *raja* atau *ratu*. *Datu* adalah sebutan untuk penguasa di kerajaan Luwu yang pernah ada dan berkuasa sampai di wilayah Tana Toraja (Makale, Rantepao) Sulawesi Selatan, Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Poso (Sulawesi Tengah) sebelum Hindia Belanda masuk ke Sulawesi Selatan khususnya Luwu dan sekitarnya.

Walaupun sama artinya dengan *raja*, penulis TSu memilih untuk menggunakan istilah *datu* yang sudah dikenal oleh sejarawan atau budayawan bahkan masyarakat luas di Tana Toraja. Dilihat dari besarnya pengaruh *datu* dalam sejarah kerajaan Luwu di wilayah Luwu dan sekitarnya, adalah wajar jika istilah itu digunakan oleh penulis tanpa berusaha menggunakan padanan kata itu dalam bahasa Inggris. Selain itu, penggunaan kata *datu* tidak menutup kemungkinan memberi konotasi tersendiri bagi sejarawan, budayawan, dan masyarakat secara umum.

Sebagai penerjemah, saya juga berusaha sedapat mungkin menyampaikan pesan yang ingin dikomunikasikan oleh penulis. Dengan mempertahankan penggunaan istilah *datu*, saya berharap respons yang didapatkan dari pembaca sama atau sesuai dengan harapan penulis TSa. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan TSu saya mempertahankan istilah *datu* yang digunakan oleh penulis TSu dengan prosedur penerjemahan transferensi.

Selain istilah *datu*, anotasi juga dilakukan pada istilah *kaunan*, *tomakaka*, *puang*, dan *tana' bulaan* yang terkait erat dengan penggolongan status sosial

dalam masyarakat. Alasan pemilihan istilah itu untuk dianotasi di antara sejumlah istilah Toraja yang terdapat dalam TSu dan TSa adalah tingginya frekuensi kemunculan istilah itu dalam TSu.

Pada dasarnya istilah *kaunan*, *tomakaka*, *puang*, dan *tana' bulaan* terkait dengan penggolongan stratifikasi sosial dalam masyarakat Toraja. Sebagai informasi, di Toraja dikenal empat macam *tana'* (kasta/strata sosial), yaitu: *tana' bulaan* (emas), *tana' bassi* (besi), *tana' karurung* (rujung enau), dan *tana' kua-kua* (gelagah). *Tana'* secara harfiah berarti “sebatang tongkat” atau patok yang ditanam dalam-dalam untuk menandakan suatu batas, biasanya batas sebidang tanah. Oleh karena itu, secara kiasan *tana'* digunakan sebagai patokan atau ketentuan status untuk membagi-bagi lapisan masyarakat menurut tingkatan (Kobong, 2008 dan Kobong, et al., 1992). *Tana'* cukup menentukan dalam kehidupan orang Toraja khususnya pada proses pelamaran dan pernikahan, upacara pemberkatan rumah baru, upacara pemakaman, dan proses pemilihan dan pengangkatan Penguasa atau Pemangku Adat (Bararuallo, 2010, hlm. 92).

Kaunan adalah istilah untuk menamai golongan sosial terendah di Toraja. *Kaunan* berarti “hamba atau orang yang wajib melaksanakan tugas tertentu dalam upacara adat” (Van den End, 1994, hlm. xxii). Penggolongan status sosial *kaunan* di Rantepao dan Ma'kale berbeda, yaitu bagi daerah Rantepao *kaunan* digolongkan sebagai *tana' kua-kua*, sedangkan di Ma'kale sebagai *tana' karurung*.

Kobong, et al. (1992, hlm.120–121) menjelaskan bahwa terdapat pemahaman yang berbeda mengenai asal mula hamba atau budak (*kaunan*). Ada yang mengatakan bahwa status hamba memang berasal dari atas, dari langit, sehingga dikenal istilah *Pongpakulando* yaitu hamba yang turun dari langit. Pemahaman yang lain mengatakan bahwa hamba baru terjadi kemudian karena berbagai faktor, misalnya karena jatuh miskin, tidak dapat membayar utang, atau karena kelaparan (*nalambi' sumpunna sumpunan kurin*). Oleh karena itu, dalam Kobong (2008, hlm. 79) disebutkan bahwa *tana' karurung* atau golongan hamba masih dapat dibedakan atas: *kaunan garonto'* yaitu hamba yang sudah dari asalnya; *kaunan mengkaranduk* (orang yang menjadi hamba karena dalam masa sulit terpaksa memohon perlindungan pada seseorang); *kaunan diorongi* (hamba

yang ditebus dari tuan lain); *kaunan dialli*, *kaunan indan* (*sandang*) yaitu orang yang menjadi hamba karena tidak dapat membayar utangnya, serta *kaunan tai manuk* (tahi ayam) yaitu hamba dari hamba.

Karena sebenarnya mereka yang termasuk golongan *kaunan mengkaranduk* semula bukanlah *kaunan*, malahan bisa *tomakaka* (bangsawan), tetapi karena berbagai kesulitan mereka *mengkaranduk* (memperhambakan diri kepada orang lain), *kaunan* jenis itu boleh bebas dari status *kaunan* dengan jalan *ma'talla' sanda saratu'* (mengadakan korban tebusan serba seratus). Dalam praktik, 10 ekor kerbau bisa dianggap 100 ekor dalam pemenuhan ritus *ma'talla'* itu. Walaupun demikian, ada yang mengatakan bahwa di daerah Ma'kale semua jenis *kaunan* boleh membebaskan diri dengan *ma'talla'*.

Sementara itu, istilah *tomakaka* (7.44) berasal dari kata *to* yang berarti orang dan *makaka* yang berarti kakak tertua secara kemasyarakatan (Bararuallo, 2010, hlm. 171). *Tomakaka* secara harfiah diartikan sebagai orang atau golongan yang dituakan. Dalam tiga tingkatan sosial yang berlaku di Toraja khususnya di Toraja bagian utara, *tomakaka* dianggap sebagai golongan sosial tertinggi. Sementara itu di Toraja bagian selatan, *tomakaka* berada pada urutan kedua tertinggi dari empat tingkatan dalam strata sosial karena masih ada golongan *puang* yang ditempatkan pada urutan tertinggi. Singkatnya, gelar *tomakaka* diberikan kepada golongan bangsawan baik bangsawan *tana' bulaan* maupun *tana' bassi*.

Istilah *puang* dalam bahasa Toraja secara harfiah berarti 'yang empunya'. *Puang* diyakini sebagai sekelompok orang yang datang ke Toraja dan kemudian menjadi penguasa setempat. Dalam perjalanan waktu, kekuasaan dan peran *puang* mulai bergeser, bahkan digantikan dengan penguasa yang bergelar *Sia-Ambe'* atau *Sia-Indo'* dan *Ma'dika* (Bararuallo, 2010, hlm. 27). Saat ini, *puang* merupakan golongan sosial (kasta) tertinggi di daerah Ma'kale atau Toraja bagian selatan (sekarang kabupaten Tana Toraja) yang setara dengan golongan *tomakaka* di daerah Toraja bagian utara (sekarang kabupaten Toraja Utara).

Secara harfiah, *tana' bulaan* (7.47) di atas berarti patok yang terbuat dari emas. Hal itu merupakan kiasan dari gambaran kadar kebangsawanan (darah biru), tingkat keberadaan, dan wilayah kekuasaan orang Toraja tempo dulu

(Bararuallo, 2010, hlm. 85). *Tana' bulaan* masih dibedakan atas *puang massang* (bangsawan murni, berdarah murni) dan *anak disese* (setengah *puang massang*).

Dalam penelitiannya penulis TSu pasti sudah melakukan penelitian mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggolongan stratifikasi sosial dalam masyarakat Toraja. Dengan demikian penulis sebagai sejarawan semakin memahami adanya kekhasan dalam stratifikasi sosial itu yang membedakannya dengan sistem yang berlaku di daerah atau negara lain. Bahkan, di wilayah Toraja sendiri, yaitu di Ma'kale dan Rantepao, sudah ada perbedaan mengenai pemahaman asal-usul stratifikasi sosial, penempatan setiap golongan dalam stratifikasi itu, serta dimungkinkan tidaknya masyarakat melakukan korban tebusan untuk menaikkan atau mengembalikan status sosialnya.

Dalam menerjemahkan TSu, saya bisa saja menggunakan istilah Indonesia yang mirip dengan kata budaya tersebut. Sebagai contoh istilah *kaunan* mungkin dapat diterjemahkan dengan hamba atau budak yang umum digunakan dalam menerjemahkan *kaunan*, atau *puang* dengan tuan, dan *tomakaka* dengan bangsawan. Akan tetapi saya menganggap terjemahan seperti itu tidak sepenuhnya menggambarkan status *kaunan*, *puang*, dan *tomakaka* dalam konsep masyarakat Toraja. Apalagi untuk kasus istilah *tana' bulaan* yang tampaknya sama sekali tidak memiliki padanan yang sedikit mirip dalam BSa. Karena alasan itu, saya memilih untuk mempertahankan istilah yang sarat makna budaya itu sebagaimana yang dilakukan penulis. Selain itu, penerjemahan istilah *kaunan*, *puang*, *tomakaka*, dan *tana' bulaan* yang semuanya merupakan kata budaya mungkin dapat dilakukan dengan mendeskripsikan istilah itu. Akan tetapi deskripsi itu sudah diberikan oleh penulis dalam Bab 1 yang tidak saya terjemahkan untuk tugas akhir ini. Di samping itu, pendeskripsian itu akan sangat mengganggu pembaca bila dilakukan setiap kali istilah itu muncul dalam teks.

Bagaimanapun, pembaca sasaran TSu dan TSa ini adalah para sejarawan atau budayawan yang tentu punya perhatian pada penggunaan istilah yang khas di dalam masyarakat. Bagi mereka penggunaan istilah yang sarat makna budaya justru bisa merupakan hal yang menarik. Oleh karena itu, istilah *kaunan*, *puang*, *tomakaka*, dan *tana' bulaan* lebih baik dipertahankan dalam TSu. Hal itu sejalan dengan pernyataan Newmark (1988, hlm.100) bahwa semakin serius dan pakar

pembaca TSa, semakin besar keharusan untuk menerapkan prosedur penerjemahan transferensi.

Sama halnya dengan istilah Toraja, di dalam TSu juga terdapat cukup banyak istilah Belanda dan satu istilah bahasa Thai. Sebagai perwakilan dari sejumlah istilah asing dalam TSu yang tidak diberi padanan, saya memilih lima istilah berikut untuk dianotasi.

Tabel 5.2: Istilah Asing yang Tidak Diberi Padanan

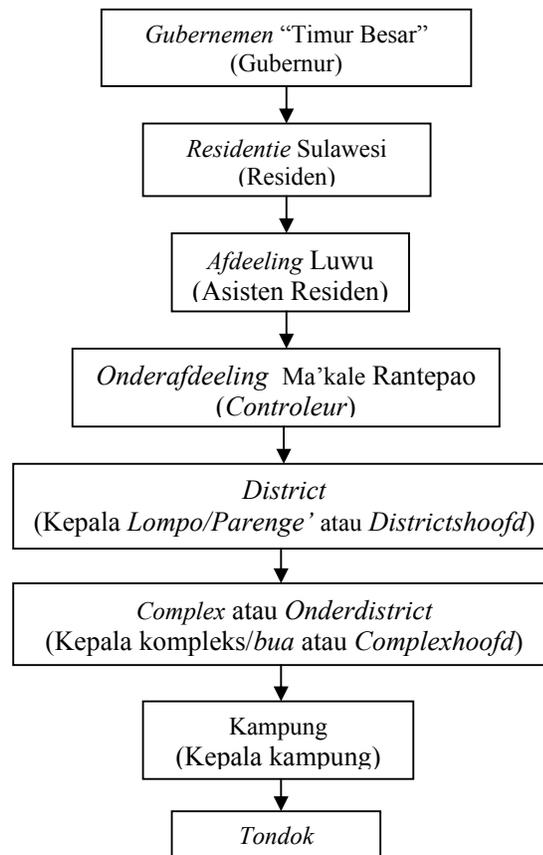
No.	TSu	TSa	Par.
6.	Not only did the campaign for a Dutch-medium school in Ma'kale-Rantepao succeed, but for a short time it functioned as the only Dutch-medium school in afdeeling Luwu, surely a bitter pill for the datu to swallow....	Kampanye sekolah berbahasa Belanda di Ma'kale-Rantepao tidak hanya sukses, bahkan dalam waktu singkat sekolah itu telah berfungsi sebagai satu-satunya sekolah berbahasa Belanda di afdeeling Luwu. Jelas itu pil pahit yang harus ditelan <i>datu</i>	[7.21]
7.	In principle, each onderafdeeling town in South Sulawesi had at least one government primary school, popularly known by a variety of names....	Pada prinsipnya, setiap kota onderafdeeling di Sulawesi Selatan memiliki sedikitnya satu sekolah dasar pemerintah yang oleh penduduk setempat disebut dengan berbagai nama....	[7.4]
8.	The puang of the Tallu Lembangna first raised the issue of autonomy from Luwu soon after Dutch troops occupied the Sa'dan highlands, and the Puang of Sangalla' had worked indefatigably to keep it	Puang Tallu Lembangna adalah orang pertama yang mengangkat isu otonomi terhadap Luwu segera setelah tentara Belanda menduduki dataran tinggi Sa'dan. Sementara itu, Puang Sangalla' telah bekerja tanpa	[7.78]

Universitas Indonesia

	<p>alive. A sympathetic series of controleurs through the 1920s produced repeated recommendations for an autonomous Ma'kale-Rantepao or, at least, an autonomous Ma'kale....</p>	<p>kenal lelah untuk memupuk isu itu. Jajaran <i>controleur</i> yang bersimpati sepanjang tahun 1920-an berkali-kali membuat rekomendasi mengenai otonomi Ma'kale-Rantepao atau, setidaknya, otonomi Ma'kale....</p>	
9.	<p>Malay stream education was a cul-de-sac, designed to provide only the rudiments of primary instruction and to offer no path to secondary education. The five-year course at the landschap school was terminal as was the three-year course at the village school, except for those children of the elite who transferred to the landschap school for their final two years.</p>	<p>Pendidikan dengan sistem Melayu laksana sebuah kuldesak, dirancang hanya untuk memberikan landasan bagi pendidikan dasar dan tidak memberikan jalan menuju pendidikan menengah. Pendidikan di sekolah <i>landschap</i> hanya berlangsung hingga tahun kelima seperti halnya pendidikan tiga tahun di sekolah kampung, kecuali bagi anak kaum elite yang pindah ke sekolah <i>landschap</i> untuk dua tahun terakhir pendidikannya.</p>	[7.12]
10.	<p>Even more than the general school population, teachers came from the elite. That said, however, the matter quickly becomes more complex. The elite in Toraja, as elsewhere, was itself subtly gradated. It becomes exceedingly difficult to subdivide the elite in an</p>	<p>Bahkan secara proporsional lebih banyak guru yang berasal dari kaum elite dibandingkan populasi murid. Namun, masalahnya sebenarnya jauh lebih rumit. Kaum elite di Toraja, sebagaimana di tempat lain, sangat berlapis-lapis. Sangat sulit membedakan secara</p>	[7.44]

<p>analytically satisfying way, for it does not supply its own easily visible demarcations, as the Thai system of <i>sakdina</i> (status points) does, for instance. One is forced to use such expressions as “high,” “middle,” and “low” elite in trying to locate the position of a given person within the broader status categories that were, and to some extent still are, commonly used in Toraja....</p>	<p>analitis lapisan-lapisan elite karena tidak ada garis batas yang jelas, sebagaimana halnya dalam sistem <i>sakdina</i> (batasan status) di Thailand, misalnya. Maka, terpaksa digunakan ungkapan seperti elite “tinggi,” “menengah,” dan “rendah” untuk menentukan kedudukan seseorang dalam kategori status lebih luas, yang biasa digunakan saat itu dan yang masih digunakan sekarang di Toraja....</p>	
--	---	--

Dengan terjadinya dualisme sistem pemerintahan dalam tata pemerintahan di Luwu (Sulawesi Selatan) dan di daerah luar Jawa pada umumnya (Ricklefs, 2005), setelah masuknya pemerintah Hindia Belanda (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tanah_Luwu, diakses 3 Januari 2012 pk1. 09.29), Toraja sebagai bagian dari daerah Luwu mengenal istilah seperti *afdeeling*, *onderafdeeling*, *controleur*, dan *landschap* yang terkait dengan pemerintahan tingkat tinggi kolonial. Hierarki struktur pemerintah pada tahun 1938 di Tana Toraja dapat dilihat pada bagan berikut ini (End, 1994, hlm. 760).



Gambar 5.1: Hierarki Struktur Pemerintah di Tana Toraja pada Tahun 1938

Afdeeling (7.21), menurut <http://id.wikipedia.org/wiki/Afdeling> (diakses 30 Desember 2011 pk. 00.55), merupakan wilayah administratif di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang merupakan bagian dari Keresidenan yang diperintah oleh asisten residen. Keresidenan sendiri, menurut *KBBI* (2008, hlm. 1298) merupakan wilayah yang menjadi bagian dari provinsi dan meliputi beberapa kabupaten, yang dikepalai oleh seorang residen.

Dalam Lampiran D yang dikutip Van den End (1994, hlm. 755–756) dijelaskan bahwa sampai tahun 1938 terdapat suatu *Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* (Gubernemen Sulawesi dan Protektoratnya). Wilayah gubernemen itu mencakup daerah yang sekarang disebut Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara (termasuk Sulawesi Barat). *Gouvernement* itu dikepalai gubernur. Wilayahnya terbagi atas sejumlah

afdeeling yang dikepalai oleh *assistant-resident* dan setiap *afdeeling* terbagi atas beberapa *onderafdeeling* yang setingkat dengan kabupaten.

Onderafdeeling (7.4) adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang *controleur* atau wedana bangsa Belanda di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah *onderafdeeling* terdiri atas beberapa *landschap* yang setingkat dengan kecamatan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Onderafdeling>, diakses 17 Nov 2011 pkl. 11.19).

Tana Toraja (Ma'kale Rantepao) merupakan salah satu dari lima *onderafdeeling* yang ada dalam wilayah *afdeeling* Luwu, yakni: Palopo, Ma'kale, Masamba, Malili, dan Mekongga Kolaka. Dari tahun 1912 hingga 1924, Rantepao dan Ma'kale merupakan dua *onderafdeeling* terpisah. Akan tetapi, pada tahun 1925 *onderafdeeling* Rantepao dan *onderafdeeling* Ma'kale digabungkan menjadi satu *onderafdeeling*. *Controleur* dari *onderafdeeling* gabungan itu sampai tahun 1927 berkedudukan di Rantepao dan mulai tahun 1927 berkedudukan di Ma'kale.

Controleur atau kontrolir menurut KBBI (2008, hlm. 807) adalah pengawas atau pegawai pemerintah Hindia Belanda yang kedudukannya di bawah asisten residen. *Controleur* (7.78) yang di Toraja menurut H.J. Koerts (dalam Waal, 2001) sering juga dikenal dengan istilah "Tuan Petoro" (Waal, 2001, hlm. 54) yang bertugas membantu atasannya yaitu asisten residen dalam tugas pemerintahan.

Sementara itu, *landschap* (7.12) dalam bahasa Belanda sama artinya dengan *landscape* dalam bahasa Inggris dan *lanskap* dalam bahasa Indonesia. *Landschap* dalam bahasa Belanda dahulu mengacu pada batas daerah atau wilayah (<http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape>, diakses tanggal 7 Januari 2011). *Landschap* atau sering disebut *daerah swapraja* atau *swatantra*, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, khususnya di Toraja, merupakan bagian wilayah yang terdiri dari beberapa distrik dan dipimpin oleh seorang kepala yang gelarnya berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan tradisi setempat. Pimpinan *landschap* wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda (End,1994).

Keempat istilah Belanda di atas, yakni *afdeeling*, *onderafdeeling*, *controleur*, dan *landschap* oleh penulis TSu tidak diberikan padanan Inggris

dalam teks yang ditulisnya. Penulis TSu sangat memahami pembaca sasarannya yang meskipun mungkin bukan penutur bahasa Belanda, namun sebagai sejarawan istilah itu tentu tidaklah asing bagi mereka. Selain itu, meskipun memiliki makna historis tersendiri, istilah itu tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Inggris karena perbedaan latar belakang struktur dan pemerintahan antara Inggris atau Amerika Serikat dan Belanda dan karena istilah itu juga mungkin hanya dikenal pada masa kolonial di Hindia Belanda.

Hal yang sama juga saya lakukan dalam penerjemahannya karena, menurut saya, istilah itu sarat dengan makna historis bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan orang Toraja pada khususnya. Sebagai sejarawan ataupun budayawan, pembaca sasaran tentu tidak begitu asing dengan istilah itu, bahkan mungkin memiliki pengalaman atau kesan tersendiri tentang istilah itu. Lagi pula, sistem pemerintahan dan pembagian wilayah administrasi yang berbeda antara masa kolonial dan masa kini mengakibatkan hilangnya konsep itu sehingga tidak ada padanan yang tepat untuk itu baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya keempat istilah itu tidak perlu diberikan padanan.

Istilah asing lain yang ditemukan dalam TSa adalah *sakdina* yang berasal dari bahasa Thai. Dalam <http://www.hrsolidarity.net/mainfile.php/1999vol09no06/1018/> (diakses tanggal 23 Mei 2011), Mark Tamthai menjelaskan bahwa *sakdina* adalah sebuah sistem hierarki sosial yang secara resmi masih berlaku hingga sekarang dalam masyarakat Thailand. Esensi sistem *sakdina* adalah tiap anggota masyarakat memiliki golongan sosial yang berbeda (diukur dengan satuan “*Na*”) bergantung pada posisi atau hakekat pekerjaan mereka. Hal itu memengaruhi cara mereka menempatkan diri dalam masyarakat. Di pengadilan, *Na* seseorang memengaruhi beratnya denda atau hukuman yang dijatuhkan. Anggota masyarakat Thailand dimungkinkan untuk mengubah *Na*, artinya naik atau turun tingkat).

Istilah *sakdina* dalam masyarakat Thailand, bagaimanapun, memiliki makna sosial budaya tersendiri yang tentunya tidak persis sama dengan makna sosial budaya dalam masyarakat pembaca baik TSu maupun TSa. Sebagaimana kata budaya khas Toraja, istilah *sakdina* yang juga terkait dengan sistem pelapisan

sosial pun tidak memiliki padanan yang tepat baik dalam bahasa Inggris yang digunakan penulis TSu maupun dalam bahasa Indonesia sebagai BSa. Lagipula makna yang dikandung oleh istilah itu sangat khas sehingga sulit dideskripsikan. Oleh karena itu, istilah tersebut menurut saya paling tepat diterjemahkan dengan prosedur penerjemahan transferensi.

Baik istilah Belanda maupun istilah Thai yang dianotasi pada bagian ini diterjemahkan dengan menggunakan prosedur penerjemahan transferensi.

5.1.2 Istilah Asing yang Diberi Padanan

Istilah Belanda lain yang diberi padanan dalam TSa adalah *zending* yang digunakan oleh penulis TSu dalam teks berbahasa Inggris.

Tabel 5.3: Istilah Asing yang Diberi Padanan

No	TSu	TSa	Par.
11.	... The Catholic mission, known by the Dutch term, <i>missie</i> , so as to distinguish it from its Protestant equivalent, <i>zending</i> , emphasized education as a conversion strategy at least as much as the Protestant mission did. Having received permission to proselytize in the highlands in 1937, only after having overcome the official reluctance of the Netherlands Indies government to permit mission competition in the Outer Islands, the <i>missie</i> felt more pressed to make up for lost time....	... Misi Katolik, dikenal dengan istilah Belanda <i>missie</i> , untuk membedakannya dari istilah <i>zending</i> yang digunakan oleh misi Protestan, mengutamakan pendidikan sebagai sebuah strategi untuk mencari pengikut baru, setidaknya seperti yang dilakukan misi Protestan. Dengan izin masuk ke dataran tinggi untuk mencari pengikut baru pada tahun 1937, setelah berhasil mengatasi keengganan pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkan persaingan misi di Kepulauan Luar, <i>missie</i> merasa makin terdesak untuk mengejar waktu yang hilang itu....	[7.31]

Universitas Indonesia

Menurut *KBBI* (2008, hlm. 1824), istilah *zending* mengacu pada kegiatan dan badan pekabaran Injil dalam upaya menyebarkan agama Kristen. Sementara itu, orang yang melakukan pekabaran Injil atau penyebaran agama Kristen, menurut [http://id.wikipedia.org/wiki/ Misionaris](http://id.wikipedia.org/wiki/Misionaris) (diakses 28 Desember 2011 pkl. 10.27), disebut *zendeling* ‘pengutusan’ (istilah Belanda).

Sampai tahun 1942, menurut End (1994, hlm. 18), ada empat golongan utusan Injil Eropa yang datang ke Indonesia. Para pekerja *zending* itu dalam istilah Belanda masing-masing disebut *zendeling-leeraar* (utusan pekabar Injil), *zendeling-onderwijzer* (utusan-guru), *zendeling-arts* (utusan-dokter), dan *zendeling-diacon* (utusan-mantri perawat). Setelah masa proklamasi, para *zendeling-leeraar* memperoleh status pendeta dan tidak ada lagi *zendeling-diacon*.

Penulis menggunakan istilah *zending* dalam TSu karena istilah itu masih digunakan dan bahkan cukup dikenal di masyarakat umum, apalagi bagi para sejarawan. Selain itu istilah itu juga sangat khas Belanda, sehingga penggunaan istilah itu secara otomatis mempertegas dari mana istilah dan lembaga *zending* itu berasal. Karena alasan itu pula, saya mempertahankan penggunaan istilah *zending* dalam menerjemahkan TSu dan bukan mendeskripsikan atau memberi penjelasan tambahan agar pembaca TSa dapat memahami istilah yang dimaksud. Berbeda dengan keempat istilah Belanda terkait dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda saat itu yang dipertahankan pemakaiannya dalam TSa karena perubahan sistem pemerintahan yang menyebabkan istilah itu sudah tidak berlaku lagi saat ini sehingga secara otomatis sulit untuk mencari padanan yang tepat. Istilah *zending* yang mulai dikenal sejak pemerintahan Hindia Belanda di Toraja, khususnya, dipertahankan justru karena sampai sekarang istilah itu masih dikenal oleh sebagian masyarakat Toraja bahkan mungkin bangsa Indonesia dari berbagai kalangan sebagai istilah asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai kosakata yang dipungut.

5.1.3 Istilah dengan Catatan Kaki

Pada hakekatnya pemberian catatan kaki pada teks dimaksudkan untuk memberikan keterangan atau penjelasan tambahan dari istilah atau pernyataan pada tubuh karangan, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4: Istilah dengan Catatan Kaki

No	TSu	TSa	Par.
12.	... These schools were supported by the GZB but subsidized by five per cent of the government revenues collected in Ma'kale-Rantepao, amounting to some f12,000 annually by the 1920s. In 1931, this subsidy was ended in favor of a monthly tuition of ten Dutch cents that was to be collected from each student by the teacher.	... Sekolah itu disokong oleh lembaga Gereformeerde Zendingbond (GZB), namun memperoleh subsidi 5 persen dari pendapatan tahunan pemerintah yang dikumpulkan di Ma'kale-Rantepao, sejumlah kurang lebih f12.000¹ pada tahun 1920-an. Subsidi itu dihentikan tahun 1931 dengan pemberlakuan uang sekolah bulanan sebesar 10 sen Belanda yang dikumpulkan guru dari setiap siswa.	[7.7]

Simbol *f* berasal dari mata uang lama Belanda yang disebut *florijn*, atau *florin* dalam Bahasa Inggris, yang kemudian berubah menjadi *gulden* (NLG). Mata uang *gulden* digunakan di Belanda pada tahun 1816—2002 sebelum digantikan oleh EURO (http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_gulden). Meskipun TSu ditulis dalam bahasa Inggris, penulis tidak serta-merta mengonversi nilai mata uang ini ke dolar Amerika Serikat atau poundsterling

¹ *f12.000* setara dengan Rp67.371.600,00) berdasarkan perhitungan konversi nilai mata uang gulden ke rupiah (*f1*=Rp5.614,00) yang terakhir diperbaharui pada tanggal 3 November 2011 (<http://coinmill.com/NLG-calculator.html#NLG=1>, diakses tanggal 4 November 2011).

Inggris yang berlaku saat TSu ditulis. Bagaimanapun, menggunakan mata uang dan nilainya yang berlaku pada suatu masa dalam teks dapat memberikan makna historis tersendiri bagi teks itu dan bagi pembaca sasaran di zaman yang berbeda.

Karena alasan itu, dalam penerjemahan TSu saya juga memilih untuk mempertahankan penulisan nilai dan simbol mata uang itu sebagaimana adanya seperti yang dilakukan oleh penulis TSu. Selain itu, penggunaan nilai mata uang sebagaimana yang ada dalam TSu akan dapat mencegah timbulnya kebingungan pada pembaca sasaran karena sifat fluktuatif nilai mata uang yang memungkinkan perubahan setiap saat mengikuti kurs yang ada sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran tentang nilai uang yang dimaksudkan dalam rupiah, saya memberikan catatan kaki pada TSa dengan mengacu pada hasil penghitungan *NLG Calculator* untuk konversi mata uang. Konversi yang diberikan pada catatan kaki itu saat pertama kali disebutkan juga sangat diperlukan karena mata uang itu beberapa kali disebutkan dalam teks.

5.1.4 Istilah Asing dengan Penghilangan

Berikut ini adalah anotasi dari istilah asing pada TSu, *litmus test*, yang dihilangkan dalam TSa.

Tabel 5.5: Istilah Asing dengan Penghilangan

No.	TSu	TSa	Par.
13.	The landschap schools in Ma'kale and Rantepao, the only two secular schools in these onderafdeeling, remained symbols of impiety even if they were largely staffed by Christian Malay-speakers. The litmus test for acceptability by the mission was religious education which a neutral school, by definition, could not	Kedua sekolah <i>landschap</i> sekuler yang ada di <i>onderafdeeling</i> Ma'kale dan Rantepao itu tetap dipandang sebagai simbol keduniawian meskipun sebagian besar karyawannya penganut Kristen yang berbahasa Melayu. Untuk dapat diterima oleh misi, sebuah sekolah harus mempunyai pendidikan agama yang tidak	[7.9]

	provide.	diberikan oleh sekolah netral, sesuai dengan namanya.	
--	----------	--	--

Secara umum Collins Compact Dictionary and Thesaurus (2002, hlm. 450) mengartikan *litmus test* sebagai “something which is regarded as a simple and accurate test of a particular thing.” Istilah *litmus test* secara khusus sering digunakan dalam bidang kimia dan politik. Menurut <http://www.webster-dictionary.org/definition/litmus%20test> (diakses 18 Juni 2012 pk1. 21.35) *litmus test* dapat diartikan sebagai “a test to determine acidity or alkalinity, using litmus as an indicator” atau “a test for a single factor, which has only two outcomes, positive or negative”. Sementara itu, <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/litmus-test>, diakses 18 Juni 2012 pk1. 21.38 yang juga memberikan dua pengertian dari *litmus test* mengartikannya sebagai “1) a test to establish the acidity or alkalinity of a mixture and 2) a critical indication of future success or failure”. Dilihat dari konteksnya, *litmus test* dalam TSu digunakan dalam kaitannya dengan ketentuan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah agar dapat diterima oleh misi. Dalam hal ini, *litmus test* tentu saja samasekali tidak berkaitan dengan sebuah uji kimiawi untuk menentukan keasaman dan unsur alkali yang terdapat dalam suatu campuran.

Jika dilihat dari kedua pengertian *litmus test* di atas, penulis TSu menggunakan istilah itu untuk menyatakan ada (positif) atau tidaknya (negatif) pendidikan agama di sekolah dan hal itu akan menentukan kesuksesan sekolah dan mungkin juga seseorang di masa mendatang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan agama dianggap sebagai penentu sebuah sekolah dapat diterima atau tidak oleh misi. Oleh karena itu, penghilangan istilah *litmus test* dari kalimat terakhir paragraf 7.9 itu dalam TSa sesungguhnya tidak mengubah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis TSu karena penggunaan istilah itu hanya untuk mempertegas maksud penulis.

5.2 Nama Diri dan Nama Jenis

Dalam *Kamus Linguistik*, Kridalaksana (2008, hlm. 161) mendefinisikan nama diri sebagai “nama orang, tempat, atau benda tertentu yang biasanya dipertentangkan dengan nama jenis”. Sementara itu, nama jenis (*common name*) diartikan sebagai nomina yang menunjukkan jenis umum benda atau konsep (Kridalaksana, 2008, hlm. 161). Senada dengan itu, dalam buku *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* yang disusun oleh Pusat Bahasa (2003, hlm. 5), nama diri diartikan sebagai “nama khas orang, tempat, negeri, bulan, hari, hari raya, majalah, dan sebagainya”. Walaupun khas, nama diri sering tidak mudah diidentifikasi dalam sebuah teks karena nama jenis pun dapat juga digunakan sebagai nama diri dalam hal tertentu. Selain itu, penggunaan nama diri berbeda atau khas di masing-masing budaya atau tempat.

5.2.1 Nama yang Tidak Diberi Padanan

Dalam TSu terdapat beberapa nama diri yang khas serta nama jenis, baik yang berasal dari bahasa Toraja maupun dari bahasa asing, terkait dengan nama wilayah, nama lembaga atau organisasi, nama penerbitan, nama bahasa, dan nama sekolah.

5.2.1.1 Nama Diri

Sebagaimana istilah, nama diri juga cukup banyak ditemukan dalam teks. Untuk keperluan anotasi ini, saya memilih dua nama diri yang berasal dari bahasa Toraja dan empat nama diri yang berasal dari bahasa Belanda.

Tabel 5.6: Nama Diri dalam Bahasa Toraja

No.	TSu	TSa	Par.
14.	... The top elite category in Rantepao is known as tomakaka while in Ma’kale there is one category higher,	... Kategori elite tertinggi di Rantepao dikenal dengan <i>tomakaka</i> , sementara di Ma’kale terdapat satu kategori	[7.44]

	the puang. This difference in the status structures of Ma'kale (particularly the Tallu Lembangna area) and Rantepao is essentially the result of greater social differentiation in Ma'kale than in Rantepao, perhaps due to Ma'kale's longer historical interaction with Bugis kingdoms.	yang lebih tinggi, yaitu <i>puang</i> . Perbedaan struktur status di Ma'kale (khususnya wilayah Tallu Lembangna) dan Rantepao pada dasarnya mengakibatkan perbedaan sosial yang lebih besar di Ma'kale daripada di Rantepao. Kemungkinan hal itu karena secara historis Ma'kale lebih lama berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan Bugis.	
15.	... <i>Soelo</i> (Torch) went to press in mid-1932 as a six to eight page monthly promoting (GZB) Christian values with articles in Malay and Tae'.	... <i>Soelo</i> (obor) naik cetak pada pertengahan tahun 1932 sebagai terbitan dengan enam sampai delapan halaman yang mengetengahkan nilai-nilai Kristiani (GZB) melalui berbagai artikel berbahasa Melayu dan Tae'.	[7.61]

Tallu Lembangna adalah nama wilayah di Toraja bagian selatan (Ma'kale). Tallu Lembangna berasal dari kata *tallu* yang berarti tiga dan *lembangna* yang berarti perahunya atau pemerintahan adatnya. Ketiga wilayah pemerintahan adat yang disatukan dalam Tallu Lembangna ini adalah Makale, Sangalla', dan Mengkendek (Bararuallo, 2010, hlm. 39).

Di Toraja terdapat beberapa pembagian wilayah seperti itu yang memiliki makna dan dampak sosial budaya tersendiri dengan latar belakang sejarah masing-masing. Hal itu tentu sangat disadari penulis sehingga penjelasan nama itu telah diuraikan oleh penulis pada Bab 1 saat pertama kali Tallu Lembangna disebut. Selain itu, secara umum istilah yang mengacu pada nama wilayah biasanya tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain.

Oleh karena itu dalam menerjemahkan TSu saya juga tetap menggunakan nama Tallu Lembangna sebagaimana yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, sebenarnya nama itu tidaklah asing khususnya bagi para sejarawan dan budayawan bahkan bagi masyarakat pada umumnya di Toraja. Tidak asing bukan berarti semua sudah mengenal seluk-beluk penamaan wilayah tersebut, namun lebih pada memiliki sedikit pengetahuan atau paling tidak pernah mendengar istilah itu. Lagipula, Tallu Lembangna ini mencakup tiga wilayah yang cukup besar dan dikenal di Toraja. Dengan demikian, menerapkan prosedur penerjemahan transferensi adalah hal yang patut dilakukan dalam menerjemahkan istilah Tallu Lembangna sebagai suatu bentuk topografi sebagaimana yang disarankan oleh Newmark (1988, hlm. 82).

Soelo adalah ejaan lama dari kata *sulo* dalam bahasa Toraja yang sama artinya dengan suluh atau obor dalam bahasa Indonesia. Kobong (2008, hlm.162) dan End (1994, hlm.17–18) mencatat bahwa *Soelo* adalah nama majalah bulanan yang mulai diterbitkan oleh Konferensi para Zending pada Juli 1931. Majalah itu memuat renungan, berita Tana Toraja, dan berita dari dunia luar, artikel mengenai pengetahuan umum dari berbagai bidang, dan rubrik-iseng. Majalah ini juga menjadi alat komunikasi para pelopor (*Bunga' Lalan*) pergerakan kemandirian yang menyerukan “kemajuan” dan persatuan orang Toraja. “Kemajuan” sebagai tema utama *Soelo* khususnya dalam tahun 1930-an menurut Kobong (2008, hlm. 239) selalu dilihat dalam hubungan dengan agama Kristen (Injil). Para penulis artikel di *Soelo* adalah para pekerja zending Belanda maupun Indonesia dan orang-orang Toraja di luar lingkungan zending yang menulis artikelnya dalam bahasa Tae’ atau bahasa Melayu. Pada tahun 1939 majalah *Soelo* itu bergabung dengan majalah *Petoendan* (“Beker”) terbitan zending di Mamasa menjadi bulanan *Barre Allo* (“Lingkaran Matahari”). Pecahnya perang mengakhiri penerbitan majalah itu. *Soelo* no. 1-15 masih distensil, sedangkan nomor-nomor sesudahnya sudah dicetak. Mula-mula oplag *Soelo* berjumlah 650 eksemplar, namun pada tahun 1934 telan meningkat menjadi 2.100 eksemplar.

Sebagai nama dari sebuah penerbitan atau majalah bulanan, *Soelo* tidak perlu diberi padanan. Tentu saja itulah alasan penulis TSu tetap menggunakan istilah *Soelo* itu di dalam teksnya. Walaupun demikian, penulis merasa perlu

menuliskan arti kata *soelo* secara umum sekadar untuk memperjelas adanya hubungan asosiasi di antara *Soelo* sebagai sebuah media komunikasi dan *soelo* dalam fungsinya sebagai penerang dalam kegelapan. Bagaimanapun, sebagai sebuah majalah *Soelo* sangat berperan dalam sejarah perkembangan masyarakat Toraja seperti yang telah disebutkan di atas.

Sementara itu, istilah *Soelo* bagi masyarakat Toraja bukanlah hal yang asing baik sebagai nama jenis maupun sebagai nama lembaga penerbitan. Meskipun pembaca sasaran TSa bukan hanya orang Toraja atau orang yang memahami bahasa Toraja, namun dari konteks dan terjemahan arti kata Indonesia yang diberikan oleh penulis TSu para pembaca sasaran akan dapat memahami makna kata itu. Itulah sebabnya saya menerjemahkan istilah itu dengan prosedur penerjemahan transferensi.

Tabel 5.7: Nama Diri dalam Bahasa Belanda

No.	TSa	TSu	Par.
16.	Graduates of the five-year course at the link school faced stiff competition to go on for further education. The largest portion of those continuing went to the School for More Extended Lower Education (MULO) in Makassar for three more years of Dutch-medium coursework. However, no more than five students from Ma' kale-Rantepao were admitted annually to the MULO....	Para lulusan dari pendidikan lima tahun di sekolah sambungan harus menghadapi kompetisi ketat untuk melanjutkan pendidikan. Sebagian besar melanjutkan pendidikan masuk Sekolah Menengah Pertama (MULO) di Makassar untuk mendapatkan tambahan tiga tahun pendidikan berbahasa Belanda. Akan tetapi, setiap tahun tidak lebih dari lima orang siswa dari Ma' kale-Rantepao diterima di MULO....	[7.25]
17.	The most prized appointment	Pendidikan lanjut yang paling	[7.26]

	for a link school graduate was to the School for Training Native Officials (OSVIA) in Makassar. The Makassar OSVIA admitted only 20 students annually from the entire eastern archipelago, according to an early Torajan trainee....	bergengsi bagi lulusan sekolah sambungan adalah Sekolah Pendidikan bagi Calon Pegawai Bumiputra (OSVIA) di Makassar. Setiap tahun, menurut seorang Toraja peserta pertama pelatihan, OSVIA Makassar hanya menerima 20 siswa dari seluruh bagian timur Nusantara....	
18.	<i>Soelo's</i> gloomy portrayal of nationalist politics came at a time when a few leading figures in the emerging Torajan elite began to themselves identify with moderate nationalist leaders in Java. One teacher named Albert Dendang, an early Torajan convert to Christianity, wrote to Indonesian leaders in the Volksraad complaining about Dutch administration in Ma'kale-Rantepao....	Gambaran suram <i>Soelo</i> mengenai politik nasionalis muncul pada saat beberapa figur pemimpin dalam elite Toraja yang sedang tumbuh mulai memihak kepada para pemimpin nasionalis di Jawa. Seorang guru bernama Albert Dendang, salah seorang Toraja yang pertama masuk Kristen, menulis surat kepada para pemimpin Indonesia di Volksraad yang mengeluhkan pemerintahan Belanda di Ma'kale-Rantepao....	[7.66]
19.	Some within the GZB had still a grander notion of Torajan destiny. The roots of this idea lay deep in the history of the mission in South and Central Sulawesi, probably nurtured	Beberapa orang dalam lingkungan GZB masih yakin bahwa Toraja ditakdirkan untuk berjaya. Pemikiran itu berakar dalam sejarah misi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah,	[7.80]

	<p>first by Adriani and Kruyt, who did succeed in wresting Posso out from under Luwu's control in 1907. Bandied about by Dutch missionaries from the several proselytizing organizations active among the highlanders in these regions over the following three decades, the notion of a "Toraja Raya" – a Greater Toraja composed of all highland groups in Central and South Sulawesi – received its clearest formulation in an <i>Alle den Volcke</i> article dating from 1932. The author, D. Saathof, had replaced the regular schakelschool head who was on furlough....</p>	<p>mungkin semula dipupuk oleh Adriani dan Kruyt yang berhasil membebaskan Poso dari kekuasaan Luwu pada tahun 1907. Setelah menjadi buah bibir para misionaris Belanda dari beberapa organisasi yang aktif menginjil penduduk dataran tinggi di daerah itu selama lebih dari tiga dekade, ide mengenai "Toraja Raya"–yang terdiri dari semua kelompok dataran tinggi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan–dirumuskan secara paling jelas dalam sebuah artikel <i>Alle den Volcke</i> pada tahun 1932. Penulisnya D. Saathof adalah pengganti kepala <i>schakelschool</i> yang sedang cuti....</p>	
--	--	---	--

MULO adalah singkatan dari *Meer uitgebreid lager onderwijs* yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan pendidikan rendah yang lebih diperluas. Pada tahun 1903 MULO masih berbentuk kursus (*cursussen voor meer uitgebreid lager onderwijs*) bagi anak-anak Belanda hingga resmi berdiri sebagai sekolah yang mandiri pada 15 Juni 1914. Sesuai dengan namanya, MULO, merupakan sekolah lanjutan bagi semua lulusan sekolah rendah (orang Indonesia, Cina, dan Eropa) kecuali Sekolah Desa (*Volkschool*). Oleh karena itu jugalah, MULO sering kali diterjemahkan atau disamakan dengan SLTP atau SMP (Ricklefs, 2005; Simbolon, 2006). Lama belajar di MULO adalah tiga sampai empat tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

Dalam sistem pendidikan Hindia Belanda, dikenal juga istilah OSVIA. Pendirian OSVIA (*Opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren* [sekolah pelatihan untuk pegawai pribumi]) pada tahun 1900, menurut Ricklefs (2005, hlm. 330) merupakan hasil penyusunan kembali tiga *hoofdscholen* (sekolah para kepala) yang lama di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Sesuai dengan namanya, OSVIA diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik para calon pegawai pribumi. Masa pendidikan OSVIA adalah lima tahun dengan bahasa pengantar Belanda. Sekolah itu terbuka bagi semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah rendah Eropa (ELS). Jadi, calon siswanya tidak lagi harus berasal dari kalangan elite. Pada tahun 1927, masa pendidikannya dikurangi menjadi tiga tahun.

Penulis TSu menggunakan akronim MULO dan OSVIA dalam TSu dengan menambahkan arti harfiah akronim itu dalam BSu. Hal itu dilakukan terutama karena istilah itu tidak memiliki padanan dalam BSu. Selain itu, pemadanan akan sangat sulit dilakukan karena kondisi masyarakat dan sistem pendidikan pada zaman kolonial sangat berbeda dari kondisi saat TSu ditulis yang secara otomatis menyebabkan perbedaan ciri dan jenis sekolah yang ada. Dengan demikian, pada kedua istilah itu terkandung makna historis perkembangan sistem pendidikan bangsa Indonesia secara khusus.

Karena alasan yang sama, dalam menerjemahkan TSu, saya memilih untuk mempertahankan istilah Belandanya, yakni MULO dan OSVIA. Sebenarnya, beragam padanan telah digunakan dalam buku sejarah untuk mengacu pada terjemahan kedua istilah itu. Sebagai contoh, dalam Waal (2001) ada dua padanan yang digunakan untuk mengacu pada istilah OSVIA, yakni Sekolah Pendidikan Menengah untuk Amtenar Pribumi dan Sekolah Pendidikan untuk Pamongpraja. Akan tetapi, saya menganggap penyamaan persepsi mengenai jenis sekolah yang dimaksud diperlukan paling tidak untuk mencegah kesalahpahaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu dalam menerjemahkan kedua istilah itu, saya mempertahankan istilah asingnya dengan menerapkan prosedur penerjemahan transferensi.

Sementara itu, istilah *Volksraad* (7.66) menurut sumber Wikipedia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad>, diakses 30 Desember 2011 pk. 00.34)

dan <http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/03/volksraad-dpr-versi-nederland/> (diakses 30 Desember 2011 pk. 00.46), diambil dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti ‘Dewan Rakyat’, yakni semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda. Dewan itu dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia-Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jenderal J. P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda, Thomas Bastiaan Pleyte, namun anggota Volksraad baru dilantik pada 18 Mei 1918 di Batavia. Volksraad, menurut Ricklefs (2005), didirikan sebagai lembaga dengan satu majelis yang hanya mempunyai wewenang menasihati dan tidak pernah tumbuh menjadi parlemen yang sebenarnya. Pada mulanya, lembaga itu beranggotakan 19 orang yang dipilih, 10 di antaranya adalah bangsa Indonesia, ditambah seorang ketua.

Meskipun Volksraad dapat dipadankan dengan lembaga perwakilan rakyat yang ada di berbagai negara saat ini, penulis TSu memilih untuk menggunakan istilah Belanda yang dipakai saat itu. Hal itu karena kekhasan Volksraad yang membedakannya dari lembaga perwakilan yang ada di masa sekarang, misalnya dalam hal sangat terbatasnya otoritas mereka sebagai sebuah parlemen. Volksraad, bagaimanapun, telah mencatat sejarah penting dalam perkembangan politik nasional Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila penulis menggunakan istilah Belanda dari lembaga perwakilan tersebut meskipun TSu ditulis dalam bahasa Inggris. Lagipula, pembaca sasaran TSu adalah sejarawan yang pasti sangat mengenal istilah itu. Karena alasan yang sama, dalam menerjemahkan TSu saya pun mempertahankan penggunaan istilah Volksraad dalam TSa sebagaimana yang dilakukan penulis TSu dengan prosedur penerjemahan transferensi.

Menurut End (1994, hlm. 10), *Alle den Volcke* ‘semua bangsa’ adalah nama majalah GZB yang mulai terbit pada tahun 1907. Sampai tahun 1913 *Alle den Volcke (AdV)* lebih banyak memuat tulisan yang bersifat umum. Setelah GZB mengutus A.A. van de Loosdrecht ke Toraja pada tahun 1913, *AdV* terutama memuat berita dari medan pekabaran Injil berupa surat serta laporan tahunan. Rubrik tetap yang dimuat selanjutnya ialah renungan, berita dari cabang, dan pertanggungjawaban pemasukan uang. Oleh karena itu, majalah *AdV* sangat penting peranannya bagi Toraja dan pekabaran Injil yang dilakukan GZB.

Sebagai nama terbitan, *Alle den Volcke*, sebagaimana *Soelo*, ditulis apa adanya. Hal yang sama telah dilakukan penulis TSu dengan tidak menerjemahkan nama diri yang berasal dari bahasa Belanda itu ke dalam bahasa Inggris, bahasa yang dipakai penulis dalam TSu. Hal yang sama juga saya lakukan, yakni menerapkan prosedur penerjemahan transferensi dalam menerjemahkan *Alle den Volcke*.

5.2.1.2 Nama Jenis

Berikut ini adalah anotasi dari dua nama jenis sekolah yang ada pada zaman kolonial yang tidak diberi padanan, yakni *volkschool* dan *vervolgschool*.

Tabel 5.8: Nama Jenis yang Tidak Diberi Padanan

No.	TSu	TSa	Par.
20.	... This meant that some attention had to be paid to establishing village primary schools on the model of the three-year village schools (<i>volkschool</i>) founded in Java in 1907.	... Itu berarti diperlukan perhatian lebih pada pembangunan sekolah dasar mengikuti sekolah rakyat tiga tahun (<i>volkschool</i>) yang didirikan di Jawa pada tahun 1907.	[7.6]
21.	... Two years later, the governor agreed to place only Christian teachers in the two secular schools and responded positively to GZB suggestions that these schools be converted to continuing schools (<i>vervolgschool</i>). By this formula, Grades 1 to 3 would be administered by the	... Dua tahun kemudian, gubernur setuju untuk menempatkan hanya guru Kristen di kedua sekolah sekuler itu dan menanggapi positif usulan GZB untuk mengubah keduanya menjadi sekolah lanjutan (<i>vervolgschool</i>). Dengan prinsip itu, kelas satu sampai kelas tiga dikelola oleh misi, sementara kelas empat dan lima dikelola oleh pemerintah.	[7.11]

mission while Grades 4 and 5 would be administered by the government.		
---	--	--

Volkschool (7.6) atau *desaschool* yang juga sering disebut sekolah rakyat didirikan pada tahun 1907 dengan lama belajar tiga tahun. Menurut Simbolon (2006, hlm. 226) sekolah ini dibangun untuk menjawab keterbatasan akses, daya tampung, dan kemampuan para penduduk bumiputera untuk masuk Sekolah Dasar Bumiputra Kelas Satu dan Kelas Dua. Ricklefs (2005, hlm. 334) menyebutkan bahwa mata pelajaran yang diberikan di *volkschool* adalah keterampilan dasar membaca, berhitung, dan keterampilan praktis dengan bahasa pengantar bahasa daerah.

Sementara itu, menurut Kobong (2008), *vervolgschool* (7.11) sama dengan sekolah lanjutan, artinya sesudah tiga tahun sekolah rakyat (sekolah desa) maka dilanjutkan lagi dua tahun. Oleh karena itu *vervolgschool* juga bisa disebut sebagai SD tingkat atas yang sama dengan kelas 4—5 yang ada di Ma’kale dan Rantepao. Sekolah yang didirikan oleh pemerintah setelah delapan tahun umur sekolah desa (*volkschool*) itu, menurut Simbolon (2006, hlm. 228) diadakan untuk merespon ketidakpuasan para lulusan sekolah desa yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi tidak memenuhi syarat untuk itu. Tujuan utama *vervolgschool* adalah untuk mempersiapkan lulusan sekolah desa masuk sekolah kejuruan. Hal yang senada juga disebutkan oleh Ricklefs (2005) bahwa pendirian *vervolgschool* atau *inlandsche vervolgscholen* ‘sekolah lanjutan pribumi’ dimaksudkan untuk mengantarkan para murid ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Penulis tetap menggunakan istilah *volkschool* dan *vervolgschool* dalam TSu tentu saja karena alasan yang sama dalam penggunaan nama sekolah seperti MULO, OSVIA, HIS, dan lain sebagainya. Alasan yang dimaksud adalah karena kekhasan sekolah yang sudah tidak ditemukan di masa sekarang dan karena adanya makna historis yang melekat pada istilah itu. Hal yang sama juga terlihat pada sebagian besar buku teks atau artikel yang membahas pendidikan di zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menggunakan istilah bahasa aslinya (Belanda) untuk mengacu pada sekolah tersebut. Walaupun demikian, beberapa teks atau

artikel lain juga berusaha menerjemahkan atau memberikan penjelasan nama sekolah atau jenjang pendidikan tersebut. Namun, tidak jarang jenis sekolah yang sama diterjemahkan dengan cara yang berbeda mungkin atas inisiatif penerjemah sendiri atau kemungkinan juga disesuaikan dengan sebutan yang lazim di suatu daerah saat itu.

Dalam beberapa teks, baik *volkschool* maupun *vervolgschool* memiliki sebutan yang bervariasi dalam penerjemahannya. *Volkschool*, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kadang disebut dengan *desaschool* atau sekolah desa, kadang sekolah kampung, dan di tempat lain juga disebut sekolah rakyat. Demikian pula dengan istilah *vervolgschool* yang kadang disebut sekolah lanjutan pribumi (Ricklefs, 2005), kadang hanya sekolah lanjutan, namun ada juga yang menyebutnya dengan sekolah sambungan sehingga dapat dikacaukan dengan *schakelschool*. Karena kondisi tersebut, dalam menerjemahkan TSu saya memilih untuk tidak memberikan padanan dan menuliskan istilah tersebut sesuai dengan bahasa aslinya sebagaimana yang dilakukan penulis TSu. Dengan penerapan prosedur penerjemahan transferensi dalam menerjemahkan TSu itu, perbedaan persepsi mengenai jenis sekolah yang dimaksud diharapkan akan dapat diminimalisir

5.2.2 Nama Diri yang Diberi Padanan

Berikut ini adalah anotasi dari tiga nama diri yang diberi padanan dalam bahasa Indonesia menjadi Gereja Protestan Indonesia, Hindia Belanda, dan Partai Indonesia Raya.

Tabel 5.9: Nama Diri yang Diberi Padanan

No.	TSu	TSa	Par.
22.	^f Estimated total of the two landschap schools and few village schools opened by the Indies Protestant Church.	^f Perkiraan jumlah dua sekolah <i>landschap</i> dan beberapa sekolah kampung yang dibuka oleh Gereja Protestan Indonesia.	[7.10]

23.	<p>... It was the rare, well-born “Indonesian” who attained access to higher education in the Indies (and much less often in the Netherlands), but one did not have to go so far to be among the educated elite in the Netherlands East Indies; a secondary education put one in a select enough group.</p>	<p>... Jarang terjadi, “orang Indonesia” dari kalangan atas yang mendapatkan akses ke pendidikan tinggi di Hindia (dan jauh lebih jarang lagi yang mendapatkan kesempatan ke Belanda). Namun seseorang tidak perlu mendapat pendidikan begitu tinggi untuk mendapatkan tempat di antara para elite berpendidikan di Hindia Belanda; pendidikan menengah sudah cukup untuk menempatkan seseorang dalam kelompok yang cukup terpilih.</p>	[7.16]
24.	<p>... No openly political organizations existed in the Ma’kale-Rantepao area though a few men belonged individually to the Thamrin-Sutomo Parindra (Greater Indonesian Party), which was based in Java. Muhammadiyah, the modernist Islamic social organization, was clandestinely political and radical. However, because Muhammadiyah was composed mainly of immigrant Bugis and Bugis-Toraja mestizos, it is treated in Chapters 6, 8, and 9 but</p>	<p>... Tidak ada organisasi politik terbuka di daerah Ma’kale-Rantepao namun beberapa orang secara individual masuk ke Parindra (Partai Indonesia Raya) pimpinan Thamrin-Sutomo yang berbasis di Jawa. Muhammadiyah, organisasi sosial Islam modern, secara sembunyi-sembunyi bersifat politis dan radikal. Akan tetapi, karena anggota Muhammadiyah sebagian besar adalah imigran Bugis dan peranakan Bugis-Toraja (lihat uraian dalam Bab 6, 8, dan 9), kelompok itu tidak dibahas sebagai organisasi</p>	[7.52]

	excluded from this treatment of Torajan organizations.	Toraja.	
--	--	---------	--

Dalam beberapa teks terjemahan, Gereja Protestan Indonesia (GPI) sebagai nama lembaga sudah diterima sebagai padanan dari istilah the Indies Protestant Church. Meskipun demikian, selain Gereja Protestan Indonesia ada juga yang memadankannya dengan Gereja Protestan saja atau Gereja Protestan di Indonesia.

Menurut Locher (1997, hlm. 312), Gereja Protestan Indonesia dibentuk untuk melanjutkan pemeliharaan terhadap jemaat-jemaat Protestan yang pernah dilayani oleh Gereja Gereformeerd (Hervormd) Belanda di Indonesia di bawah penguasaan negara. Karena itulah GPI berciri protestan dalam rangka mempersatukan semua aliran reformasi di Indonesia, menjadi gereja pegawai karena para pendeta diangkat dan diawasi oleh pemerintah dan organisasinya diintegrasikan dalam sistem bernegara. Sementara itu, Kobong (2008, hlm. 125-127) menganggap bahwa sebagai lembaga negara kegiatan pekabaran Injil oleh Gereja Protestan (Indonesia) harus dipandang dalam kaitan strategi kolonial pada masa sekitar pergantian abad. Walaupun demikian, pemerintah kolonial hanya mengizinkan Gereja Protestan melakukan kegiatan pekabaran Injil selama GZB belum mampu melakukannya.

Dalam menerjemahkan TSu itu, saya memilih menggunakan Gereja Protestan Indonesia sebagai padanan dari the Indies Protestant Church sebagaimana yang digunakan End (1994). Hal itu karena padanan itu tampak lebih netral dan lebih luas pemakaiannya.

Menurut sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda (diakses 17 November 2011 pk. 11.50), Hindia-Belanda (bahasa Belanda: *Nederlands(ch)-Indië*) adalah wilayah koloni Belanda yang diakui secara *de jure* dan *de facto*. Kepala negara Hindia-Belanda adalah Ratu/Raja Belanda dengan perwakilannya yang berkuasa penuh seorang Gubernur-Jendral. Sumber yang sama juga menjelaskan bahwa dalam UU Kerajaan Belanda tahun 1814 disebutkan bahwa Hindia Belanda merupakan wilayah berdaulat Kerajaan Belanda. UU itu

diamandemen tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut perkembangan wilayah Hindia-Belanda.

Dalam sejumlah literatur dapat ditemukan dua istilah yang berbeda yaitu the Netherlands West Indies (yang dalam bahasa Belanda disebut Nederlands West Indie) atau Hindia Belanda Barat dan the Netherlands East Indies (yang dalam bahasa Belanda disebut Nederlands Oost Indie) atau Hindia Belanda Timur yang sering hanya disebut sebagai Hindia Belanda. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Dagun (2000, hlm. 342) menjelaskan bahwa Hindia Belanda Barat merupakan bagian kerajaan Belanda di benua Amerika yang termasuk di dalamnya Suriname, sedangkan Hindia Belanda Timur adalah bagian kerajaan Belanda yang meliputi daerah kekuasaan Belanda di Timur Jauh seperti Indonesia, Sri Lanka, Formosa, Malaka, Pesisir Malabar, Negapatnam di pantai Coromandel, sejak abad ke-17.

Walaupun ada tambahan kata *East* dan *West* untuk membedakan kedua wilayah besar kekuasaan kerajaan Belanda di zaman penjajahan, namun sebahagian besar artikel hanya menerjemahkan the Netherlands East Indies menjadi Hindia Belanda. Hal yang sama juga ditemukan dalam Kamus Inggris Indonesia (Echols & Shadily) yang memadankan the East Indies dengan Hindia Belanda, sementara untuk the West Indies dipadankan dengan Hindia Barat. Karena istilah Hindia Belanda sebagai sebuah topografi sudah sangat lazim di Indonesia untuk merujuk pada wilayah jajahan Belanda yang mencakup keseluruhan daerah Indonesia saat ini, maka dalam menerjemahkan teks ini saya memilih untuk menggunakan istilah itu dalam Tsa. Secara lebih tegas, dapat dikatakan bahwa istilah Hindia Belanda sudah merupakan terjemahan baku dari the Netherlands East Indies.

Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Indonesia_Raya (diakses 7 Mei 2012, pk1. 22.52), Partai Indonesia Raya atau Parindra adalah sebuah partai politik yang didirikan berdasarkan nasionalisme Indonesia dengan tujuan mencapai Indonesia Mulia dan Sempurna (bukan Indonesia Merdeka). Parindra menganut asas *cooperatie* atau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan untuk waktu tertentu. Parindra merupakan hasil penggabungan dari PBI (Persatuan Bangsa Indonesia), Serikat

Selebes, Serikat Sumatera, Serikat Ambon, Budi Utomo, dan lain sebagainya. Penggabungan itu dilakukan oleh Dr. Sutomo, Pendiri Budi Utomo, pada akhir tahun 1935 di Solo untuk menandai berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan. Hal-hal yang dilakukan oleh Parindra adalah: mendirikan Rukun Tani, menyusun serikat pekerja perkapalan dengan mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin), menyusun perekonomian dengan menganjurkan *Swadeshi* (menolong diri sendiri), mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan percetakan untuk menerbitkan surat kabar dan majalah.

Sebagai sebuah partai politik yang pernah sangat berperan dalam sejarah bangsa Indonesia, nama Parindra sangat dikenal luas di seluruh Indonesia bahkan hingga sekarang. Oleh karena itu tidaklah begitu sulit untuk menerjemahkan nama itu dari TSu ke dalam TSa, bahasa asal Partai Indonesia Raya (Parindra) itu. Jadi, dalam menerjemahkan Gereja Protestan Indonesia, Hindia Belanda, dan Partai Indonesia Raya saya menerapkan prosedur penerjemahan dengan terjemahan resmi.

5.2.3 Nama Diri yang Dilengkapi Penjelasan Tambahan

Berikut ini adalah anotasi dua nama diri yang diberi penjelasan tambahan pada TSa.

Tabel 5.10: Nama Diri yang Dilengkapi Penjelasan Tambahan

No.	TSu	TSa	Par.
25.	... These schools were supported by the GZB but subsidized by five per cent of the government revenues collected in Ma'kale-Rantepao, amounting to	... Sekolah itu disokong oleh lembaga Gereformeerde Zendingsbond (GZB) , namun memperoleh subsidi 5 persen dari pendapatan tahunan pemerintah yang dikumpulkan di Ma'kale-	[7.7]

	<p>some <i>f</i>12,000 annually by the 1920s. In 1931, this subsidy was ended in favor of a monthly tuition of ten Dutch cents that was to be collected from each student by the teacher.</p>	<p>Rantepao, sejumlah kurang lebih <i>f</i>12.000² pada tahun 1920-an. Subsidi itu dihentikan tahun 1931 dengan pemberlakuan uang sekolah bulanan sebesar 10 sen Belanda yang dikumpulkan guru dari setiap siswa.</p>	
26.	<p>The feeling manifested itself in other ways. Most Malay speakers showed little inclination to learn Tae' to augment Malay as a language of instruction in the village schools. The use of Tae' made some inroads under the persistent supervision of van de Loosdrecht from 1914 to 1917, but the teachers' resistance coupled with a total turnover of the teaching staff after the attempted rebellion in 1917 impeded extensive use of Tae' until the mid-1920s, by which time most teachers were Toraja.</p>	<p>Perasaan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk. Sebagian besar penutur bahasa Melayu kurang berminat untuk belajar bahasa Tae' demi peningkatan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di berbagai sekolah kampung. Penggunaan Tae' mengalami kemajuan yang cukup berarti di bawah pengawasan van de Loosdrecht dari tahun 1914—1917. Namun, resistensi para guru, seiring dengan pergantian seluruh staf guru setelah percobaan pemberontakan pada tahun 1917, merintangangi penggunaan Tae' secara luas sampai pertengahan tahun 1920-an, saat sebagian besar guru berasal dari Toraja.</p>	[7.38]

² *f*12.000 setara dengan Rp67.371.600,00) berdasarkan perhitungan konversi nilai mata uang gulden ke rupiah (*f*1=Rp5.614,00) yang terakhir diperbaharui pada tanggal 3 November 2011 (<http://coinmill.com/NLG-calculator.html#NLG=1>, diakses tanggal 4 November 2011).

GZB merupakan singkatan dari Gereformeerde Zendingsbond, sebuah lembaga pekabaran Injil yang berpusat di Utrecht, Belanda. Menurut End (1994) GZB yang menganut teologi reformatoris didirikan pada tanggal 6 Februari 1901 dengan Anggaran Dasar yang berbeda dari lembaga pekabaran Injil lain yang bekerja dalam lingkungan *Nederlandse Hervormde Kerk*. Di tahun-tahun awal berdirinya, GZB memakai tiga sarana untuk sosialisasi, yaitu ceramah-ceramah, cabang-cabang serta komisi-komisi setempat dan majalah *Alle den Volcke*. Sebelum memiliki majalah sendiri (*Alle den Volcke*), pemberitahuan GZB dimuat dalam salah satu majalah yang sealiran. End (1994) juga mengungkapkan bahwa penempatan GZB ke Toraja Sulawesi Selatan adalah atas kesepakatan pemerintah Hindia Belanda dengan beberapa tokoh terkemuka dari dunia pekabaran Injil Belanda, meskipun awalnya GZB mengusulkan Pulau Jawa dan Taiwan.

Dalam menerjemahkan istilah GZB, saya telah mencoba melakukan penelusuran dokumen yang terkait dengan kegiatan GZB di Indonesia khususnya di Toraja. Dari penelusuran tersebut, saya menemukan bahwa pada umumnya GZB tidak diberikan padanan. Hal itu kemungkinan karena bagi lembaga penginjilan GZB sudah cukup dikenal dan mungkin memang tidak pernah ada terjemahan baku dari nama itu dalam bahasa Indonesia. Penulis TSu juga tentu menyadari hal itu sehingga menggunakan nama itu dalam tulisannya. Akan tetapi, untuk memperjelas jenis istilah ini kepada pembaca TSa, saya akan menambahkan kata lembaga dan kepanjangan dari singkatan GZB tersebut sebagai penjelasan tambahan menjadi “lembaga Gereformeerde Zendingsbond (GZB)” khususnya saat pertama kali disebutkan dalam teks seperti di atas.

Menurut Salzner (dalam Salombe, 1982), suku Toraja oleh Adriani-Kruyt dikelompokkan atas Toraja Timur (di daerah Tojo-Poso, Sulawesi Tengah), Toraja Barat (di daerah Kaili-Parigi, Sulawesi Tengah), dan Toraja Selatan (disebut juga Toraja Sa’dan). Bahasa di ketiga daerah itu berturut-turut diberi nama bahasa *Bare’e*, bahasa *Uma*, bahasa *Tae’*, berdasarkan kata negasi *bare’e* ‘tidak’; *uma* ‘tidak’; *tae’* ‘tidak’ yang umum terdapat dalam setiap bahasa.

Walaupun Van der Veen, penyusun kamus Bahasa Toraja, pada beberapa kesempatan menggunakan istilah *Tae’*, dalam suratnya kepada J.J. Kijne, sekretaris NBG untuk urusan terjemahan, tgl. 2-3-1954 (ANBG/Van der Veen,

V/3) Van der Veen memberitakan bahwa di pihak orang Toraja telah timbul keberatan terhadap sebutan “bahasa *Tae*”. Karena alasan itu, untuk mengganti istilah *Tae*’ Van der Veen lebih memilih untuk memakai sebutan “Bahasa Toraja Selatan” daripada “Bahasa Toraja-Sa’dan” yang menurutnya tidak mencakup daerah yang cukup luas (End,1994). Meskipun demikian, untuk membedakan bahasa suku Toraja mana yang dimaksud, dalam terjemahan ini akan dipertahankan istilah *Tae*’ untuk mengacu pada bahasa suku Toraja yang mendiami wilayah Sa’dan dan sekitarnya.

Saya menambahkan kata ‘bahasa’ sehingga menjadi ‘bahasa *Tae*’ dalam TSa karena istilah *Tae*’ ataupun bahasa Toraja Selatan sebenarnya tidak begitu lazim digunakan di Toraja untuk mengacu pada bahasa yang digunakan di Toraja saat ini. Dalam percakapan sehari-hari, masyarakat pada umumnya hanya mengenal istilah bahasa Toraja bukan *Tae*’ untuk maksud yang sama. Dengan demikian prosedur penerjemahan yang saya gunakan untuk menerjemahkan kata *Tae*’ adalah penerjemahan dengan penjelasan tambahan untuk memperjelas makna dari istilah itu.

5.2.4 Nama Diri yang Dilengkapi Catatan Kaki

Berikut ini adalah anotasi dari istilah yang diterjemahkan dengan penambahan catatan kaki.

Tabel 5.11: Nama Diri yang Dilengkapi Catatan Kaki

No.	TSu	TSa	Par.
27.	Once the Netherlands East Indies government opened the European Primary Schools (ELS) to “Indonesians” in 1903, many well-off parents sought to place their children in these schools as the surest route to a good position in the	Ketika pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Dasar Eropa (ELS) bagi “orang Indonesia” pada tahun 1903, banyak orang tua mampu yang berusaha memasukkan anaknya ke sekolah itu sebagai jalur paling pasti untuk mendapatkan	[7.17]

	colonial service. The European system was later closed to them with the rationale that it was being swamped by indigenous students, and a parallel system of Dutch Native Schools (HIS) was established in 1914 to accommodate the growing desire for a Dutch education....	posisi bagus dalam dinas kolonial. Pendidikan Eropa kemudian ditutup bagi mereka dengan alasan sekolah itu sudah dibanjiri murid pribumi dan suatu sistem pendidikan paralel Sekolah Pribumi Berbahasa Belanda (HIS) ³ didirikan tahun 1914 untuk menampung minat yang meningkat pada pendidikan berbahasa Belanda....	
--	--	--	--

HIS, seperti yang telah dicantumkan pada catatan kaki, adalah singkatan dari Hollandsch-Inlandsche School atau Sekolah Bumiputera-Belanda. Menurut Azkia Alwi dalam <http://www.slideshare.net/anannur/pendidikan-di-indonesia-pada-masa-penjajahan> (diakses 23 Desember 2011 pk. 23.46), HIS mengacu pada sekolah rendah yang berbahasa pengantar Belanda untuk golongan penduduk Indonesia asli dengan lama belajar tujuh tahun. Sekolah itu pertama kali didirikan pada tahun 1914 seiring diberlakukannya Politik Etis. Pada awalnya, sekolah itu disediakan untuk anak kaum bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, atau pegawai negeri.

HIS tidak diberikan padanan oleh penulis TSu karena merupakan akronim dari lembaga yang pernah ada dan punya makna penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di Indonesia, istilah itu ada yang menerjemahkannya dengan Sekolah Bumiputera-Belanda, seperti istilah yang digunakan Azkia Alwi di atas, dan ada pula yang menerjemahkannya dengan istilah Sekolah Belanda Pribumi (Ricklefs, 2005, hlm. 332). Dalam menerjemahkan TSu, saya juga mempertahankan penggunaan istilah itu dengan tambahan catatan kaki untuk memberikan keterangan atau tambahan informasi mengenai kepanjangan dari singkatan HIS dalam bahasa Belanda, bahasa asal istilah itu. Hal itu dilakukan karena penulis

³ HIS merupakan singkatan dari Hollandsch-Inlandsche School.

TSu tidak mencantumkan kepanjangan dari singkatan HIS itu dalam TSu khususnya dalam teks pilihan yang saya terjemahkan dan jika ditulis dalam tubuh karangan akan cukup mengganggu kenyamanan dalam membaca teks. Dengan demikian dalam menerjemahkan HIS saya menerapkan prosedur penerjemahan dengan pemberian catatan kaki.

5.2.5 Nama Diri dengan Penghilangan

Berikut ini adalah penggunaan prosedur penghilangan pada nama diri tanah Toraja, Perserikatan Toraja Kristen, dan Partai Nasional Indonesia.

Tabel 5.12: Nama Diri dengan Penghilangan

No.	TSu	TSa	Par.
28.	... The organizational charter emphasized “building brotherhood among the Torajan people so that they become united” [<i>bersehati</i>], collecting money to help put deserving students through school, and “devoting attention to the matter of advancing the life of the people of <i>tanah Toraja</i> [my italics].” This PBL charter is the first document in which Toraja portrayed themselves as a people named “Toraja” and identified themselves with a geographic space they called the land of Toraja (“tanah Toraja”) Anggaran dasar organisasi menekankan pada “pembangunan persaudaraan di kalangan orang Toraja agar mereka bersatu” [<i>bersehati</i>], mengumpulkan beasiswa bagi murid yang kurang mampu menyelesaikan sekolahnya, dan “mencurahkan perhatian pada upaya memajukan kehidupan orang <i>tanah Toraja</i> [cetak miring dari saya].” Anggaran dasar PBL itu merupakan dokumen pertama tempat orang Toraja menyatakan diri sebagai orang “Toraja” dan memperkenalkan diri dengan sebuah wilayah geografis yang mereka sebut “ tanah Toraja ”.	[7.69]

Universitas Indonesia

29.	<p>A group of about ten young Christian graduates from the link and continuing schools and one from the Palopo HIS founded a rival organization in Ma'kale two years later. The Perserikatan Toraja Kristen (PTC, Christian Toraja Union) struck a stance at once more religious and more militant than that of the PBL, though its stated goal was similar: to form an association that would "... join together a still divided Torajan people...."</p>	<p>Sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar sepuluh pemuda Kristen lulusan sekolah sambungan dan sekolah lanjutan dan satu dari HIS Palopo mendirikan sebuah organisasi tandingan di Ma'kale dua tahun kemudian. Perserikatan Toraja Kristen (PTC) serta-merta bersikap lebih religius dan militan daripada PBL, meskipun tujuan yang ditetapkan sama, yaitu untuk membentuk sebuah asosiasi yang akan "... menyatukan orang Toraja yang masih tercerai-berai"</p>	[7.70]
30.	<p>... What nationalist interest was generated among these Christians was of the "responsible" stripe represented by the Thamrin-Sutomo Parindra in the mid- to late-1930s: the cooperators as opposed to the non-cooperators, as represented by Sukarno's Partai Nasional Indonesia (PNI, Indonesian National Party).</p>	<p>... Minat nasionalis yang tumbuh di kalangan pemuda Kristen itu adalah rasa "tanggung jawab" yang ditunjukkan oleh Parindra Thamrin-Sutomo dari pertengahan sampai akhir tahun 1930-an, yaitu menjadi kooperator yang dipertentangkan dengan nonkooperator, sebagaimana diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) Sukarno.</p>	[7.75]

Menurut Pasanda (1995, hlm. 1) ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Toraja, diantaranya adalah sesuai dengan penamaan yang diberikan oleh orang Bugis Luwu, Bugis Sidenreng, Makassar, dan masyarakat Toraja sendiri. Orang Bugis Luwu menyebut Toraja dengan To Riaja, yaitu kelompok masyarakat yang bermukim di daerah sebelah barat (*ri aja*) Luwu. Orang Bugis Sidenreng menyebutnya To Riaya, yaitu kelompok masyarakat yang bermukim di daerah bagian atas (pegunungan). Orang Makassar (Gowa) menyebutnya Toraja yang mengandung arti negeri asal raya seperti yang acap disebut dalam legenda *La Kipadada* dan *I Lando Belua*, Raja Gowa yang dalam versi Toraja disebut *Lando Rundun*. Masyarakat Toraja sendiri menyebut diri mereka To Raa atau To Raya – berasal dari kata *maraa* atau *maraya* yang berarti murah atau besar – jadi orang Toraja berarti orang pemurah hati atau orang besar, rendah hati, sederhana, toleran, demokratis, sederajat, dan tidak dalam arti orang besar yang berkuasa.

Paham mengenai “Toraja” sebagai penamaan bangsa tertentu menurut Kobong (2008, hlm. 180) masih relatif muda. Menurutnya, orang Toraja dalam sejarah mereka tidak mengenal kesatuan politis dalam arti yang sebenarnya. Zending menggunakan nama “Toraja” itu dalam nama gereja yang sedang menuju kedewasaannya, dan selanjutnya Gereja Toraja memberi isi dan makna kepada konsepsi itu. Rasa kebersamaan dan persekutuan orang Toraja itu kemudian diperkuat dengan diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa Toraja yang merupakan jasa besar zending di bidang kebudayaan.

Selanjutnya, Koresponden Gereja (Korger) dalam Sarira (1975, hlm. 17-18) membedakan ejaan *Tana Toraja* dengan *tanah Toraja*. *Tana Toraja* dipakai untuk menyebutkan daerah Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dulu disebut *onderafdeeling* Makale-Rantepao. Tanah (tanah) Toraja dipakai untuk menyebutkan daerah-daerah yang diduduki oleh suku Toraja khususnya daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu. Kabupaten Tana Toraja yang dimaksudkan di sini mencakup wilayah kabupaten sebelum dimekarkan menjadi Tana Toraja dan Toraja Utara sejak tahun 2006.

Pembedaan penggunaan istilah *Tana Toraja* dan *tanah Toraja* sebenarnya sudah lazim khususnya bagi masyarakat Toraja bahkan mungkin juga bagi orang Indonesia terutama yang cukup mengenal Toraja atau mengakses pustaka

menyangkut Toraja. Di samping itu, pembaca sasaran TSa adalah orang Indonesia khususnya sejarawan dan budayawan yang dianggap mampu menangkap perbedaan antara kata Tana dan tanah sehingga saya menganggap penjelasan tambahan mengenai istilah itu tidak dibutuhkan oleh pembaca TSa. Oleh karena itu, saya menghilangkan penjelasan tambahan itu dengan menerapkan prosedur penerjemahan dengan penghilangan dalam menerjemahkan TSu.

Perserikatan Toraja Kristen (PTC) didirikan pada tahun 1936 oleh para intelektual muda dan para pegawai yang mendapatkan pendidikan lanjutan di luar Tana Toraja dan yang kembali ke Toraja dengan sikap yang kritis terhadap penguasa kolonial bahkan terhadap semua yang menyebabkan orang Toraja menjadi objek penghinaan (Kobong, 2008, hlm. 240).

Sebagai sebuah organisasi lokal yang eksis di masa kolonial, PTC pasti sangat dikenal oleh sejarawan dan budayawan meskipun mungkin sudah tidak dikenal lagi oleh masyarakat umum sekarang ini. Walaupun demikian, penulis TSu sudah cukup banyak memberikan informasi mengenai organisasi itu bahkan telah berusaha memberikan terjemahan Inggris dari istilah itu kepada para pembaca sasaran TSu. Selain itu, organisasi tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang bahkan pernah cukup berpengaruh dalam masyarakat pembaca TSa khususnya di lingkungan Toraja sehingga dari membaca namanya saja para pembaca sudah dapat menduga bentuk bahkan mungkin tujuan dari organisasi itu.

Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia (diakses 7 Mei 2012, pkl. 22.58), PNI atau Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia yang didirikan dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Mr. Sunaryo pada 4 Juli 1927. Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) dan menjadi pemenang Pemilihan Umum 1955. Pada tahun 1973 PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya dan membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Dipimpin oleh Supeni, PNI didirikan kembali pada tahun 1998. Setahun kemudian, PNI menjadi peserta pemilu 1999. Pada tahun 2002 PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme yang diketuai oleh Sukmawati Soekarnoputri. Partai Nasional Indonesia dengan demikian, tidak hanya dikenal pada masa sebelum

kemerdekaan Indonesia, namun hingga abad ke-21 ini karena keterlibatannya dalam kehidupan politis bangsa Indonesia.

Penulis TSu yang berbahasa Inggris tentu saja sebelumnya tidak memahami makna tanah Toraja, PTC, dan PNI. Oleh karena itu, penulis pun sangat memahami bahwa pembaca sasaran TSu juga tidak akan mengerti makna istilah itu. Oleh karena itu, wajar apabila penulis mencantumkan penjelasan atau padanan dari istilah itu pada TSu. Hal itu berbeda kondisinya dengan TSa yang ditujukan kepada penutur bahasa Indonesia sebagai BSa, sehingga secara otomatis saya tidak perlu menuliskan penjelasan makna istilah itu sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh penulis dalam TSu.

Dengan demikian, saya menerapkan prosedur penerjemahan dengan penghilangan dalam menerjemahkan tanah Toraja, Perserikatan Toraja Kristen, dan Partai Nasional Indonesia dengan menghilangkan penjelasan tambahan yang pada TSu ditulis dalam bahasa Inggris.

5.2.6 Nama Diri dengan Kuplet

Penggunaan lebih dari satu prosedur penerjemahan atau kuplet dalam penerjemahan TSu dilakukan dalam tiga kasus yaitu pengindonesiaan dan penjelasan tambahan; penghilangan dan naturalisasi; serta penghilangan dan transferensi.

Tabel 5.13: Pengindonesiaan dengan Penjelasan Tambahan

No.	TSu	TSa	Par.
31.	... However, some employment possibilities remained for evangelists hired and trained by the mission. Makassar, Pare-Pare, and Palopo offered opportunities in the police force to a number of	... Meskipun demikian, tersisa sejumlah peluang kerja bagi para penginjil yang digaji dan dilatih oleh misi. Makassar, Pare-Pare, dan Palopo menawarkan kesempatan untuk masuk angkatan kepolisian bagi sejumlah lulusan sekolah lanjutan,	[7.14]

	<p>continuing school graduates, while others managed to find niches elsewhere in the lower echelons of the colonial service, but these opportunities were also decreasing under the effects of the Great Depression.</p>	<p>sementara yang lain berhasil mendapatkan posisi pada eselon rendah dalam dinas kolonial, namun peluang itu juga menurun karena dampak Depresi Ekonomi yang melanda dunia.</p>	
--	---	---	--

Dalam Kamus Politik dan Hukum, Sumbu, et al. (2000, hlm. 140) mendefinisikan *Depresi* sebagai Keadaan atau kelesuan ekonomi (perdagangan) yang diakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat, menurunnya tingkat Produk Nasional Bruto atau Gross National Product (GNP), dan menurunnya berbagai aktivitas usaha. Depresi ekonomi bisa menyebabkan terjadinya krisis global perekonomian dunia yang membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan sosial dan politik suatu negara, terutama negara-negara miskin dan negara berkembang. Krisis ekonomi global ini pernah terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat dan meluas ke berbagai negara di dunia.

Depresi atau kemunduran ekonomi yang paling besar dalam sejarah dikenal dengan istilah *Great Depression*. Peristiwa itu terjadi dari tahun 1929 hingga 1939 yang bermula di Amerika Serikat dan selanjutnya merambah ke hampir seluruh belahan bumi termasuk Indonesia. Pada saat itu, menurut <http://indonesiaindonesia.com/f/36953-sejarah-krisis-ekonomi-dunia> (diakses 13 Januari 2012 pk1. 00.02) dan <http://icrp-online.org/082009/post-14.html> (diakses 13 Januari 2012 pk1. 00.12), saham di seluruh dunia berjatuhan dan bank-bank di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan sehingga jutaan pengangguran bermunculan dan kemiskinan merajalela.

Karena begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa Depresi Ekonomi itu bagi rakyat Amerika Serikat secara khusus dan dunia secara umum saat itu, istilah itu menjadi sangat populer bahkan hingga sekarang. Bahkan dengan hanya mengatakan *Depresi* tanpa tambahan kata *Ekonomi* pun, seperti pengertian yang disebutkan dalam Kamus Politik dan Hukum tersebut di atas,

pembaca sudah secara otomatis merujuk pada peristiwa itu. Walaupun demikian, dalam TSa saya menerjemahkannya dengan penjelasan tambahan menjadi “Depresi Ekonomi yang melanda dunia” untuk lebih memperjelas maksudnya.

Tabel 5.14: Penghilangan dan Naturalisasi

No.	TSu	TSa	Par.
32.	<p>Balo’ Toraja was founded by teachers and government servants who were at the center of efforts to stimulate Torajan ethnic identity. Another interesting, if ephemeral, secular organization with the most overtly ethnic appeal was founded by the first Torajan teacher (a student of van de Loosdrecht), K. Kadang. The Indigenous Brotherhood Cooperative (Cooperatie Persaudaraan Bumiputra), established in 1933 in Rantepao, grew out of the deepening malaise of the early 1930s. The cooperative was designed for urban consumers, who, Kadang wrote,</p> <p style="padding-left: 40px;">... in these hard times ... must look for ways to lighten [the burden of] our daily needs, our household necessities. If we heads of households cannot sufficiently or comfortably provide, we are disenchanting with our work. We still depend on others to obtain those needs,</p>	<p>Balo’ Toraja didirikan oleh para guru dan pegawai pemerintah yang merupakan tokoh utama dalam upaya menstimulasi identitas etnis Toraja. Organisasi sekuler lain yang menarik, walaupun tidak bertahan lama, didirikan oleh K. Kadang, orang Toraja pertama yang jadi guru (murid van de Loosdrecht). Organisasi itu sangat jelas bernapaskan etnis. Koperasi Persaudaraan Bumiputera yang didirikan tahun 1933 di Rantepao, lahir dari situasi <i>malaise</i> yang makin parah di awal tahun 1930-an. Koperasi itu dirancang bagi konsumen perkotaan, yang menurut Kadang,</p> <p style="padding-left: 40px;">... dalam masa sulit ini ... harus mencari cara untuk meringankan [beban] kebutuhan sehari-hari kita, keperluan rumah tangga kita. Apabila sebagai kepala rumah tangga kita tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, kita kecewa dengan pekerjaan</p>	[7.58]

	to put it bluntly. Isn't it so?	kita. Terus terang saja, kita masih bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan itu, bukan?	
--	--------------------------------------	---	--

Koperasi Persaudaraan Bumiputera (7.58) merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh orang Toraja untuk mendorong kemandirian ekonomi penduduk pribumi pada zaman kolonial. Dalam menerjemahkan nama lembaga ini saya menerapkan dua prosedur penerjemahan, yakni dengan penghilangan dan naturalisasi. Penghilangan saya lakukan pada terjemahan Inggris dari istilah Koperasi Persaudaraan Bumiputra pada TSu karena pembaca sasaran TSa yang berbahasa Indonesia sudah tidak membutuhkan penjelasan tersebut. Sementara itu, prosedur penerjemahan dengan naturalisasi diterapkan pada ejaan *Cooperatie* yang masih menggunakan ejaan asing (Belanda) yang kemudian mengalami naturalisasi menjadi Koperasi sesuai ejaan baku bahasa Indonesia.

Tabel 5.15: Penghilangan dan Transferensi

No.	TSu	TSa	Par.
33.	... J. Rapi', a secretary in the Forestry Service who became the second chairman of the PTC, gained a reputation as an activist that made him a hunted man by Netherlands Indies Civil Administration (NICA) officers after the Japanese Occupation.	... Dengan reputasi sebagai aktivis, J. Rapi', sekretaris pada Dinas Kehutanan dan juga ketua PTC yang kedua, menjadi buruan pejabat NICA setelah Pendudukan Jepang.	[7.71]

Menurut <http://id.wikipedia.org/wiki/NICA> (diakses 7 Mei 2012 pkl. 21.57), *Nederlandsch Indië Civil Administratie* atau *Netherlands-Indies Civil Administration* (disingkat **NICA** yang secara harfiah berarti 'Pemerintahan Sipil Hindia Belanda') adalah tentara sekutu yang bertugas mengontrol daerah Hindia

Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 dalam Perang Dunia II. NICA masuk ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu setelah Perang Dunia II berakhir.

Bagi bangsa Indonesia, apalagi sejarawan, NICA yang sebenarnya merupakan akronim dari istilah bahasa Belanda sudah sangat populer. Tidaklah mengherankan apabila seseorang dapat menggunakan istilah itu dengan baik tanpa harus mengerti kepanjangan dari singkatan itu. Oleh karena itu, dalam penerjemahan TSu saya hanya mencantumkan akronim NICA itu sebagai sebuah nama diri dengan menghilangkan terjemahan dari kepanjangan istilah itu.

Singkatnya, untuk menerjemahkan nama diri saya menerapkan prosedur penerjemahan transferensi (untuk nama Toraja atau Belanda khususnya), penerjemahan dengan penjelasan tambahan, pemberian catatan kaki, pengindonesiaan nama asing, penghilangan, dan kuplet.

5.3 Ungkapan Idiomatis

Berikut ini adalah anotasi dari ungkapan idiomatis yang terdapat dalam TSu yang saya terjemahkan ke dalam TSa dengan memberikan padanan dan dengan parafrasa.

5.3.1 Idiom yang Diberi Padanan

Ada dua idiom dari TSu yang saya berikan padanan dalam penerjemahannya ke dalam TSa, yakni *pil pahit* dan *lintah darat*.

Tabel 5.16: Idiom yang Diberi Padanan (*pil pahit*)

No.	TSu	TSa	Par.
34.	Not only did the campaign for a Dutch-medium school in Ma'kale-Rantepao succeed, but for a short time it functioned as the only Dutch-medium school in	Kampanye sekolah berbahasa Belanda di Ma'kale-Rantepao tidak hanya sukses, bahkan dalam waktu singkat sekolah itu telah berfungsi sebagai satu-satunya sekolah berbahasa Belanda di	[7.21]

<p>afdeeling Luwu, surely a bitter pill for the datu to swallow. Despite the fact that the Palopo HIS had been built even before Ma'kale applied for a Dutch-language school, the latter managed to sign a qualified teacher before Palopo could. And indeed, when the Netherlands East Indies government retrenched its social services in the early 1930s, the Palopo HIS was closed while the Ma'kale school managed to survive.</p>	<p><i>afdeeling</i> Luwu. Jelas itu pil pahit yang harus ditelan <i>datu</i>. Meskipun pada kenyataannya HIS Palopo telah dibangun, bahkan sebelum Ma'kale mengusulkan pembangunan sekolah berbahasa Belanda, Ma'kale berhasil mengangkat guru yang berkualifikasi sebelum Palopo dapat melakukannya. Apalagi pada kenyataannya, ketika pemerintah Hindia Belanda mengadakan penghematan dalam pelayanan sosial pada awal tahun 1930-an, HIS Palopo ditutup, sedangkan sekolah Ma'kale berhasil bertahan.</p>	
--	--	--

A bitter pill mengandung makna idiomatis. Dengan membaca keseluruhan konteks kalimat baik pada paragraf tersebut maupun paragraf-paragraf sebelum dan sesudahnya, dapat diketahui bahwa *datu* atau penguasa Luwu tidak sedang mengonsumsi pil atau obat yang rasanya pahit dalam pengertian harfiah. Berdasarkan konteks kalimat yang ada, terlihat bahwa ada upaya penguasa Luwu untuk mendirikan dan mempertahankan sekolah berbahasa Belanda di Luwu namun akhirnya ditutup oleh pemerintah Hindia Belanda karena alasan penghematan sementara sekolah yang sejenis di Ma'kale yang lebih muda usianya justru dipertahankan oleh Belanda.

Dengan kondisi seperti itu, *bitter pill* dalam konteks ini pastilah tidak digunakan dengan makna harfiahnya, melainkan makna kiasannya. LDOCE (2001, hlm. 119) mendefinisikan *a bitter pill (to swallow)* sebagai “something very unpleasant that you have to accept.” Pengertian senada juga diberikan oleh *The New Shorter Oxford English Dictionary* (1993, hlm. 234) sebagai “a hard

Universitas Indonesia

thing to take” atau “an unpalatable truth”. Singkatnya *bitter pill* digunakan untuk menggambarkan kekecewaan yang harus dialami seseorang karena suatu peristiwa. Menurut saya, pembaca TSa pasti sudah terbiasa dengan penggunaan kata *pahit* sebagai kiasan dari sesuatu yang tidak menyenangkan hati atau yang menyedihkan. Sebagai contoh, kita sudah terbiasa mendengar ungkapan “pahit getir kehidupan” dalam percakapan sehari-hari untuk mengacu pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, saya memilih untuk memadankan idiom *bitter pill* dengan idiom *pil pahit* dalam TSa.

Tabel 5.17: Idiom yang Diberi Padanan (*lintah darat*)

No.	TSu	TSa	Par.
35.	<p>... Reinforced for some years by Dutch missionaries who sought to differentiate the sheep from the goats, as it were, Torajan’s ethnic consciousness carried a strong negative appeal not dissimilar to other ethnic consciousness movements in the Netherlands East Indies:</p> <p>Many of us still depend on the <i>leech</i>. You all know that this leech is very dangerous when it sucks blood, for it sucks blood until it is full. And because of that, we really feel it when we are bitten. We also know that after losing blood we finally fall ill....</p>	<p>... Kesadaran itu diperkuat selama beberapa tahun oleh para misionaris Belanda yang berusaha membedakan domba dari kambing, sebagaimana adanya. Akibatnya, dalam kesadaran etnis orang Toraja terkandung semangat negatif kuat yang mirip dengan gerakan kesadaran etnis lain di Hindia Belanda:</p> <p>Banyak di antara kita yang masih bergantung kepada <i>lintah darat</i>. Anda semua tahu bahwa lintah ini sangat berbahaya ketika mengisap darah, karena dia mengisap darah sampai kenyang. Oleh karena itu, kita benar-benar merasakan gigitannya. Kita juga tahu bahwa setelah kehilangan darah akhirnya kita jatuh sakit....</p>	[7.58]

Dalam Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1987, hlm. 482), kata *leech* selain dapat diartikan secara harfiah yaitu “small

blood-sucking worm living in wet places of which one kind was formerly used by doctors for bleeding patients” juga dapat dimaknai secara figuratif menjadi “person who sucks profit out of others”. Berdasarkan konteks kalimat pada 7.58 di atas, *leech* lebih tepat diterjemahkan dengan menggunakan makna figuratif dari kata tersebut yang dapat dipadankan dengan *lintah darat* dalam bahasa Indonesia.

Lintah darat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, hlm. 934) didefinisikan sebagai orang yang membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, <http://bisnis.deskripsi.com/lintah-darat-0> (diakses 15 Mei 2012, pkl. 11.16) mendeskripsikan *lintah darat* sebagai “orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi; pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari peminjamnya; seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran (*loan shark*)”.

Sikap para pendatang di Toraja sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis TSu dianggap tidak hanya membantu orang Toraja, tetapi lebih dari itu justru mengeruk keuntungan besar dari orang Toraja. Tindakan itu dianggap sama dengan sifat lintah darat. Dengan demikian *leech* dalam konteks ini memang lebih tepat dipadankan dengan lintah darat yang sesuai dengan makna figuratif dari kata *leech* itu.

5.3.2 Idiom yang Dipadankan dengan Parafraza

Salah satu strategi untuk menerjemahkan idiom adalah dengan melakukan parafraza. Berikut ini saya akan menganotasi salah satu ungkapan yang dipadankan dengan parafraza.

Tabel 5.18: Idiom yang Dipadankan dengan Parafraza

No.	TSu	TSa	Par.
36.	To the extent the missionaries	Dari penjelasan para misionaris	[7.40]

Universitas Indonesia

<p>tried to explain these incidents, they saw the teachers as carrying the spare-the-rod-and-spoil-the-child philosophy a bit far. They did not see – or left no evidence that they did – the tenuous relationship of the Malay-speaking teacher to Torajan society....</p>	<p>menyangkut insiden itu, mereka melihat guru agak berlebihan dalam menerapkan filosofi mendisiplinkan anak dengan pukulan rotan. Mereka tidak menyadari–atau tidak meninggalkan bukti bahwa mereka memang menyadari–hubungan yang renggang antara guru berbahasa Melayu dan masyarakat Toraja....</p>	
--	--	--

Menurut <http://www.phrases.org.uk/meanings/328950.html> (diakses 12 Januari 2012 pkl. 00.46), ungkapan “*spare the rod and spoil the child*” pertama kali dipopulerkan oleh Samuel Butler dalam *Hudibras*, puisinya yang bernada satire berikut ini.

Love is a Boy,
by Poets styl'd,
Then Spare the Rod,
and spill the Child.

Kata *spill*, menurut informasi dari sumber yang sama, mengacu pada kata *spoil* yaitu salah satu bentuk ejaan kata itu pada masa itu.

Sementara itu, menurut <http://www idiomsite.com/sparetherod.htm> (diakses 12 Januari 2012 pkl. 00.50), ungkapan “*spare the rod and spoil the child*” yang sudah dikenal selama berabad-abad mengacu pada praktik pendisiplinan anak. Ungkapan itu menurut sumber tersebut dikutip dari kitab Amsal 13: 24 “He who withholds his rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently” (siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya).

Kutipan dari kitab Amsal tersebut menurut <http://www.religioustolerance.org/spankin13.htm> (diakses 12 Januari 2012 pkl. 01.26) singkatnya mengandung arti barangsiapa yang tidak menghukum anaknya yang telah berbuat salah, memanjakan anaknya. Terdapat banyak interpretasi

Universitas Indonesia

mengenai makna kata *rod* dalam ungkapan tersebut. Akan tetapi pada umumnya kata itu diartikan sebagai tongkat dari kayu, alat pemukul bola, bahkan ikat pinggang yang biasanya digunakan untuk memukul anak dan dapat menimbulkan rasa sakit. Kata *rod* dalam kitab Perjanjian Lama menurut Robert R. Gillogly, masih dari laman yang sama, mengacu pada tongkat kayu atau ranting pohon yang digunakan untuk pertahanan diri, untuk menggembala, bahkan untuk mendera pembantu.

Dalam penerjemahan buku ini, saya menerjemahkan ungkapan “*spare the rod and spoil the child*” dengan “mendisiplinkan anak dengan pukulan rotan” menggunakan prosedur penerjemahan dengan parafrasa. Hal itu dilakukan karena sejauh yang saya ketahui tidak ada ungkapan dalam BSa yang sepadan dengan idiom “*spare the rod and spoil the child*” itu. Jadi, parafrasa dilakukan dengan mengambil makna inti dari ungkapan tersebut dan menyesuaikannya dengan kebiasaan masyarakat pembaca Tsa dalam cara mendisiplinkan anak terutama mengenai alat yang dipakai, yakni rotan. Dengan demikian, pembaca sasaran Tsa diharapkan dapat lebih mudah memahami makna ungkapan itu. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan ungkapan itu saya menerapkan prosedur penerjemahan dengan parafrasa.

5.4 Metafora

Larson (1989, hlm. 267) menguraikan lima cara untuk menerjemahkan metafora seperti yang telah diuraikan pada Bab 2. Akan tetapi untuk keperluan anotasi ini saya akan menggunakan tiga dari lima strategi itu untuk menerjemahkan metafora yang ada dalam TSu, yakni penerjemahan metafora menjadi simile, penerjemahan metafora BSu menjadi metafora Bsa, dan penjelasan makna metafora tanpa menggunakan citra metaforisnya.

5.4.1 Metafora yang Dipadankan dengan Simile

Berikut ini adalah anotasi dari metafora yang diterjemahkan dengan simile dalam Tsa.

Tabel 5.19: Metafora yang Dipadankan dengan Simile

No.	TSu	TSa	Par.
37.	<p>Malay stream education was a cul-de-sac, designed to provide only the rudiments of primary instruction and to offer no path to secondary education. The five-year course at the landschap school was terminal as was the three-year course at the village school, except for those children of the elite who transferred to the landschap school for their final two years.</p>	<p>Pendidikan dengan sistem Melayu laksana sebuah kuldesak, dirancang hanya untuk memberikan landasan bagi pendidikan dasar dan tidak memberikan jalan menuju pendidikan menengah. Pendidikan di sekolah <i>landschap</i> hanya berlangsung hingga tahun kelima seperti halnya pendidikan tiga tahun di sekolah kampung, kecuali bagi anak kaum elite yang pindah ke sekolah <i>landschap</i> untuk dua tahun terakhir pendidikannya.</p>	[7.12]

cul-de-sac berasal dari bahasa Katalan yang berarti ‘dasar tas’. Makna istilah ini mengacu pada pengertian *buntu* atau *jalan tertutup* atau “tidak ada jalan keluar”. Kata *kuldesak* sendiri sudah menjadi bagian dari kosa kata bahasa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam KBBI (2008, hlm. 834). Menurut <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kuldesak> (diakses tanggal 17 November 2011 pkl. 16.00), dalam perencanaan kota kuldesak diciptakan untuk membatasi arus lalu lintas di wilayah pemukiman. Kuldesak tidak memberikan jalan kecuali untuk pergi ke dalam dan ke luar, namun beberapa kuldesak memungkinkan sepeda, pejalan kaki atau non-otomotif lainnya untuk melewati jalan penghubung atau jalan setapak.

Pada kalimat pertama dari paragraf 7.12 di atas, pendidikan dianggap sebagai sebuah perjalanan yang tentu saja melalui proses atau jalur tertentu. Namun sebagaimana perjalanan dapat berakhir atau menemui jalan buntu sehingga tidak dapat lagi dilanjutkan, pendidikan pun tidak terlepas dari

kemungkinan mengalami hal yang sama. Dalam hal ini pendidikan dengan sistem Melayu dianggap sama dengan jalan buntu atau kuldesak karena meskipun hanya merupakan pendidikan dasar, sistem ini tidak dapat menjadi saluran untuk melanjutkan ke pendidikan menengah sebagaimana seharusnya.

Karena adanya kesamaan karakteristik dari *kuldesak* atau *jalan buntu* dengan pendidikan dalam sistem Melayu yang diterapkan pada zaman Hindia Belanda tersebut, saya menerjemahkan metafora dari TSu itu menjadi simile dalam TSa.

5.4.2 Penerjemahan Metaforis

Berikut ini adalah anotasi penerjemahan metafora yakni dari metafora BSu ke metafora BSa.

Tabel 5.20: Penerjemahan Metaforis “a sea of Bugis”

No.	TSu	TSa	Par.
38.	... Also, much dissatisfaction with the Dutch was deflected by the Toraja’s growing ethnic consciousness of being islands surrounded by a sea of Bugis.	... Selain itu, berbagai ketidakpuasan terhadap Belanda dielakkan oleh kesadaran etnis yang sedang tumbuh di kalangan orang Toraja sebagai kepulauan yang dikelilingi oleh lautan Bugis.	[7.15]

Kalimat “the Toraja’s growing ethnic consciousness of being islands surrounded by a sea of Bugis” memiliki makna metaforis. Ada dua bagian penting pada kalimat tersebut yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut memiliki makna kiasan, yakni “Toraja ... being islands” dan “a sea of Bugis”. Yang pertama, kalimat di atas mengandung makna Toraja sebagai sebuah pulau. Pada kenyataannya, Toraja bukanlah merupakan satu pulau tersendiri yang terpisah dari pulau-pulau lain di Sulawesi Selatan yang disebut sebagai Bugis melainkan hanyalah sebuah daerah pegunungan yang berbatasan dengan wilayah Sulawesi

Tengah dan dikelilingi oleh daerah tempat tinggal suku Bugis. Yang kedua, di daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dalam kenyataannya tidak mengenal wilayah laut yang disebut laut Bugis. Dengan demikian, “a sea of Bugis” di sini menurut saya lebih mengacu pada pengertian ‘sejumlah besar’ sebagaimana salah satu pengertian yang diberikan oleh Peter Salim (2000, hlm. 1321). Oleh karena itu, “a sea of Bugis” dapat diartikan sebagai sejumlah besar orang atau suku Bugis yang mengelilingi suku Toraja. Walaupun demikian, untuk mempertahankan unsur metaforik dalam kalimat TSu tersebut, saya menerjemahkannya secara metaforis ke dalam BSa dengan asumsi pembaca TSa memahami kondisi geografis yang riil dan juga sekaligus memahami makna metaforis yang dimaksudkan oleh penulis TSu.

Tabel 5.21: Penerjemahan Metaforis “non-Islamic buffer”

No.	TSu	TSa	Par.
39.	<p>The mission argued that Dutch interests would be best served by continuing the policy initiated by Governor Couveur in 1924 to encourage the autonomy of the Torajan highlands from the Luwu lowlands. If indeed Ma’kale-Rantepao was to be preserved as a non-Islamic buffer, it must have its own schools system:</p> <p>Our Torajan youths should not be forced to go to the Muslim coast to spend long years under Islamic influence, perhaps converting to that religion themselves and later returning to exert a bad influence on the Torajan people.</p>	<p>Misi berargumentasi bahwa kepentingan Belanda dapat sepenuhnya terealisasi apabila dilanjutkan kebijakan yang diprakarsai Gubernur Couveur pada 1924 untuk mendorong otonomi dataran tinggi Toraja terpisah dari dataran rendah Luwu. Yang pasti, apabila Ma’kale-Rantepao hendak dipertahankan sebagai perisai terhadap Islam, Ma’kale-Rantepao harus memiliki sistem sekolah sendiri:</p> <p>Pemuda Toraja kita seharusnya tidak terpaksa pergi ke (daerah) pesisir yang Muslim untuk bertahun-tahun berada di bawah pengaruh Islam sehingga mereka kemungkinan menganut Islam dan kembali membawa pengaruh buruk bagi orang Toraja.</p>	[7.19]

Kata *buffer* pada kalimat “If indeed Ma’kale-Rantepao was to be preserved as a non-Islamic buffer” dapat dipadankan dengan kata *perisai* dalam konteks kalimat tersebut dengan mengacu pada makna kiasan kata *buffer* tersebut sebagai “separating potential belligerents” (The New Shorter Oxford English Dictionary, 1993, hlm. 295). Sementara itu, *perisai* (tameng) yang secara harfiah berarti alat yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan senjata lawan memiliki makna kiasan “seseorang yang dimanfaatkan untuk melindungi diri dari serangan, tuduhan, dan sebagainya” (Salim & Salim, 2002 hlm. 1141). Dengan mempertimbangkan kesamaan fungsi antara *buffer* dan *perisai*, sebagaimana yang dikandung oleh makna kiasan keduanya, saya menganggap pemadanan itu tepat.

Penggunaan kata *buffer* pada konteks kalimat tersebut di atas mengacu pada posisi atau peran Ma’kale Rantepao sebagai satu-satunya wilayah di Sulawesi Selatan yang belum mendapat pengaruh besar Islam pada saat itu sehingga Pemerintah Hindia Belanda ingin mempertahankannya sebagai tempat penyebaran agama Kristen. Dengan demikian Ma’kale Rantepao telah difungsikan sebagai perisai atau tameng untuk mencegah atau menghambat perluasan pengaruh Islam ke daerah Toraja dan sekitarnya. Pemilihan kata *perisai* sebagai padanan dari kata *buffer* dalam kalimat tersebut, menurut saya tetap dapat memberikan pesan metaforis pada TSa sebagaimana yang diharapkan penulis TSu.

5.4.3 Penerjemahan Nonmetaforis

Berikut ini adalah anotasi penerjemahan makna metafora BSu yang dijelaskan tanpa menggunakan citra metaforisnya.

Tabel 5.22: Penerjemahan nonmetaforis

No.	TSu	TSa	Par.
40.	... It is hard to gauge the extent to which a few celebrated cases of low-status children sneaking through a crack in the schoolhouse	... Sulit diperkirakan apakah tidak berlebihan bahwa sedikit anak dari kelas sosial rendah yang berhasil bersekolah dengan menggunakan	[7.5]

Universitas Indonesia

<p>door have inflated recollections about how commonly this occurred. One finds it hard to believe that low-status children could have perserved under the treatment they must have received from their supposed peers, unless the whole exercise in deception was carried out to unimaginable lengths....</p>	<p>kesempatan itu dianggap sebagai hal yang sangat lazim terjadi pada masa itu. Pada kenyataannya, hanya sedikit anak berkelas sosial rendah yang berhasil menggunakan kesempatan untuk bersekolah karena umumnya mereka tidak mampu bertahan di dalam lingkungan dengan kesenjangan status sosial....</p>	
---	---	--

LDOEC (2001, hlm. 1361) mendefinisikan *sneak* sebagai “to go somewhere secretly and quietly in order to avoid being seen or heard”. Sementara itu, salah satu pengertian *sneak* yang diberikan oleh <http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/sneak> (diakses 19 Juni 2012 pkl, 01.17) adalah “to put, bring, or take in a secretive or furtive manner; ‘sneak a look’; ‘sneak a cigarette’”. Dengan demikian, *Sneaking through a crack in the schoolhouse door* secara harfiah dapat diartikan sebagai menyelinap melalui pintu sekolah yang retak. Ungkapan itu digunakan penulis TSu untuk menggambarkan betapa sulitnya mereka yang berasal dari golongan sosial rendah mendapatkan kesempatan pendidikan pada zaman Belanda. Saking sulitnya dan sangat kecilnya peluang itu sehingga tindakan itu oleh penulis TSu disamakan dengan menyelinap melalui celah atau retakan pintu, sesuatu yang sangat mustahil dapat dilakukan. Walaupun demikian, pada kenyataannya masih ada yang berhasil melakukannya dengan susah payah.

Ketika menerjemahkan bagian ini, saya mengingat satu ungkapan yang cukup lazim di Toraja yaitu “passikola to’tok rinding” yang arti harfiahnya adalah murid yang mengikuti pelajaran dengan mengintip melalui celah dinding. Ungkapan itu sebenarnya mengacu pada kondisi atau pengalaman mereka yang tidak punya akses masuk sekolah pada zaman Belanda, tetapi nekad mengikuti

pelajaran lewat celah dinding sekolah yang umumnya terbuat dari gedek. Menurut informasi dari narasumber, Bapak Julius Saludung, kasus itu sebenarnya tidak banyak terjadi tetapi dibesar-besarkan dan menjadi terkenal karena kebetulan di antara yang mengalaminya ada yang akhirnya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dan memegang jabatan dalam pemerintahan.

Menurut saya inti pesan yang ingin disampaikan oleh kedua ungkapan di atas adalah mengenai sangat sulitnya seseorang yang berstatus sosial rendah mengikuti pendidikan di zaman pemerintahan Belanda. Oleh karena itu, dalam menerjemahkan TSu saya menyederhanakan kalimat itu dengan hanya mengambil makna intinya agar pesan yang ingin disampaikan penulis TSu dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca TSa. Akibatnya, nuansa metaforis yang terdapat pada TSu tidak lagi dapat ditemukan dalam TSa.

Penerjemahan buku sejarah ternyata memiliki kesulitan tersendiri karena adanya sejumlah istilah khas budaya pada TSu yang tidak memiliki padanan yang tepat dalam BSa. Untuk itu diperlukan prosedur penerjemahan yang sesuai agar makna atau pesan dan efek yang diharapkan penulis TSu dari pembaca sasaran TSu juga berhasil dialihkan dalam TSa sehingga pembaca sasaran TSa pun dapat menerima pesan itu dengan baik. Pada bab penutup saya akan menguraikan secara ringkas kesimpulan dari tugas akhir mengenai terjemahan beranotasi ini serta sumbang saran untuk pengembangan studi penerjemahan.

DAFTAR ACUAN

- Bararuallo, F. (2010). *Kebudayaan Toraja (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang)*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Baker, M. (2011). *In other words. A coursebook on translation*. (2nd Ed.). London: Routledge.
- Bigalke, T. W. (2005). *Tana Toraja: A social history of an Indonesian people*. Leiden: KITLV Press.
- Brotowidjoyo, M. D. (1993). *Penulisan karangan ilmiah*. Edisi Kedua. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Chaer, A. (1997). *Kamus ungkapan bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Collins Compact Dictionary and Thesaurus*. (2002). HarperCollins Publishers. Scarborough, England: Morton Word Processing Ltd.
- Dagun, S. M. (2000). *Kamus besar ilmu pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Durieux, C. (1991). Kreativitas dalam penerjemahan teknik. Diterjemahkan oleh Esther Yonita. Dalam *Regards sur la Traduction* No. 1, April 2000, 77–87.
- Echols, J. M. & Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- End, T. v.d. (1994). *Sumber-sumber zending tentang sejarah gereja Toraja 1901–1961*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Goddard, K. 1995. *Informative writing. Your practical guide to effective communication*. Great Britain: The Bath Press, Avon.
- Guth, H. P. (1969). *Words and ideas*. Third Edition. Belmont California: Wodsworth Publishing Company, Inc.
- Hacker, D. (1995). *A writer's reference*. Third Edition. Boston: Bedford Books of St. Martin's Press.
- Hatim, B. & Mason, Ian. (1990). *Discourse and the translator*. New York: Longman Inc.
- Hatim, B. & Mason, Ian. (1997). *The translator as communicator*. New York: Routledge.
- Hatim, B. & Munday, Jeremy. (2004). *Translation. An advanced resource book*. New York: Routledge.
- Hoed, B. H. (2006). *Penerjemahan dan kebudayaan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

- Hornby, A.S. (1987). *Oxford advanced learner's dictionary of current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Hurford, J. R., Heasley, Brendan, & Smith, Michael B. (2007). *Semantic: A coursebook*. (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kobong, et al. (1992). *Aluk, adat, dan kebudayaan Toraja dalam perjumpaannya dengan Injil*. Diterbitkan oleh Pusbang – Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Jakarta: Institut Theologia Indonesia.
- Kobong, Th. (2008). *Injil dan tongkonan : inkarnasi, kontekstualisasi, transformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Koerts, H.J. (2001). Amtenar BB di Sulawesi Selatan. Dalam, S.L. Van der. Wal (Ed.). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*. (Hlm. 42-71). Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kustiantie, R. T. (2007). *Terjemahan beranotasi buku High-tech heretic: reflection of a computer contrarian karya Clifford Stoll*. Depok: FIB-UI.
- Lakoff, G. & Johnson, Mark. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Larson, M. L. (1984). *Meaning-based translation. A guide to cross-language equivalence*. Boston: University Press of America, Inc.
- Larson, M.L. (1989). Penerjemahan berdasar makna: pedoman untuk pepadanan antarbahasa. (Kencanawati Taniran, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Arcan.
- Locher, G.P.H. (1997). *Tata gereja gereja Protestan di Indonesia: Suatu sumbangan pikiran mengenai Sejarah dan asas-asasnya*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Lombard, D. (2000). *Nusa Jawa: silang budaya. kajian sejarah terpadu. Bagian II: jaringan Asia*. (Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, & Nini Hidayati Yusuf. Penerjemah). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, D. (2000). *Nusa Jawa: silang budaya. Bagian III: warisan kerajaan-kerajaan konsentris*. (Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, & Nini Hidayati Yusuf. Penerjemah). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Longman dictionary of contemporary English*. Third Edition with New Words supplement. (2001). Harlow Essex: Pearson Educated Limited.
- Lukman, A. (2007). *Terjemahan beranotasi buku Occupational safety and health for technologists, engineers, and managers*. Depok: FIB-UI.

- Machali, R. (2009). *Pedoman bagi penerjemah. Panduan lengkap bagi anda yang ingin menjadi penerjemah profesional*. Bandung: Penerbit Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Miles, J., Bush, Donald, & Kaplan, Allin. (1982). *Technical writing: principles and practice*. Chicago: Science Research Associates, Inc.
- Munday, J. (2001). *Introducing translation studies. Theories and applications*. London & New York: Routledge.
- Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. New York: Prentice Hall.
- Nida, E. A. & Taber, C. R. (1974). *The theory and practice of translation*. Leiden: E.J. Brill.
- Nord, C. (1991). *Text analysis in translation. Theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis*. Amsterdam-Atlanta: Rodopi.
- Pasanda, A. A. (1995). *Pong Tiku pahlawan Tana Toraja: Pejuang anti kolonialisme Belanda 1905 -1907*. Jakarta: Fajarbaru Sinarpratama.
- Pudjiati, D. (2009). *Terjemahan beranotasi buku ajar 7e Accounting ke bahasa Indonesia*. Depok: FIB-UI.
- Pusat Bahasa. (2005). *Pedoman umum pembentukan istilah*. Edisi ke-3. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Reiss, K. (2000). *Translation criticism – the potentials and limitations. Categories and criteria for translation quality assessment*. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to discourse studies*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. (Satrio Wahono, Bakar Bilfagih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, Has Manadi. Penerjemah). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Salim, P. (2000). *Salim's ninth collegiate English-Indonesian dictionary*. (Edisi Pertama). Jakarta: Modern English Press.
- Salim, P. & Salim, Yenny. (2002). *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*. (Edisi Ketiga). Jakarta: Modern English Press.
- Salombe, C. (1982). *Bahasa Toraja Saqdan: Proses morfemis kata kerja*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Sarira, J.A. (1975). *Benih yang tumbuh VI*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia.
- Simbolon, P. T. (2006). *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Sugono, D. (Ed.). (2003). *Pengindonesiaan kata dan ungkapan asing*. Edisi Kedua. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sumbu, T, Merry E. Kalalo, Engelian R. Palandeng, dan Johny Lumolos. (2000). *Kamus politik dan hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- The new shorter Oxford English dictionary*. Thumb Index Edition. The New Authority on the English Language. (1993). New York: Oxford University Press.
- Venuti, L. (2004). *Translation studies reader*. Ed. ke-2. New York: Routledge.
- Wijnmaalen, H.J. (2001). Amtenar BB di Jawa Timur. Dalam, S.L. Van der. Wal (Ed.). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*. (Hlm. 190-214). Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Williams, J. & A. Chesterman. (2002). *The map. A beginner's guide to doing research in translation studies*. Manchester & Northampton: St. Jerome Publishing.

GLOSARIUM

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran	Acuan
A bitter pill (to swallow)	Sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima	LDOCE (2001, hlm. 119) ; <i>The New Shorter Oxford English Dictionary</i> (1993, hlm. 234)
Afdeeling	wilayah administratif setingkat keresidenan	http://id.wikipedia.org/wiki/Afdeling (diakses 30 Desember 2011 pkl. 00.55)
Alle den Volcke	semua bangsa	End (1994, hlm. 10),
A sea of Bugis	sejumlah besar	Salim (2000, hlm. 1321).
Buffer	Perisai, tameng	The New Shorter Oxford English Dictionary (1993, hlm. 295); Salim & Salim (2002: 1141).
Controleur	Kontrolir, tuan Petoro	KBBI (2008, hlm. 807); Van der Waal (2001:54)
Christian Toraja Union	Perserikatan Toraja Kristen (PTC)	Kobong (2008, hlm. 240).
Cul-de-sac	kuldesak	KBBI Edisi IV (2011); http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kuldesak (diakses tanggal 17 November 2011)
Datu	raja	KBBI (2008, hlm. 321)

Depression	Depresi Ekonomi	Kamus Politik dan Hukum, Sumbu, et al. (2000, hlm. 140); http://indonesiaindonesia.com/f/36953-sejarah-krisis-ekonomi-dunia (diakses 13 Januari 2012 pkl. 00.02) dan http://icrp-online.org/082009/post-14.html (diakses 13 Januari 2012 pkl. 00.12).
Florijn	Simbol mata uang Belanda	http://coinmill.com/NLG-calculator.html#NLG=1 (diakses 4 November 2011).
Greater Indonesian Party	Partai Indonesia Raya atau Parindra	http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Indonesia_Raya (diakses 7 Mei 2012, pkl. 22.52)
GZB	Lembaga zending	Th. van den End(1994)
HIS	Sekolah Belanda Pribumi	http://www.slideshare.net/anannur/pendidikan-di-indonesia-pada-masa-penjajahan (diakses 23 Desember 2011 pkl. 23.46); (Ricklefs, 2005, hlm. 332)
Indonesian National Party	PNI atau Partai Nasional Indonesia	http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia (diakses 7 Mei 2012, pkl. 22.58)
Kaunan	hamba atau orang yang wajib melaksanakan tugas tertentu dalam upacara adat	End (1994, hlm. xxii)
Landschap	lanskap	http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape (diakses tanggal 7 Januari 2011).
Leech	Lintah darat	Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1987); KBBI (2008);

		http://bisnis.deskripsi.com/lintah-darat-0 (diakses 15 Mei 2012, pkl. 11.16)
MULO	SMP	Ricklefs (2005); Simbolon, 2006).
Netherlands-Indies Civil Administration (NICA)	NICA ‘Pemerintahan Sipil Hindia Belanda’	http://id.wikipedia.org/wiki/NICA (diakses 7 Mei 2012 pkl. 21.57)
Onder-afdeeling	Wilayah administratif yang hampir setingkat dengan kabupaten	http://id.wikipedia.org/wiki/Onderafdeling (diakses 17 Nov 2011 at 11.19).
OSVIA	sekolah pelatihan untuk pejabat pribumi	Ricklefs (2005, hlm. 330),
Puang	Yang empunya	Bararuallo (2010, hlm. 27)
Sakdina	Sistem pelapisan sosial di Thai	http://www.hrsolidarity.net/mainfile.php/1999vol09no06/1018/ (diakses tanggal 23 Mei 2011) Mark Tamthai
Soelo	Suluh atau obor	Kobong (2008, hlm.162); End (1994, hlm.17–18)
Spare the rod and spoil the child	barangsiapa yang tidak menghukum anaknya memanjakan anaknya	http://www.phrases.org.uk/meanings/328950.html (diakses 12 Januari 2012 pkl. 00.46); http://www.idiomsite.com/sparetherod.htm (diakses 12 Januari 2012 pkl. 00.50); http://www.religioustolerance.org/spankin13.htm (diakses 12 Januari 2012 pkl. 01.26)
Tae’	Bahasa Tae’ yang digunakan di Toraja Sa’dan	Salzner (dalam Salombe, 1982)
Tallu	Wilayah yang	Bararuallo (2010, hlm. 39).

Lembangna	mencakup Makale, Sangalla', dan Mengkendek	
Tana'	patok	Kobong (2008); Kobong, et al., (1992).
Tana' bulaan	Tana' bulaan	Bararuallo (2010, hlm. 85).
The Indies Protestant Church	Gereja Protestan Indonesia	Locher (1997, hlm. 312); End (1994)
The land of Toraja	Tana Toraja	Pasanda (1995, hlm. 1); Kobong (2008: 180) ; Sarira (1975, hlm. 17-18)
The Netherlands East Indies	Hindia Belanda	http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda (diakses 17 November 2011 pkl. 11.50); Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Dagun (2000, hlm. 342); Kamus Inggris Indonesia (Echols & Shadily)
Tomakaka	Kakak tertua secara kemasyarakatan	Bararuallo (2010, hlm. 171).
Vervolgschool	Sekolah lanjutan	Kobong (2008); Simbolon (2006, hlm. 228); Ricklefs (2005)
Volkschool	sekolah rakyat	Simbolon (2006, hlm. 226) Ricklefs (2005, hlm. 334)
Volksraad	Dewan Rakyat	Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad , diakses 30 Desember 2011 pkl. 00.34) dan http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/03/volksraad-dpr-versi-nederland/ (diakses 30 Desember 2011 pkl. 00.46),

Zending	Lembaga pekabaran Injil.	KBBI (2008, hlm. 1824)
Zendeling	pengutusan	http://id.wikipedia.org/wiki/ Misionaris , diakses 28 Des' 11 pukul 10.27.

